



Adab Kita Berbahasa

***Menawar Bahasa yang Benar
Dengan Bernalar***

Dr. Shafwan Hadi Umry, M.Hum.

Dr. Emmy Erwina, M.A.



Adab Kita Berbahasa

**Menawar Bahasa yang Benar
Dengan Bernalar**



Dr. Shafwan Hadi Umry, M.Hum., lahir 27 Januari 1951 di Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai Sumatra Utara. Menamatkan pendidikan di SD Negeri Perbaungan, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam (S-1) IKIP Negeri Medan, dan S-2 (2008) serta S-3 (2014) pada Sekolah Pascasarjana Prodi Linguistik Fakultas Ilmu Budaya USU Medan. Beliau pernah menjadi guru SMP Negeri (1976-1982). Guru SMA Negeri 1 Medan (1982-1993). Beberapa buku yang ditulisnya antara lain, Bahasa Pers, Iklan dan Bahasawan (USU Press, 2011), Mitos Sastra Melayu (USU Press, 2010), Manusia Bandar dalam Pergulatan Budaya (USU Press, 2012), Serumpun Sajak Melayu (PMS, 2014), Sastra Relegius (Mitra, 2012). Tulisannya dalam bentuk artikel dan jurnal serta makalah telah beredar di berbagai surat kabar dan majalah baik di dalam negeri maupun luar negeri.



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A., Lahir di Bandung, 08 Maret 1962. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Sastra Indonesia di Universitas Sumatera Utara (1987). Pendidikan Magister pada Linguistik Universiti Sains Malaysia, Penang Malaysia (2001) dan Pendidikan Doktor Linguistik, Universitas Sumatera Utara (2014). Juga mengikuti Sandwich-Like Program-S3 Luar Negeri di NANYANG TECHNOLOGICA UNIVERSITY (NTU) Singapura (2012). Beliau adalah Dosen Lembaga Layanan Dikti Wilayah Sumatera Utara dpk Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Haran Medan. Saat ini aktif mengajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Filsafat Bahasa, Character Building, Etika dan Pengembangan Diri.



www.amertamedia.co.id
mediaamerta@gmail.com
amertamedia
Penerbit Buku



ADAB KITA BERBAHASA

**Menawar Bahasa Yang Benar Dengan
Bernalar**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ADAB KITA BERBAHASA

**Menawar Bahasa Yang Benar Dengan
Bernalar**

**Dr. Shafwan Hadi Umry, M.Hum
Dr. Emmy Erwina, M.A.**



ADAB KITA BERBAHASA

Menawar Bahasa Yang Benar Dengan Bernalar

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI
No 192JTE/2020
Cetakan Pertama:
15,5 cm x 23 cm
ISBN

Penulis:

Dr. Shafwan Hadi Umry, M.Hum
Dr. Emmy Erwina, M.A.

Desain Cover:

Dwi Prasetyo

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel. Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: amertamedia.co.id

Whatsapp: 081-356-3333-24

Kata Pengantar

Dunia literasi dan kebahasaan kita telah memiliki. Undang – undang Bahasa (No.24/2009). Pengaturan itu bukan saja pada bahasa tetapi juga pada lagu kebangsaan dan bendera nasional.. Pengaturan masalah UU Bahasa ini sangat kompleks dan didasarkan pada kehendak politik yang memperkuat jati diri masyarakat kita dalam berbangsa.

Istilah politik bahasa nasional digunakan pertama kali oleh Slamet Muljana (16 Mei 1959). Hal ini bertolak belakang dari pemaparan atas kegagalan politik bahasa kolonial penjajah Belanda dan sekaligus membahas aspek umum dan khusus tentang persoalan bahasa dalam kemerdekaan Indonesia.

Hal yang menarik untuk diketahui bahwa pertemuan semacam Kongres Bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada mulanya bukan digagasi oleh ahli bahasa dan sastrawan, melainkan oleh praktisi bahasa yakni wartawan Soemanang dan Soedardjo Tjokrosisworo.

Sejarah perkembangan bahasa Indonesia sejak awal pertumbuhannya banyak menyerap unsur bahasa lain, seperti Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda, dan dewasa ini bahasa Inggris. Proses penyerapan masa lalu berlangsung secara spontan berdasarkan citarasa orang seorang. Kini, zaman menuntut perencanaan

Dengan demikian pengembangan bahasa Indonesia harus dilakukan secara berencana pula. Oleh karena itu, dalam menentukan dasar dan arah kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan bahasa , faktor-faktor yang mempengaruhi laju dan gerak perubahan masyarakat dan bangsa harus benar-benar dipertimbangkan.

Buku yang sederhana ini memuat sejumlah peristiwa kebahasaan yang dipakai para konsumen bahasa Indonesia untuk melakukan transaksi sosial dalam berbagai bidang disiplin ilmu termasuk penggunaan Bahasa hukum Indonesia.

Kederasan informasi media digital dan keseratan komunikasi global menimbulkan aspek dan akibat yang berkaitan dengan 'kehilangan wacana kultural' dalam dunia bahasa kita. Artinya, peran peribahasa dan pepatah yang menjadi 'bumbu penyedap' dalam berbahasa menjadi terkikis hilang. Motto warisan lokal yang turun-temurun dalam khazanah bahasa Indonesia sudah jarang ditemukan dalam percakapan bahasa Indonesia

Akibat pertemuan dengan kosa kata asing yang dianggap bergengsi maka kosa kata Indonesia terdesak ke pinggir pasar. Kini, orang lebih spontan menyebutkan 'mangrove' daripada 'hutan bakau', lebih bergengsi mengatakan 'ular piton' daripada 'ular sawah'.

Perkembangan pesat informasi dan teknologi luar (media sosial, internet, komunikasi *online*, *Instagram* dan *face book*) mengakibatkan bahasa Indonesia berada pada posisi tawar-menawar pemilihan kosa kata yang seru dan mendebarkan.

Sejumlah tulisan pada buku ini berdasarkan posisi bahasa Indonesia menghadapi kekuatan pasar di ruang publik yang memiliki karakteristik sendiri dan sikap berbahasa yang bernalar tetap dituntut dalam mengatur lalu-lintas berkomunikasi dengan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Selamat membaca!

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
Adab Kita Berbahasa	1
Pelaku Berhasil Ditangkap dan Dihakimi Massa.....	5
China Peranakan Atau Tionghoa Peranakan?	7
Kerancuan Bahasa Papan Nama	9
Interferensi Kebahasaan	12
Bentuk Bersyukur dan Syukuran.....	14
Balada Tentang Nama	17
Bahasa dan Kekuatan Pasar	21
Bahasa dan Metafora Kecantikan.....	25
Politik dan Undang-Undang Bahasa	29
Bahasa Indonesia Era Pasar Bebas.....	33
Menertibkan Bahasa Asing di Tempat Umum	37
Bahasa Jurnalistik Indonesia	40
Tawar Menawar Dalam Kosa Kata	44
Bahasa dan Cinta Segitiga	47
Bahasa Lalulintas dan Bahasa Pers	50
Bahasa Dalam Konteks Sosial	54
Bahasa dan Sindrom Budaya	58
Forum Bahasa Media Massa	63
Jurnalistik Kultural	67
Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Resmi	72
Karakteristik Bahasa Indonesia Hukum.....	77

Peribahasa Hukum -----	88
Berbahasa Dengan Bernalar -----	90
Bentuk Kata -----	103
Pilihan Kata (Diksi) -----	112
Kalimat -----	122
DAFTAR PUSTAKA -----	133
PROFIL PENULIS -----	135

Adab Kita Berbahasa

Pemerolehan kepekaan dan kepedulian berbahasa menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran bahasa secara pragmatik.

Usaha untuk memberikan warna 'komunikatif' dalam pembelajaran bahasa Indonesia beriringan dengan usaha menguraikan sistem pendidikan global ke dalam satuan-satuan lebih kecil-disebut sistem kredit yang mandiri dan dapat digabungkan menurut cara yang berbeda sesuai sasaran dan kebutuhan pembelajaran.

Bahasa bukanlah sistem logika yang mengikuti garis lurus. Di dalam pembelajaran dengan pendekatan komunikatif bahasa diajarkan sebagaimana diinginkan di dalam komunikasi. Maka yang dituju bukanlah pencapaian pengetahuan mengenai tata bahasa atau penguasaan kosa kata. Kemampuan komunikatif yang hendak dituju perlu dijelaskan terlebih dahulu.

Pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa disebut juga pembelajaran dengan pendekatan pragmatik. Di dalam pembelajaran bahasa dengan pendekatan pragmatik bukan bentuk-bentuk bahasa yang menjadi sorotan perhatian. Pembahasan kalimat dikaitkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya dalam peristiwa komunikasi.

Kalimat 'Sudah jam Sembilan malam', misalnya jika ditinjau dari sudut pandangan struktural dapat dianalisis antara lain sebagai kalimat yang tidak memiliki subjek dan merupakan kalimat berita (deklaratif). Jika dianalisis secara pragmatik, maka yang dilihat pada

kalimat itu adalah segi penggunaannya di dalam komunikasi. Siapa yang mengatakannya dan pada konteks yang bagaimana?

Kalimat itu dapat berupa jawaban (yang informatif) terhadap pertanyaan Jam berapa sekarang? Tetapi jika kalimat 'sudah jam sembilan' itu diucapkan oleh seorang ibu yang mengelola rumah kos mahasiswi dan ditujukan kepada seorang mahasiswa yang sedang bertandang, maka kalimat itu dapat diartikan perintah pengusiran secara tidak langsung.

Pada situasi yang sama, dengan informasi yang sama (yakni, perintah menyuruh pulang tamu pria) alih-alih kalimat itu dapat pula diganti menjadi 'Sudah jam berapa sekarang? Pemilihan kalimat itu memberikan dampak yang berbeda pada si pembicara dan lawan bicara. Jika memilih yang mana di antara kedua kalimat itu yang diucapkan oleh ibu kos, tentu saja kalimat pernyataan (deklaratif) lebih enak ditegur dari pada kalimat pertanyaan (interogatif) bagi mahasiswa.

Begitulah yang terlihat dalam dialog siding etika yang dilakukan pada Mahkamah Konstitusi terhadap para saksi dalam peristiwa Ketua MK yang terlibat suap (TV One, 8 Oktober 2013). Beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh para hakim yang terhormat itu tidak semuanya bercorak pertanyaan tetapi bercorak 'perintah' agar yang ditanyai memberi pengakuan yang jujur dan benar. Peralihan ragam deklaratif (informatif) kepada ragam imperatif (perintah) terjadi dalam dialog terbuka tersebut.

Seorang hakim bertanya, "Apakah Saudara sebagai protokol tidak tahu siapa tamu yang diizinkan masuk menjumpai Ketua MK?" Kalimat itu dapat ditafsirkan pula yaitu 'Saudara seharusnya mengetahui siapa saja yang datang menemui Ketua MK!'

Dalam ranah *linguistik* (Kuswandi, 1990) contoh di atas diperjelas kembali dalam ucapan seorang guru di depan kelas. Kalimatnya perintah untuk mengambil kapur. (1) Saya perlu kapur, (2) Ambilkan kapur!, (3) Bisakah salah seorang mengambilkan kapur? (4) Di mana dapat diambil kapur?, dan (5) Kapurnya sudah habis.

Pada (1) dan (5) perintah dinyatakan dengan kalimat deklaratif, pada (3) dan (4) perintah diutarakan dengan kalimat interogatif, sedangkan pada (2) kalimat diungkapkan dengan kalimat imperatif. Sudah tentu ada perbedaan 'kadar' perintah pada masing-masing di antara kemungkinan itu, dan perbedaan itu mewarnai jenis hubungan antara si pembicara dan si lawan bicara.

Pemerolehan kepekaan berbahasa seperti ini yang menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran bahasa secara pragmatik. Hal itu lebih ditegaskan lagi yakni bagaimana memilih kalimat yang cocok di antara sekian kemungkinan yang tersedia untuk diterapkan pada situasi tertentu.

Peristiwa Tawuran

Banyak peristiwa perkelahian muncul akibat kebuntuan dan ketidakmampuan orang mengutip dan mencari bahasa. Seperti perang, perkelahian adalah jalan terakhir setelah pembicaraan dengan kata-kata mengalami kebuntuan. Istilah 'tawuran' yang muncul dewasa ini tidak dikenal ketika zaman film *cowboy* menjelajahi bioskop-bioskop di Indonesia tahun 1960-an. Dahulu biasanya anak-anak berkelahi juga selalu berpegang kepada 'aturan' yang dijadikan konvensi.

Misalnya kalau berkelahi tidak boleh menggunakan senjata tajam. Kalau dua orang penyabit rumput berkelahi, meskipun sedang memegang arit (sabit) dengan sadar mereka membuang sabitnya jauh-jauh supaya tidak digunakan untuk berkelahi. Mereka berkelahi hanya dengan anggota tubuh seperti kepalan tangan, kaki dan kadang-kadang menggunakan kepala atau giginya untuk mengigit. Kalau masing-masing mempunyai kelompok perkelahian, maka itu dilakukan 'satu lawan satu' atau *one by one*. Perbuatan main keroyok dianggap perbuatan tercela.

Dalam tawuran atau (perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, mungkin inspirasi film kungfu satu lawan sepuluh. Kesepakatan atau C konvensi etika perkelahian seperti yang dipakai anak kampung dahulu tidak dipedulikan lagi. Etika satria tidak dihiraukan.

Saini Km (Mantan Direktur RI) pernah berkata kepada penulis bahwa generasi muda sekarang tidak pernah membaca Hikayat Mahabrata, Hikayat Arjuna Wiwaha atau Hikayat Hang Tuah. Mungkin mereka tidak mengenal lagi apa itu kesatria atau raksasa angkara murka. Oleh karena ajaran yang disampaikan secara tidak langsung melalui wayang, teater tradisi dan sandiwara bangsawan tidak lagi sampai pada mereka.

Mengapa mudah sekali terjadi tawauran? Mengapa mudah sekali menggantikan kata-kata dengan tinju dan tendangan? Pertanyaan ini dilontarkan Ajib Rosidi (2011). Ia menjawab karena kedua belah pihak yang berkelahi tidak dapat menyampaikan pendapat dan pikirannya dengan kata-kata serta kalimat yang dapat diterima oleh pihak yang lain. Hal ini menunjukkan kemampuan berbahasa yang berkepentingan sangat terbatas. Pembelajaran bahasa Indonesia termasuk bercakap-cakap seharusnya membuat peserta didik menjadi orang yang bijak dan santun dalam mengemukakan pikiran dan pendapatnya.

Para peserta didik, termasuk mahasiswa harus tahu kata-kata dan kalimat yang baik yang harus diucapkan dan tahu kata-kata atau kalimat yang patut dikemukakan terhadap orang lain atau di forum resmi. Banyak kita perhatikan dialog dan pernyataan di televisi yang menggambarkan rendahnya mutu penggunaan bahasa Indonesia termasuk pemakaian kata yang kasar dan spontan tanpa pilihan yang tepat dan seksama. Hal ini mengakibatkan kata-kata itu keluar tanpa ada seleksi terlebih pada acara *live* di televisi yang tidak mungkin dihentikan.

Berdasarkan kasus bahasa di atas diperlukan penggunaan bahasa Indonesia secara bernalar dan beretika.*

Pelaku Berhasil Ditangkap dan Dihakimi Massa

Pemakaian kalimat di atas banyak muncul dalam tayangan televisi dan berita surat kabar termasuk juga di media massa *online*. Pada umumnya kalimat tersebut ditemui pada rubrik kriminalitas. Marilah kita simak penalaran kalimat di atas secara seksama.

Pola kalimat di atas termasuk pola kalimat pasif yakni menggunakan awalan *di* pada *ditangkap* dan *dihakimi*. Sedangkan pola kalimat aktif ditandai dengan penggunaan awalan *me* (menangkap, menghakimi). Berikut ini diturunkan kalimat yang berpola aktif dan berpola pasif.

- *Polisi menangkap penjahat itu* (aktif)
- *Penjahat itu ditangkap oleh polisi* (pasif)

Pada kalimat pertama, polisi berkedudukan sebagai subjek pelaku dengan arti orang yang melakukan pekerjaan penangkapan terhadap penjahat. Pada kalimat kedua, penjahat berposisi sebagai subjek penderita yang kedudukannya dikenai tindakan penangkapan oleh polisi.

Kembali kepada judul di atas, benarkah pola kalimat, ‘pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi massa? Pertanyaan pun muncul siapakah yang berhasil dalam kalimat tersebut? Pihak pelaku atau pihak massa? Untuk hal tersebut kita perlu melacak dan menjelaskan ‘perkara penghakiman’ di atas. Marilah kita simak kembali contoh pola aktif dan pasif di atas.

- *Massa berhasil menangkap dan menghakimi pelaku* (aktif)
- *Pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi massa* (pasif)

Pada kalimat berpola aktif penalaran kalimat dapat berterima. Namun, pada kalimat berpola pasif 'kurang dapat berterima'. Siapakah sesungguhnya yang berhasil? *Massa* atau *pelaku*? Apabila yang berhasil adalah pelaku, berarti kalimat tersebut tidak bernalar dan berasio.

Oleh karena bukan pelaku yang berhasil, tetapi massa yang menangkapnya yang berhasil. Kesimpulan, kalimat pada judul di atas tidak dapat dipasifkan sebab penalarannya tidak berterima.

Kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi (1) "Massa berhasil menangkap dan menghakimi penjahat itu. Kalimat (2) Pelaku ditangkap dan dihakimi (oleh) massa.

China Peranakan Atau Tionghoa Peranakan?

Pada berbagai pertemuan dengan mahasiswa saya mendapat pertanyaan seputar mengenai istilah China peranakan dan Tionghoa peranakan.

Mereka mengajukan pertanyaan manakah kedua istilah itu yang tepat dari sudut pandangan bahasa.

Kata China mengacu pada sebuah negeri di Asia yang sebelum tahun 1912 pemerintahannya berbentuk kekaisaran China dan sesudah itu berubah menjadi Republik Rakyat Cina (RRC) sedangkan Republik China mengungsi ke Taiwan.

Orang China yang pergi merantau kemudian menetap di negara lain, (seperti Indonesia di masa dahulu) disebut China perantauan. Keturunan China perantauan di sebut China “asli” yang masih tinggal di negaranya yang disebut China totok) Kata China juga digunakan untuk menunjukkan bahasa yang dipakai oleh negeri itu (yang dialeknnya, antara lain, *Amoi, Hakka, Kanton, dan Mandarin*).

Dalam bahasa Indonesia, kata *cina* yang bermakna ‘negeri’ bersinonim dengan Tiongkok. Bangsa atau orang yang berasal dari negara Tiongkok disebut Tiongkok atau Tionghoa. Dalam konteks sosial ekonomi Indonesia (masa Orde Baru) kata *cina* dipahami oleh sebagian besar masyarakat dalam pandangan yang agak ‘negara’ lebih meyakini sebutan etnik Tionghoa. Dalam konteks keilmuan, penggunaan istilah China peranakan lebih tepat daripada Tionghoa peranakan.

Setelah era reformasi penggunaan istilah “Tionghoa lebih populer dan mencerminkan kesantunan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat. Sikap keakraban dan partisipasi lebih diutamakan oleh karena etnik Tionghoa sebagai warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama membangun bangsa ini.

Kerancuan Bahasa Papan Nama

Ketika tempat tinggal Tukimin berganti nama dari *Citra Grand City* menjadi Citra Raya Tangerang, seolah tidak ada perubahan apa-apa. Oleh karena hanya diubah, cicilan kredit rumah tetap harus lunas. Demikian pernah disampaikan ahli bahasa Anton Moeliono pada masa hidupnya.

Dari segi bahasa perubahan itu sangatlah berarti bagi pengamatan pakar bahasa itu. Mengapa? Oleh karena perubahan itu telah menyadarkan para pengembang (*developer*) untuk lebih bangga pada bahasa Indonesia. Kebanggaan itu penting dalam menjunjung bahasa persatuan satu yakni bahasa Indonesia. Dalam politik bahasa (Depdiknas, 2000) ada tiga ranah kebijakan bahasa yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Dalam hal ini dibatasi pembicaraan mengenai bahasa asing yang masuk dan menularkan sejumlah kosa kata dalam papan nama dan baliho di lokasi perkotaan. Ada tiga hal yang muncul mengapa bahasa Inggris begitu mudah menjelajah wilayah Indonesia. *Pertama*, faktor peradaban yang didukung oleh bahasa Inggris adalah peradaban yang maju ekonominya, teknologinya, dan pengetahuan kesusastraan. Jadi yang unggul itu bukan bahasa Inggrisnya tetapi para penuturnya. *Kedua*, publikasi buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, 80 persen dari produk dunia. *Ketiga*, faktor psikologis masyarakat elite kita yang lebih bergengsi menuliskan kata Inggris daripada menuliskannya ke dalam bahasa Indonesia. Jika ini dapat disebut tuna

bahasa yakni *kehilangan harga diri* berbahasa Indonesia dan mengakibatkan kerancuan berbahasa.

Contoh itu dapat ditemukan pada bidang *real estate*, kata *real estate* pun diambil dari bahasa asing. Belum lagi produknya antara lain, dengan memunculkan istilah *regenci villa*, *higland*, *lakeside*, *riverside*, *royale*, *hill* dan *mall*.

Imbauan perlunya penggantian kata-kata asing itu mendapat sambutan dari pengusaha REI (*Real Estate Indonesia*) dengan mengganti kawasan pemukiman dan *properti* yang dibangun. '*Citra Garden*' diubah menjadi 'Perumahan Citra', '*Legend City*', walaupun sudah menyedot biaya besar untuk iklan dan papan reklame diganti menjadi 'Kota Legenda'.

Pengusaha perumahan terutama yang memiliki pangsa pasar menengah ke atas memang mengaku apa yang dilakukan selama ini dengan penggunaan istilah asing semata-mata hanya untuk kepentingan pemasaran, dan luput menyadari dampak sosialnya. Sebagian besar masyarakat penghuni *real estate* 'merasa latah' dan ikut-ikutan bangga jika punya rumah di kawasan yang namanya berbau asing.

Namun ada seorang pengusaha *real estate* menolak anggapan bahwa pengguna nama-nama asing pada kawasan perumahan bukan karena faktor gengsi dan promosi. Contohnya banyak perumahan berlabel istilah lokal tetap mendapat minat dari calon pembeli. Pertimbangan seseorang membeli rumah bukan pada nama dan kawasannya, tetapi pada *fasilitas yang disediakan dan bentuk serta tipe rumah yang didambakan*. Misalnya proyek perumahan menggunakan istilah lokal laku keras. Lihat saja proyek Permata Hijau, Kemang Pratama, Kelapa Gading atau Pondok Indah.

Siapa yang peduli?

Setelah sang "Pendita Bahasa" Anton Moeliono meninggal, maka penggunaan kata-kata asing itu kembali merebak dan menular ke berbagai penjuru tanah air khususnya di pusat-pusat kota. Beberapa contoh pemakaian bahasa asing pada media luar ruang dapat dilihat pada kain rentang, papan nama dan baliho.

Silakan pembaca yang budiman melihat papan nama di depan pintu masuk kawasan Bandara Polonia Medan (20 Desember 2012). Di sana tertulis *Year and Festival Season, 2012, Fans gathering* Tukang Bubur Naik Haji. *Wonderful Indonesia*.

Saya heran apakah saya berada di Australia atau Singapura. Seharusnya tulisan itu menggunakan juga bahasa Indonesia. Oleh karena yang membaca setiap lewat lebih banya warga Indonesia. Lebih baik tulisan itu dalam itu dalam bahasa Indonesia, “Festival akhir tahun 2012, pengunjung berkumpul dalam acara “Tukang Bubur Naik Haji”. Orang Indonesia yang menakjubkan.

- (1) *Cahaya Murni Computer penjual cash/kredit & service*. Jika penulisan kain rentang itu menggunakan bahasa Indonesia, maka seluruh kata dalam kain rentang juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Kata *computer* (komputer), *cash* (tunai), kredit (utang) dan *services* (pelayanan).
- (2) Percetakan & Photo Copy (seharusnya foto kopi).
- (3) *Sorry not for sale, rentenly* (maaf tidak dijual, hanya penyewaan).
- (4) Buka 24 jam, *Internet Café, high speed Internet, you can say, you can see*. Pada papan nama tersebut ditulis ‘*Internet Café*’, adalah bahasa Indonesia yakni ‘kafe internet’. Kata ‘kafe’ diserap ke dalam bahasa Indonesia yang bermakna, ‘tempat minum yang pengunjungnya dihibur dengan musik’.
- (5) *Perhatian, seluruh tempat parkir mesin mobil dimatikan*. Pembaca akan mengira bahwa pengumuman tersebut ditujukan untuk ‘seluruh tempat parkir’, bukan untuk manusia seperti ‘tamu’, ‘pengunjung’ atau ‘penduduk perumahan sekitarnya’. Kesan makna pengumuman ini menyuruh ‘seluruh tempat parkir’ untuk mematikan mesin mobil. Seakan-akan ‘seluruh tempat parkir’ sebagai subjek kalimat dapat melakukan pekerjaan mematikan mesin. Sedangkan maksud sebenarnya bahwa pengemudi tempat itu. Kalimat itu dapat diperbaiki. Perhatian! Harap mesin mobil dimatikan selama parkir di tempat ini.

Demikian teropong bahasa kali ini. Selamat berbahasa Indonesia yang benar dan baik!*

Interferensi Kebahasaan

Dalam berita surat kabar umumnya dan khususnya pada percakapan lisan, sering pemakai bahasa menggunakan akhiran *-Nya*. Pengaruh akhiran *-nya* termasuk dari bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia.

Contoh:

- (1) Rumahnya paman bertingkat dua
- (2) Tentunya, dengan tidak melupakannya upaya guru dan dosen dalam meningkatkan pembelajaran atau perkuliahan di kelas, pemerintah berkewajiban untuk memberlakukan kurikulum baru (kurikulum merdeka) untuk meningkatkan kualitas berbahasa Indonesia generasi muda.

Pada kalimat (1) fungsi *-nya* menyatakan hubungan kepemilikan (posesif) yang dinyatakan oleh hubungan dua patah kata benda yang disera-angkakan; rumah paman artinya rumah milik paman. Antara dua kata itu tak perlu diselipkan kata lain yang berfungsi menyatakan kepemilikan sebab fungsi itu sudah dinyatakan oleh hubungan kedua kata itu. Pemakaian akhiran *-nya* seperti di atas dipengaruhi oleh pengaruh bahasa daerah. Perhatikan contoh di bawah ini:

Bahasa Jawa: *omah e paman*. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan rumahnya paman, maka struktur itu meniru struktur bahasa daerah. Sifat posesifnya dinyatakan dua kali yaitu dengan hubungan itu dan dengan nya.

Misalnya: rumahnya = rumah kepunyaannya (*nya* = paman).

Prof. Slametmuljana mengatakan bahwa pemakaian - nya seperti itu boleh apabila miliknya perlu dinyatakan terang-terang seperti contoh di bawah ini.

- Ini anaknya Pak Amir, bukan adiknya si Badu
- Yang terbakar semalam rumahnya Tuan Said

Namun, dalam bahasa Indonesia prinsip kaidahnya menyatakan apabila kata ganti milik (nya) tidak boleh diikuti oleh orangnya. Bukan rumahnya paman, tetapi rumah paman, dan bukan rumahnya Tuan Said, tetapi rumah tuan Said.

Pada kasus kalimat (2) di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada umumnya bahasa-bahasa saling berkontak satu dengan yang lain. Dalam hal ini, akan terjadi saling pengaruh di antara kedua bahasa yang berkontak itu. Pengaruh kebahasaan demikian itulah yang disebut interferensi. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa interferensi kebahasaan merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bahasa dalam sebuah masyarakat bahasa. Bahasa Indonesia juga berkontak dengan bahasa-bahasa daerah dan termasuk bahasa-bahasa asing yang juga digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Bentuk 'tentunya' adalah bentuk kebahasaan yang secara morfologis telah terpengaruh atau terinterferensi bahasa daerah. Bentuk 'tentunya' hadir sebagai 'tentune' di dalam bahasa Jawa. Demikian pula bentuk 'makanya' dan 'karenanya', sesungguhnya adalah bentuk yang harus dihindari di dalam laras ilmiah. Apa yang terjadi pada bentuk-bentuk kebahasaan di atas itu persis sama dengan yang terjadi pada bentuk 'tentunya'.

Maka, bentuk kebahasaan yang harus digunakan di dalam penulisan karangan ilmiah atau ragam resmi di surat kabar (ragam jurnalistik) adalah 'tentu saja'. Adapun bentuk-bentuk seperti 'makanya' dan 'karenanya', harus diubah menjadi 'maka dari itu' dan 'oleh karena itu'. Dalam konteks pemakaian yang sedikit lebih rendah peringkat keformalannya, bentuk terakhir disebutkan itu dapat diganti menjadi 'karena itu'. Demikian kasus bahasa yang dapat Anda atasi secara seksama.*

Bentuk Bersyukur dan Syukuran

Pada umumnya masyarakat termasuk surat kabar banyak memuat judul yang berkaitan dengan peristiwa bersyukur. Bukankah sikap bersyukur itu memang diajarkan oleh agama (Islam) agar umat Islam selalu bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah YMK.

Asal kata syukur ini memang berasal dari kata Arab (*syukr*). Dari asal kata tersebut dibentuklah kata-kata lain dengan menggabungkannya dengan kata 'syukur'. Misalnya, sujud syukur, kenduri bersyukur, pesta bersyukur. Namun, kata 'bersyukur' ini memiliki bentuk bersaing dengan kata 'syukuran'. Surat kabar lebih cenderung menuliskan acara syukuran daripada acara bersyukur. Misalnya, (1) Hanura Syukuran Sambut Kemenangan Gan-Teng. (2) Warga Medan XX Syukuran kemenangan Gan Teng. (3) MABMI Medan melaksanakan acara Syukuran di Medan Club.

Sebelum sampai menentukan mana yang benar di antara dua kata di atas, baiklah dirujuk pengertian syukur dalam aspek semantik (arti kata). Menurut KBBI (1990: 878) kata syukur termasuk jenis kata benda (nominal) yang berarti terimakasih kepada Allah. Ia mengucapkan syukur kepada Allah karena terlepas dari marahabaya. 2. Syukurlah ayahku tidak cedera pada kecelakaan itu (menyatakan lega, senang). Ia mensyukuri putrinya yang baru sembuh dengan melaksanakan kenduri (mengucapkan terimakasih, berterimakasih karena kesembuhan). Syukuran ialah ucapan syukur.

Dari aspek morfologis (bentuk kata) dikenal beberapa fungsi akhiran yakni /an, /i/, dan /kan/. Fungsi akhiran -an adalah membentuk kata benda. Misalnya makan (kata kerja) bila ditambah akhiran - an (makanan) menjadi kata benda yang berarti yang dimakan. Contoh yang lain: minuman, manisan. Jadi, fungsi -an adalah membentuk kata benda dari jenis kata kerja dan kata sifat atau kata keadaan.

Kata 'syukur' termasuk golongan kata benda (nominal). Apakah jenis kata benda dijadikan kata benda lagi? Misalnya: Ali Topan Setan Jalanan. Kata 'jalan' termasuk kata benda lalu dengan penambahan akhiran -an menjadi jalanan termasuk bentuk yang hiperkoreksi (bentuk benar dibenarkan lagi akhirnya menjadi salah). Penambahan akhiran -an ini banyak ditemukan dalam tulisan di surat kabar akibat gangguan yang muncul dari struktur bahasa ibu yang mempengaruhi bahasa seorang yang bilingual (pemakaian dua bahasa). Hal ini tidak dapat dihindarkan, oleh karena bahasa ibu telah dipakai sejak kecil di rumah, dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dan telah demikian meresap pada diri si pemakai bahasa itu.

Oleh karena pengaruh bahasa Jawa dan Sunda, akhiran -an dijumpai dengan fungsi yang lain. Yang akan dibicarakan di bawah ini pada masa dahulu tidak dikenal dalam bahasa Indonesia.

Sebagai contoh diturunkan:

1. Kata sifat diberi akhiran-an, tetapi kata bentuknya tetap kata sifat. Fungsi akhiran -an menyatakan intensitas dengan arti lebih, misalnya: besaran, kecilan, murahan, mahal, dan bagus. Contoh dalam kalimat: (1) Bagus sepatuku daripada sepatumu. (2) Rumah ini terlalu besar, saya mencari yang kecilan. (3) Yang murah belum tentu murahan.
2. Ada pula kata-kata benda yang berupa akhiran -an, padahal menurut aturan bahasa Indonesia, pemakaian akhiran -an seperti itu tidak perlu. Contoh: sekolahan, kantoran, jalanan, ruangan, dan kuburan.

Kata ruangan kemudian berkembang membentuk arti khusus, berbeda dari kata ruang. Kata ruang dipakai misalnya pada: ruang angkasa, ruang sastra (budaya Waspada), ruang tanya-jawab. Ruangan berarti kamar, bilik atau bangsal seperti pada ruangan olahraga, ruangan belajar, ruangan ganti pakaian.

J.S. Badudu (1982) pernah menjelaskan kata-kata jalanan, kuburan, dan sekolahan. Menurut beliau jalanan menyempit artinya pada apa yang disebut "*street*" dalam bahasa Inggris. Jalan dapat dipakai dengan arti bermacam-macam seperti: jalan hitungan, mencari jalan ke luar, jalan raya. Kata 'sekolahan' terbatas artinya pada gedung sekolah tempat murid belajar, sedangkan kata sekolah dapat berarti macam-macam, misalnya, sekolah kami dimulai pukul tujuh. Kata 'kuburan' menyebut artinya yaitu tanah (lubang) tempat jenazah disimpan. Kata 'kubur' mungkin lebih dirasakan sebagai kata kerja, sehingga bentukan dengan awalan me- dan di-, dijadikan mengubur, dikubur yang seharusnya menguburkan, dikuburkan.

Sebagai penutup, kita tetap menyimak perkembangan akhiran – an yang di atas. Bahasa adalah alat komunikasi masyarakat. Karena itu, diterima atau tidaknya suatu bentukan atau suatu unsur baru masyarakat pemakai bahasa itu pulalah yang menentukannya.

Balada Tentang Nama

Banyak nama jalan dan tempat menjadi sejarah atau cerita dan menjadi buah bibir masyarakat. Sebutlah Jalan Pasar Ikan Lama di daerah Kesawan kota Medan. Dulu tempat orang berniaga ikan tetapi sekarang dikenal sebagai pusat perbelanjaan bergengsi. Para pengunjung baik dari luar kota Medan maupun wisatawan negeri jiran (Malaysia, Singapura dan Brunei) menyempatkan diri mampir di kios-kios kain tersebut.

Dahulu nama-nama jalan tersebut berdasarkan nama-nama tempat seperti Pulo Berayan, Tanjung Manggusta (kini Tanjung Gusta), Petisah, Silalas dan sebagainya. Dengan kata lain, nama-nama itu merupakan ciri khas, masing-masing kota, sehingga didapati kesan betapa beranegakaramannya nama-nama tempat di daerah dan pada umumnya di tanah air.

Kalaupun dahulu ada nama-nama orang yang dijadikan nama jalan, hal itu berkaitan dengan peranannya di daerah tersebut. Sebagai contoh di depan kantor Pos Besar Medan arah ke stasiun kereta api dahulu terpampang nama penyair Chairil Anwar (kini jalan Bukit Barisan). Pada beberapa kawasan tertentu jalan-jalannya menggunakan nama tokoh-tokoh pejuang seperti Admegoro, Parada Harahap, Ani Idrus, Tan Malaka, Madong Lubis, Cokroaminoto dan seterusnya. Nama-nama tersebut termasuk nama para tokoh yang pernah tercatat dalam sejarah di republik ini dan tetap dipertahankan. Nama-nama jalan yang khas di setiap kota harus dipertahankan.

Namun, sekarang nama-nama jalan di berbagai kota di Indonesia terus menerus diganti dengan nama orang, kebanyakan nama pahlawan nasional yang berasal dari tentara. Padahal orang-orang tersebut tidak ada hubungannya dengan peristiwa ditempat tersebut. Sebutlah sebagai misal Jalan Sudirman, Jalan A. Yani, Jalan S. Parman. Mereka adalah tokoh-tokoh dalam sejarah nasional dan kebanyakan sudah diangkat sebagai Pahlawan Nasional.

Di samping nama-nama tentara ada juga nama-nama pejuang kemerdekaan dan politisi yang besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara seperti dr. Sutomo, dr. Wahidin, Setia Budi, Wahid Hasyim dan H. Ahmad Dahlan. Namun, tidak banyak bahkan nyaris dilupakan nama-nama pujangga Amir Hamzah kecuali Chairil Anwar yang kini bertukar menjadi Jalan Bukit Barisan.

Kita tidak pernah membaca jalan S. Takdir Alisyahbana, Sabaruddin Ahmad, Sanoesi Pane, Nahum Situmorang, Merari Siregar (tokoh pelopor cerita pendek Indonesia) tidak menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan di Sumatera Utara (dulu dan kini).

Hal ini membenarkan apa yang ditulis Paul Thomson (2012) pada dasarnya fokus sejarah bersifat politis – sebuah dokumentasi tentang kaum cendekiawan dan orang-orang biasa-sedikit sekali diperhatikan. Sebagian penyebabnya adalah karena para sejarawan yang tergolong dalam kelas administrasi dan pemerintah berpikir bahwa hal-hal yang terkait pemerintahlah yang penting.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah seharusnya keragaman yang menjadi ciri khusus sesuatu daerah harus dipertahankan. Kita memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika dan sebaiknya perlu keseimbangan antara bhineka dan ika. Para pejabat pemerintah daerah dan para anggota dewan rakyat harus mempertahankan nama-nama yang mencerminkan kekhususan daerahnya, jangan mudah mengganti nama-nama jalan yang tidak ada hubungannya dengan sejarah tersebut. Sebaiknya nama-nama yang mempunyai sejarah lokal tersebut harus dipertahankan.

Banyak kata yang ditawarkan untuk dimekarkan dalam penabalan nama jalan. Hal itu baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lokal setempat yang bisa dipakai sebagai nama jalan. Penggunaan nama-nama flora dan fauna sebagai nama jalan bukan saja mengingatkan kita akan kekayaan alam, melainkan juga akan menyebabkan kita mengetahui betapa kaya alam Indonesia. Sekarang banyak nama tanaman-tanaman dan nama-nama hewan yang sudah

hilang dari ingatan. Kita mengetahui namanya tetapi tidak tahu bentuknya.

Dari aspek ekolinguistik sejumlah kosa kata tanaman telah hilang. Orang tidak tahu lagi kata daun reruku, selasih, kayu tualang, padi sijambu dan padi sipulut. Banyak tanaman dan hewan yang dilihat sehari-hari tapi kita tidak tahu namanya dalam bahasa kita sendiri, sehingga digunakan nama-nama asing seperti pohon sirsak, bunga kana, parasit, anyelir yang padanannya dalam kata Indonesia alah mandalika, bunga sebe, benalu, bunga seruni atau bunga teluki. (Lih. Ajip Rosidi, 2011).

Di samping itu, penggantian nama-nama jalan yang sudah ternama dalam ingatan masyarakat masa sulit menerima penggantian kata-kata baru. Hal ini disebabkan nama jalan lama itu membekas dalam ingatan kolektif masyarakat. Hal ini membuktikan betapa sulitnya sebuah kata disosialkan ke ruang publik dan memakan waktu bertahun-tahun. Sama halnya penggantian kata 'efektif' dengan 'sangkil' serta 'efisien' dengan 'mangkus' tidak berterima oleh publik pemakai bahasa. Barangkali kedengaran lucu apabila ada kalimat yang menyatakan, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia secara sangkil supaya hasilnya, mangkus! Bahasanya benar tetapi belum tentu komunikasi dalam lalu-lintas berbicara.

Seorang teman (Ikhwan, 17 September 2013) menambah isi tulisan ini betapa dia kecewa dengan pemakaian nama pada bandara KNIA. Manakah yang benar penulisannya? Kualanamu atau Kuala Namu? Beliau menegaskan kata itu seharusnya ditulis secara terpisah dengan mengambil contoh Kuala Lumpur, Kuala Kangsar, Kuala Perlis, Kuala Begumit. Kemudian pencitraan bandara 'asal-asalan' karena baliho besar yang menempal dinding didominasi bangunan baru yang tidak memiliki historis atau menjadi cagar budaya. Kita masih menerima bangunan rumah Chong A Fie karena menjadi cagar budaya di kota Medan. Bangunan arsitektur Istana Maimon dan masjid Raya Al Mansun Medan. Namun, kita bisa menolak bangunan lain yang sejarah berdirinya belum sampai 50 tahun. Bandara Kuala Namu diperkaya ragam hias Melayu (kawasan Kuala Namu termasuk kekuasaan Sultan Serdang pada abad yang lalu).

Kemudian ornamen China pigura Kesawan ditampilkan bangunan arsitektuer China cremation tanpa jenazah di samping Titi Gantung. Pengamatan sejarah itu merasa aneh karena alasan pemajangan itu tidak jelas dasar dan kriteria yang dipakai. Oleh

karena bangunan yang dianggap 'bersejarah' itu baru 4-5 tahun dibangun.

Sekali lagi para pemangku kebijakan dan aparat formal bersama tokoh-tokoh sejarah dan ahli bahasa perlu menelaah dan menilai penabalan nama-nama jalan termasuk gambar-gambar bernilai sejarah agar tidak menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagi generasi muda di kemudian hari. Semoga!

Bahasa dan Kekuatan Pasar

Benarkah perang dunia keempat telah pecah? Kapan perang dunia ketiga terjadi? Pertanyaan ini muncul ketika kita membaca sebuah buku yang bernada provokatif yakni “kata adalah senjata”. Sebuah buku yang dikarang Marcos tentang pemberontakan Zapatista di Meksiko Tenggara tahun 1994 ketika diberlakukannya zona perdagangan bebas Amerika Utara. Nama Zapatista sendiri yang bermakna “Pengikut Zapata” merupakan gerakan dan Emiliono Zapata, mencetuskan reformasi agrarian/dunia pertanian tahun 1991.

Gerakan Zapatista ini cukup menegangkan orang. Mereka mengangkat senjata bukan untuk memaksakan programnya sendiri, tapi menciptakan sebuah ruang demokratis, ketika pertentangan antarpandangan politik yang berbeda-beda bisa di pecahkan. Zapatista tidak berniat merebut kekuasaan.

Mereka menjaga jarak dengan gerilyawan Amerika Latin, karena sikap dan perbedaan dalam cara merebut kekuasaan. Berbeda dengan gerilyawan lain yang mendatangi penduduk udik/ terbelakang untuk ‘mengajari’ mereka. Namun, para perintis. Zapatista sadar mereka justru harus ‘belajar’ dari masyarakat udik.

Dengan berbasiskan penduduk adat India, gerakan Zapatista sadar akan paradoksnya sendiri: mereka mengatasmakan “minoritas rakyat”, bukan “mayoritas rakyat” sebagaimana restorika revolusinya klasik.

Mereka berjuang demi sebuah dunia yang adil terhadap kaum minoritas apapun, sebuah dunia yang bisa memberi tempat segala perbedaan. Sebuah dunia yang menampung segala yang kecil, remeh, tak dihiraukan. Seperti ditulis Marcos “sebuah dunia yang mementingkan dialog dan kesepakatan”.

Pesona gerakan Zapatista tak terlepas dari kharisma Marcos. Komunikasi politik yang disebarakan bukanlah komunike politik yang lazimnya penuh jargon muluk. Marcos memadukan politik dengan sastra dalam gaya yang belum ada bandingnya. Marcos banyak memetik inspirasi dari pujangga Shakespeare dibandingkan Lenin/pemimpin Rusia.

Pada buku tersebut, diceritakan ketika Marcos bergabung dengan pasukan geriliya di pegunungan Chiapas pada ranselnya bukan amunisi yang tersimpan melainkan tumpukan novel dan puisi para begawan sastra Amerika Latin.

Octavio Paz, sastrawan Meksiko pemenang hadiah nobel sastra, mengakui kedahsyatan prosa Marcos yang hidup dan imajinatif dan dengan mudah memenangkan perang opini. Zapatista justru mencita-citakan sebuah negara bangsa yang masih berfungsi selayaknya negara bangsa. Mereka sadar, ‘tiadanya negara bangsa justru merupakan puncak neoliberalisme untuk bisa melebarkan tanganya dalam bentuk imperialisme ke penjuru dunia. Menampik negara bangsa mentah-mentah berarti menampik proses politik dalam hidup keseharian.

Penolakan atas kelas politik bukanlah penolakan untuk berpolitik tapi penolakan alas cara mereka berpolitik. Seorang rekannya pernah mengeluarkan selemba bendera nasional Meksiko dan berkata, Demi bendera inilah kami menjadi tentara. Bendera, UUD, lagu kebangsaan pahlawan-pahlawan nasional; hal-hal yang sering dianggap usang inilah yang memberi jiwa gerakan Zapatista.

Bila gerakan Sandinista pada tahun 80-an hanya mampu menginspirasi kelompok musik, sosial dan kesenian, Zapatista bahkan bisa menggerakkan klub sepakbola sekaliber Inter Milan untuk turut menyumbang 5.000 Euro bagi desa-desa otonom Chiapas. Pawai monumental Zapatista menuju Meksiko City diibaratkan kemenangan akar rumput yang bertujuan mencari dukungan masyarakat sipil untuk meloloskan RUU hak dari budaya masyarakat adat.

Perang Dunia Keempat

Marcos menulis bahwa perang dunia ketiga berlangsung sejak 1946 sampai (1985-1990). Inilah perang dunia besar yang terdiri atas banyak perang lokal. Sebagaimana dalam semua perang, pada akhirnya terjadi penaklukan wilayah dan penghancuran musuh. Para aktor perang dunia ini ada dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pemberi watak perang ini adalah orientasi persenjataan dan perang-perang lokal.

Dalam perang nuklir, dua adikuasa ini bersaing guna melihat berapa kali mereka bisa menghancurkan dunia. Metode untuk meyakinkan lawan dengan menghadapkannya pada kekuasaan yang sangat besar. Pada saat yang sama, perang lokal berlangsung di mana-mana dan negara adikuasa tetap terlibat.

Hasilnya, kalah dan hancurnya Uni Soviet, serta menangnya Amerika. Saat itulah, demikian kata Marcos, apa yang dinamakan Perang Dunia Keempat pecah. Hasil dari perang sebelumnya mestinya sebuah dunia uniporal-satu negara tunggal yang mendominasi tanpa pesaing.

Guna membuat efektif, dunia uniporal, mereka harus mencapai apa yang dikenal sebagai globalisasi. Dunia harus dipahami sebagai wilayah taklukan luas dengan musuh yang terhancurkan. Maka mereka pun berpaling pada teknologi informasi. Komputer membolehkan orang berada di mana-mana secara simultan. Tak ada lagi batas atau keangan ruang dan waktu. Berkat komputerlah proses globalisasi dimulai.

Pemisahan, perbedaan negara-negara bangsa seluruhnya runtuh dan dunia menjadi apa yang secara realitas dinamai kampung global. Perang dunia keempat menghancurkan umat manusia sekaligus globalisasi menguniversalkan pasar. Segala sesuatu yang manusiawi dan menentang logika pasar adalah musuh dan harus dihancurkan.

Apa masalah utama yang dihadapi dunia uniporal ini dalam mengglobalisasikan dirinya sendiri? Jawabnya negara-negara bangsa, budaya, dan tiap-tiap cara kekerabatan sebuah bangsa dan apa-apa yang membuatnya berbeda harus dihancurkan. Ini berarti bukan menyingkirkan rakyat, tapi menyingkirkan cara keberadaan rakyat. Segala sesuatunya diputuskan oleh hukum pasar.

Rintangan pertama adalah negara bangsa; mereka harus digempur dan dihancurkan. Segala sesuatu yang membuat negara itu berbangsa harus dihancurkan. Seperti bahasa, budaya, ekonomi, kehidupan politik dan jaringan sosialnya. Bila bahasa-bahasa nasional tidak lagi terpakai, mereka harus dihancurkan dan sebuah bahasa baru harus digencarkan. Bahasa itu bukanlah Inggris, tapi komputer.

Semua aspek kultural yang membuat orang Perancis jadi Perancis, seorang Meksiko jadi Meksiko harus dihancurkan, karena merekalah penghalang yang mencegahnya memasuki pasar global. Harus ada satu pasar tunggal, ketika orang yang sama bisa mengkomsumsi produk yang sama di tempat manapun di dunia, dan orang yang sama ini bertindak tak ubahnya warga dunia, bukan lagi warga negara bangsa.

Individu menjadi begitu kabur sampai-sampai gambaran mengenai pahlawan hari kemarin tidak sanggup menawarkan harapan paling minim untuk bertahan. Manusia mandiri. Tidak lagi eksis dan melihat, meski kiranya untuk bicara mengenai korporasi mandiri. Bagaimana rumah keluarga?

Bila televisi masuk ibarat ratu lewat pintu depan. Internet membajak jalannya lewat celah ruang maya. Nyaris setiap saat rumah di planet ini diinvasi oleh pasukan Inggris dan Amerika yang menduduki Irak. Tentang pahlawan, Marcos menyindir secara tajam dengan gaya retorik.

Di mana para pahlawan invasi Afganistan? Di mana pahlawan penduduk Irak? Dimaksud Marcos adalah bahwa 11 September 2001 punya para pahlawannya, yakni pemadam kebakaran dan warga New York yang bekerja menyelamatkan para korban.

Pahlawan-pahlawan sejati itu tidak berguna bagi kekuasaan, itu sebabnya mereka dengan cepat dilupakan. Bagi kekuasaan, sang pahlawan adalah dia yang menaklukan (artinya menghancurkan), bukan dia yang menyelamatkan (artinya mencipta). Gambar petugas pemadam kebakaran berselimut abu, bekerja di tengah puing-puing kembar New York, digantikan oleh tank yang menumbangkan patung Sadam Hussein di Baghdad.

Dunia Ciapas adalah masyarakat adat, orang jompo, waris dan pemulung – *sebuah dunia yang tidak bersandar pada logika* yakni yang besar menang yang kecil kalah melainkan sebuah dunia yang mementingkan dialog dan kesepakatan.*

Bahasa dan Metafora Kecantikan

Selama dua minggu ini surat kabar terbitan Indonesia sangat antusias dan bergairah menampilkan pembicaraan tentang kontes kecantikan wanita sejadat (*miss world*) di Bali Indonesia. *Syahdan*, dimulailah perang kata-kata dan pedebatan seru baik dari pihak yang kontra maupun dari pihak yang pro atas penyelenggaraan tersebut. Namun, pihak panitia sepertinya bersikukuh dan tetap menyelenggarakan dan menyiarkannya secara langsung melalui stasiun televisi tertentu sebagai sponsor acara.

Pada tahap prakontes pemirsa dapat menyaksikan berbagai kegiatan kunjungan peserta ke beberapa lokasi tertentu yang sudah disiapkan panitia. Mulai dari kunjungan ke daerah tujuan wisata sampai ke lokasi pusat kuliner, sanggar kesenian dan juga berolahraga atau berolahragab di pantai Bali.

Satu hal yang menarik, bahwa kecantikan telah menjadi mitos yang tertanam dalam diri manusia Indonesia sejak ia belajar bahasa Indonesia di sekolah. Ketika sang guru bahasa Indonesia menyampaikan pelajaran sastra Indonesia dalam hikayat *Sabai Nan Aluih* maka dimulailah pemitosan kecantikan wanita sebagai kecantikan unggul dan terhormat di mata anak-anak sekolah. Hikayat itu berdasarkan cerita *Kaba Sabai nan Aluih* yang hidup pada masyarakat Minangkabau.

M. Rasyid Manggis (1928) melukiskan paras kecantikan *Sabai Nan Aluih* yang tinggal di Gadang Babandiang. Gadis ini diberi julukan *nan aluih* karena paras kecantikannya dan halus budi bahasanya. Pengarang melukiskannya dalam beberapa prosa liris '*rupanya kuniang kemerah-merahan-bak tabu di dalam lalang - bak udang kepalang panggang, rambuik karitiang gulung tigo-talingonya jarek tatahan - mato nan bagai bintang timur - bulu mata samuik bairing - hiduang nan bagai dausun tungga - daguaknyo awan tagantuang - pipinyo pauah dilayang- bibianyو limau sauleh - lidah nan baga mampalam masa - kaniangnyo kiliran taji - batihnya bagai paruik padi - tumik nyo bagai taluah buruang, induk kaki bangka satahi - langkahnyo siganjau hulua dari pai suruik nan labiah - bagai dilikuis digambarkan.*

Pada galibnya pembaca kisah kecantikan *Sabai Nan Aluih* tidak berhenti di terminal kelas. Kisah itu berkelanjut dalam impian dan dibawa ke dalam ingatan dan impian seseorang anak setelah ia meninggalkan kelas dan bahkan hidup menjadi orang dewasa.

Timbullah mutitafsir tentang mitos kecantikan wanita dalam masyarakat. Seperti apa kiranya ukuran yang dipakai untuk mencari model kecantikan hikayat itu dalam realitas manusia modern. Bagaimana ukuran universal yang bisa menyatukan persepsi tentang 'kecantikan dan keindahan semua bangsa'. Apakah ukuran *Sabai Nan Aluih* yang bisa dinormatiskan secara objektif meskipun secara relatif dapat diperbincangkan dari sudut nilai dan norma serta agama.

Kembali kepada *Miss World*, penulis terkejut dan terpesona menonton televisi swasta ternyata ada *Sabai nan Aluih* di pentas *catwalk* berjalan berlembang-lembok dengan pakaian adat Minangbakau. Gambaran kecantikannya yang diceritakan tukang *kaba* dalam sastra klasik Indonesia itu menjelma dalam wajah kontestan yang berasal dari manca negara. Pada akhirnya kalaupun ada perdebatan yang muncul tentang kontes *Miss Wold* tidak terlepas dari andil guru-guru bahasa Indonesia yang berhasil menyihir dan mensugesti murid-muridnya di kelas tentang kecantikan sebagai mitos.

Barangkali di antara murid-murid masa lalu dan kini dapat menyatu dalam persepsi tentang kecantikan sebagai anugerah Tuhan. Imam al-Ghazali pernah mengaitkan keindahan dengan Tuhan berdasarkan pendapatnya pada hadist Nabi Muhammad SAW, Tuhan itu indah dan ia menyukai keindahan'. Betapapun al Ghazali

menghargai keindahan sebagai anugerah Tuhan ia masih berpesan bahwa, 'jika manusia menghabiskan modal hidupnya, ia tidak dapat mencapai istana kebahagiaan dalam keindahan dunia rohaninya.

Metafora Tubuh

Pertanyaan pun muncul, apakah metafora kecantikan *Sabai Nan Aluih* memang dihubungkan dengan sifat flora dan fauna dalam lingkungan alami? Pada tataran sastra, jenis hewan dan tumbuhan diangkat oleh si tukang *kaba* (pelipur lara) sebagai pilihan untuk melukiskan kecantikan manusia.

Metafora adalah dua objek yang dibandingkan. Dalam metafora / perumpamaan terjadi secara eksplisit dalam ucapan 'rumahku' melindungi aku sebagai sebuah benteng, rumah dibandingkan dengan sebuah benteng. Benteng disebut pembanding, sedangkan unsur rumah termasuk unsur yang dibandingkan kata 'bagaikan'; berfungsi sebagai mata rantai antara pembanding dan apa yang dibandingkan. (Luxemburg, 184).

Selanjutnya metafora kecantikan tersebut dipecah dalam unsur planet (matanya sebagai bintang Timur), unsur fauna (alis bagai semut beriring), unsur flora (hidung ibarat medasun tunggal. Pipi bagai pauh/mangga dilayang, paras bagai bujur sirih, lidah bagai mempelam masak, bibir delima merekah, telinga telepok layu, betis bagai perut padi, rambut bagai keriting gulung tiga/mayang terurai).

Berbeda dalam wilayah linguistik (ilmu bahasa), pembicara kecantikan dalam wajah *Sabai nan Aluih* bukanlah persoalan keindahan akan tetapi persoalan objektivitas dan pembendaaan atau pengukuran yang rasional.

Ilmu bahasa yang mengacu pada sains akan tetap bersikukuh dengan ciri yang objek dan mengacu pada teks. Ukuran kecantikan *Sabai nan Aluih* yang dilukiskan dengan pelukisan perbandingan ini sebenarnya dapat diukur secara normatif dalam kajian linguistik. Semut beriring dengan alis dapat diukur apakah pada ketebalan alis, penjumlahan iringan semut, atau kewarnaannya, bentuk tempat lebah dan membandingkannya dengan tingkat lengkung dagu atau pipi yang dibandingkan dengan sayatan mangga (pauh; kata Melayu).

Dengan merujuk pendekatan linguistik para linguis berpendapat tataran wilayah linguistik yang dibicarakan bukanlah pada aspek 'keindahan' tetapi pada aspek keobjektifannya. Oleh karena metafora lebih banyak dibicarakan dalam sastra berhikayat

mau tidak mau kita tetap memperlakukannya sebagai sebuah karya imajinatif yang sarat dengan impian dan fantasi seseorang pencerita/pelipur lara. Kaidah metafora kecantikan selalu dikaitkan dengan kecantikan yang nyata sering dikaitkan dengan kecantikan seorang wanita yang khususnya kecantikan jasmani yang terlalu sementara sifatnya dan mudah sirna.

Dalam hal ini tak dapat dinafikan seluruh perasaan erotik tidak bisa dipisahkan dari aspek tubuh. Seandainya pun dia harus berbicara tentang suatu bagian tubuh ketika secara rinci, hal ini dilakukan dengan tetap mempertahankan bentuk metaforis yang kuat yang tidak membelengu pembaca pada tubuh sebagai tubuh tetapi pada tubuh sebagai pesan. Tubuh yang memancarkan nuansa erotik menimbulkan perdebatan antara pihak yang menolak kontes *Miss World* yang mempertontonkan 'tubuh' atau 'aurat' yang dilarang dalam kaidah agama Islam.

Penulis pernah membaca sebuah puisi yang ditulis penyair Muttanabi yang mengumpamakan cinta dan cemburu hamba-hamba yang luar biasa besar kepada Allah. Hamba-hamba ini menjubahi diri mereka seperti wanita-wanita cantik. Muttanabi menulis, 'Mereka mengenakan jilbab-jilbab yang indah/bukan untuk mempercantik/tetapi untuk mengamankan kecantikan mereka/dari mata-mata yang nakal.

Metafora kecantikan yang terpancar dalam mitos hikayat *Sabai nan Aluih* kini menjadi realitas yang aktual. Ketika mitos kecantikan menjadi komoditas dan politik pencitraan yang sangat cerdas dalam membangun minat dan perhatian pemirsa serta pembaca melalui kekuatan media.*

Politik dan Undang-Undang Bahasa

Pengaturan masalah kebahasaan yang kompleks ini perlu didasarkan pada kehendak politik yang mantap. Istilah politik ibu nasional digulirkan pertama kali oleh Slamet Muljana (16 Mei 1959). Hal ini bertolak belakang dari pemaparan atas kegagalan politik bahasa kolonial penjajah Belanda dan sekaligus membahas aspek umum dan khusus tentang persoalan bahasa dalam alam kemerdekaan Indonesia. Pada konteks memperingati setiap HUT Sumpah Pemuda persoalan dan cara pemecahan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks masanya tetap muncul yang ditandai pada setiap kongres bahasa Indonesia dari Kongres 1 tahun 1939 sampai kini.

Hal yang menarik untuk diketahui bahwa pertemuan semacam kongres bahasa Indonesia bukan digagasi oleh ahli bahasa atau sastrawan melainkan oleh praktis bahasa, yakni wartawan Soemanang dan Soedardjo Tjokrosisworo (Risalah Kongres BI, 2003; 40).

Kongres BI 1939 di Solo bertujuan dan memutuskan hal yang menyangkut penggunaan dalam hal-hal praktis dan pembinaan bahasa Indonesia di masa depan. Setelah kegiatan diambilalih pemerintah, yakni sejak Kongres Bahasa Indonesia II (1954 di Medan), beberapa faktor baru muncul. Yang menonjol di antaranya ialah pembahasan tentang fungsi bahasa daerah, pemakaian bahasa asing, peranan sastra Indonesia dalam dunia pendidikan.

Situasi Kebahasaan Kini

Pada waktu bahasa Melayu diresmikan menjadi bahasa persatuan dan diberi nama bahasa Indonesia, para pencetus Sumpah Pemuda tidak memperhatikan bahasa Melayu jenis apa yang akan digunakan (mengingat begitu beragamnya bahasa Melayu). Dalam Kongres BI pertama itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa bahasa Indonesia didasarkan atas bahasa Melayu Riau yang sudah disesuaikan dengan alam baru Indonesia merdeka.

Sebagai bahasa yang tumbuh secara alamiah, selain mempunyai fungsi komunikasi interpersonal dan fungsi-fungsi lain, bahasa Indonesia memperoleh dua “beban” tambahan, yakni pertama bahasa itu menjadi sarana untuk memandang alam sekitarnya; dan kedua, bahasa itu menjadi objek dua kekuatan yakni sebagai sarana dan kedua, berusaha mengubah keanekaragaman menjadi keseragaman tanpa harus mematikan kreativitas dan kehangatan manusia berbahasa. Untuk itu pembakuan bahasa atau standardisasi bahasa diperlukan untuk menyeimbangkan kedua kekuatan itu.

Pembakuan bahasa bukan dimaksudkan untuk mencapai keseragaman bahasa, melainkan untuk memantapkan berbagai ragam (satu diantaranya adalah ragam baku disertai unsur-unsur bahasa sebagai pengungkapannya, mulai dari lafal dan ejaan sampai ke wacana).

Sejarah perkembangan bahasa Indonesia sejak awal pertumbuhannya banyak menyerap unsur bahasa lain, seperti Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda dan dewasa ini bahasa Inggris. Proses penyerapan masa lalu berlangsung secara spontan berdasarkan citra rasa orang seorang. Kini, zaman menuntut perencanaan dengan demikian pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara berencana. Karena itu, dalam menentukan dasar dan arah kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan bahasa, faktor-faktor yang mempengaruhi laju dan gerak perubahan masyarakat dan bangsa harus benar-benar dipertimbangkan.

Prof. DP. Tampubolon (1996) menyatakan bahwa pengembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21 mempunyai empat kecenderungan yaitu keterbukaan, rasionalitas, percaya diri, kecepatan dan keserataan informasi. Menurut beliau, akibat pengaruh mendasar itu bahasa Indonesia akan berkembang ke arah spesialisasi, simplikasi, dan efektuasi. Spesialisasi bahasa Indonesia

mencerminkan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Spesialisasi sejalan dengan tuntutan profesionalisme yaitu adanya keahlian dan keterampilan yang sedang dan akan berlangsung di masyarakat. Timbulnya spesialisasi ini tidak terlepas dari keterbukaan dan rasionalisme. Kesibukan dan kedewasaan serta keseratan informasi membuat orang tak sempat lagi mengolah bahasa secara berbasa-basi. Orang memerlukan bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Kederasaan informasi dan keseratan komunikasi menimbulkan aspek akibat yang berkaitan dengan 'kehilangan wacana kultural'.

Artinya peran peribahasa dan pepatah yang menjadi bumbu penyedap dalam bahasa menjadi terkikis hilang. Motto warisan lokal yang turun temurun dalam khazanah bahasa Indonesia sudah jarang ditemukan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya, 'sekali layar terkembang surut kita berpantang', ke lurah sama menurun, 'ke bukit sama mendaki', terbujur lalu terbelintang patah', tidak banyak lagi menjadi hiasan kultural dalam berbicara dan berbahasa. Kata-kata modern akibat tuntutan masa kini membuat orang lelah spontan menyebutkan mangrove daripada hutan bakau, lebih bergengsi mengatakan ular piton daripada ular sawah.

Pengaturan masalah kebahasaan yang kompleks ini perlu didasarkan pada kehendak politik yang mantap. Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warganegara yang secara jelas strategis dalam bidang kebahasaan. Pasal 36 UUD 1945 berikut penjelasannya, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan landasan konstitusional yang kukuh dan sekaligus sebagai pernyataan kehendak politik yang kuat dalam bidang kebahasaan.

Pada keputusan Kongres BI (28 Oktober- 1 November 2008) ada disebutkan dalam era teknologi informasi dan komunikasi ini setiap bangsa berupaya keras untuk mempertahankan identitasnya. Identitas itu terancam oleh proses homogenisasi budaya yang dipicu oleh keberhasilan industri budaya dari negara-negara lain.

Untuk mengawal mempertahankan budaya bangsa, pemerintah RI telah mengeluarkan undang-undang bahasa (nomor 24 tahun 2009). Ketentuan itu telah dituangkan pada Bab II (bahasa negara) yang memuat pasal-pasal dalam jumlah 21 pasal Undang-undang

Bahasa (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2009).

Pada ayat (2) ada tiga kata kunci yang perlu menjadi pemahaman bersama, yakni pertama, 'pengembangan bahasa' yang berkaitan dengan pemerayaan kosa kata, pembakuan sistem bahasa, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kedua, 'pembinaan bahasa' yang berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa pada jenjang pendidikan serta permasyarakatan bahasa. Ketiga 'perlindungan bahasa' yang berkaitan dengan upaya menjaga, memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Bahasa Indonesia Era Pasar Bebas

Perang informasi itu sebenarnya telah terjadi di berbagai belahan dunia ini. Marcos (2005) seorang penulis Meksiko menyebutkan dengan "Perang Dunia Keempat". Perang ini ditafsirkan sebagai wilayah taklukan luas dengan sebuah musuh yang terhancurkan, suatu dunia unipolar yang dikenal sebagai globalisasi. Penting kiranya untuk mengatur dunia baru ini, dan karenanya mengglobalkannya. Mereka pun berpaling pada teknologi informasi yang dalam perkembangan umat manusia sama pentingnya seperti penciptaan mesin uap. Komputer membolehkan orang berada di mana-mana secara simultan. Berkat komputerlah proses globalisasi dimulai.

Konsep yang mendasari globalisasi adalah apa yang disebut "koliberalisme". Dengan Perang Dunia Keempat ini, sekali lagi wilayah taklukan dikelola dan direorganisasi berdasarkan hukum pasar. Segala sesuatu yang manusiawi dan menentang hukum pasar adalah musuh dan harus dihancurkan termasuk bahasa, kaum adat, guru, cendekiawan, ekonomi, budaya dan jaringan sosial.

Memperingati 80 tahun bahasa Indonesia (28 Oktober 2008) kita perlu melihatnya dari kacamata nasional, identitas kultural dan sikap berbahasa secara rasional.

Hukum pasar menyatakan bila bahasa-bahasa nasional tidak lagi terpakai, mereka harus dihancurkan, dan sebuah bahasa baru harus dikumandangkan. Bahasa itu, bukanlah bahasa Inggris, tetapi

komputer. Semua bahasa harus dibuat sama, diterjemahkan ke dalam bahasa komputer bahkan bahasa Inggris. semua aspek kultural yang membuat seorang Perancis menjadi Perancis, seorang Italia menjadi Italia, seorang Meksiko menjadi reksiko, harus dihancurkan karena merekalah penghalang yang mencegahnya memasuki pasar global. Marcos menambahkan, harus ada satu pasar tunggal, ketika orang yang sama bisa mengkonsumsi produk yang sama di tempat manapun di dunia, dan di mana orang yang sama ini bertindak layaknya warga dunia, bukan lagi warga Negara-Bangsa'.

Tulisan ini tidak akan turut campur terlalu jauh dalam asi di atas, akan tetapi menjurus dampak era pasar bebas tadi dalam sikap berbahasa orang Indonesia dewasa ini.

Dampak yang paling terasa dalam lalu lintas informasi ini dapat ditemukan dalam dunia hotel, iklan-iklan reklame yang menghiasi langit kota-kota besar.

Penggunaan bahasa media luar ruang sekaligus mempertontonkan sikap dan perilaku orang berbahasa. Penggunaan papan nama, papan petunjuk, kain rentang bercampur aduk antara kata asing dengan bahasa Indonesia.

Sebuah tulisan yang menarik dan menggelikan diturunkan di bawah ini. "Ketika saya dan istri menginap di *Soul Pardiso Hotel* rasanya nikmat sekali. Sebelum makan malam saya berenang dulu di *Full Indoor Swimming Pool*. Istri saya segera ke *Beauty Care Centre*. Setelah mengendurkan dan merawat otot-ototnya di *Health & Fitness Centre*. Kemudian baru kami ke *restaurant Canton Barbeque & Noodle House*. Sebenarnya saya ingin juga pergi ke *Satay House*" (Lukman Ali, 1996).

Bayangkan, betapa banyaknya kata-kata asing dicomot di sana-sini tanpa menerjemahkannya dengan kata dan istilah Indonesia.

Peran hotel yang melayani banyak tamu mancanegara, dengan sendirinya komunikasi dengan bahasa asing memang perlu. Untuk itu dianjurkan agar bahasa asing yang dipandang perlu itu, ditempatkan di bawah bahasa Indonesia.

Pada peristiwa lain banyak ditemukan penyimpangan pemakaian bahasa Indonesia di sekolah-sekolah tinggi bermatra modern dan bergengsi asing. Tidak percaya, cobalah mampir ke berbagai sekolah tinggi yang ada di kota Medan. Pada anjungan kampus terbaca secara mencolok kata-kata asing tanpa diiringi kata-kata Indonesia. Ada papan plakat yang mencantumkan bahasa asing

(Mandarin dan Inggris) tanpa kehadiran Indonesia. Sudah separah itukah kelunturan jati diri kita sebagai orang Indonesia yang mengaku warga negara Indonesia? Ini bukanlah masalah kelenturan (fleksibel) berbahasa tapi kelunturan (erosi) jati diri berbahasa.

Sebagian besar perbendaharaan kata yang terdapat pada awal abad ke-20 sudah luput dari kelengkapan bahasa generasi muda. Mereka tidak tahu lagi kata "gergasi", "untung", "dagang" dan lebih spontan mengucapkan "mangrove" dari "hutan bakau", lebih canggih mengatakan "ular piton" dari "ular sawah". Tradisi bahasa Melayu makin lama makin terasing.

Memang pertumbuhan dan perkembangan bahasa bersifat alamiah. Akibat kontak budaya antarbangsa sehingga pengaruh bahasa lain masuk ke dalam bahasa nasional. Kontak budaya dan bahasa ini tak dapat dihindarkan. Ibarat bunga karang, bahasa Melayu sejak awal tarikh Masehi telah menyerap banyak unsur bahasa asing yang membuat bahasa itu lebih lengkap dan lebih kaya. Namun, ada perbedaan yang mencolok di antara proses penyerapan itu. Masa dahulu, penyerapan itu berlangsung secara spontan berdasarkan cita rasa perseorangan. Kini, penyerapan itu harus kita rencanakan. Penyerapan itu bertolak pada dua gagasan. Pertama, harus ada kesinambungan antara hakikat bahasa dulu dan sekarang. Artinya bahasa nasional jangan kehilangan jati dirinya. Kedua, penyerapan unsur bahasa asing harus mempertajam daya ungkap pemakai bahasa Indonesia, dan orang dapat menyampaikan isi hatinya dengan tepat dan cermat. Jadi, penyerapan itu haruslah bersifat selektif.

Sebagai contoh konsep *condominium* tidak terdapat dalam budaya Indonesia. Hal itu dapat diserap dengan penyesuaian ejaannya menjadi *kondominium*. Demikian juga kosesi, staf, golf, manajemen dan dokumen diserap dengan cara yang sama.

Namun, *laundry* tidak perlu diserap karena sudah ada *binatu* dan *dobi*; *tower* tidak perlu karena dapat dipakai menara atau mercu.

Kongres Bahasa

Kongres Bahasa Indonesia IX mengangkat tema "Bahasa Indonesia Membentuk Insan Indonesia Cerdas, Kompetitif di atas Peradaban Bangsa" perlu ditindak lanjuti dengan sejumlah agenda aksi bukan sekedar agenda wacana. Jauh sebelum konres ini bakal diselenggarakan pihak Pusat Bahasa Depdiknas telah melakukan terobosan dan konsep untuk melahirkan sebuah RUU Bahasa Agenda

RUU Bahasa itu memang patut dan perlu. Namun, kita merasa pesimis apakah RUU Bahasa itu dapat direalisasikan dalam UU Bahasa. Alasan ini masuk akal oleh karena RUU pornografi yang ingin menyelamatkan generasi bangsa ini pun masih terkatung-katung dan melibatkan pihak pro dan kontra yang berkepanjangan.

Banyak sebenarnya UU di negeri ini tetapi sedikit dilaksanakan. Masalahnya terpulang pada sikap penggunaan, penerapan dan pemantapan pemakaian. Sebagaimana pada aspek ketiga Sumpah Pemuda “Menjunjung bahasa persatuan satu bahasa Indonesia” menyiratkan maksud menggunakannya secara baik dan benar dalam sikap dan perilaku orang Indonesia.

Menertibkan Bahasa Asing di Tempat Umum

Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang dicanangkan Presiden Soeharto 20 Mei 1995 mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kepala Negara pada saat itu menegaskan bahwa menggunakan bahasa Indonesia secara tertib merupakan pencerminan cara berpikir tertib yang pada gilirannya merupakan landasan yang kuat bagi cara bertindak yang tertib pula. Berpikir dan bertindak secara tertib inilah yang harus selalu menjiwai dan menyemangati kita dalam melaksanakan Gerakan Disiplin Nasional dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah hampir satu tahun ajakan Kepala Negara untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dilaksanakan, ada satu dua daerah yang telah mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Sebagian besar daerah lainnya masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri kembali mengingatkan para Gubernur, bupati dan wali kota untuk melaksanakan dan makin menggiatkan gerakan penertiban penggunaan bahasa asing di tempat umum.

Pertimbangan hukum dalam pedoman pemakaian bahasa Indonesia di tempat umum, khususnya dalam hal pengalihan nama dan kata asing, dilandasi hal-hal sebagai berikut:

1. UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 tentang bahasa negara.
2. Ketetapan MPR No. II, Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Instruksi Mendagri Nomor 20 tahun 1991 dan Instruksi Menteri P dan K. Nomor I tahun 1992.
5. Surat Mendagri tanggal 18 April 1995 kepada bupati dan walikota seluruh Indonesia tentang Gerakan Penertiban Penggunaan Bahasa Asing.

Tujuan yang bakal dicapai adalah pengindonesiaan nama dan kata asing yang merupakan satu upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia serta meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia sebagai modal pengukuran persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketentuan yang Dipedomani

Agar masyarakat tidak dibingungkan dengan gerakan penertiban bahasa asing ini, inaka di sini diturunkan beberapa ketentuan yang menjadi panduan penertiban penggunaan bahasa asing di tempat umum.

1. Papan nama adalah bidang, yang dapat terbuat dari berbagai bahan, yang berisi tulisan mengenai nama diri dengan atau tanpa keterangan lain, seperti jenis kegiatan/usaha dan alamat.
2. Papan petunjuk adalah bidang, yang dapat terbuat dari berbagai bahan, yang berisi pemberitahuan tentang hal tertentu, termasuk nama jalan dan rambu lain lintas.
3. Kain rentang adalah kain atau bahan sejenis yang direntangkan dan berisi pemberitahuan atau seruan tentang hal tertentu.
4. Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan lain yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan unruk memperkenalkan, memujikan, menganjurkan penggunaan barang atau jasa, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat, dibaca dan atau didengar oleh umum. Kemudian kata asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan merek dagang asing yang terdaftar atau mempunyai hak paten tetap dapat dipakai. Misalnya, Citibank, Goodyear, Kentucky Fried Chiken, Mitsubishi, Rodenstock.

Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan iklan, jika dianggap perlu, dapat dipakai bahasa asing yang harus dituliskan di bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin lebih kecil. Nama asing badan usaha, kawasan dan bangunan serta merek dagang yang diindonesiakan dapat disertakan di bawah nama Indonesianya selama masa tenggang. Penggunaan huruf bukan latin jika dianggap perlu, dapat dibenarkan sepanjang untuk nama/lambang produk yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bawah nama dalam bahasa Indonesia yang ditulis dengan huruf latin tetap dapat digunakan huruf bukan latin dan/atau bahasa asing untuk nama: organisasi internasional yang di bawah PBB, perwakilan diplomatik negara asing ; dan tempat ibadah dan lembaga keagamaan.

Di jalan raya di kota-kota banyak terpampang papan nama yang menggunakan kata-kata asing, bahkan di desa terpencil di pinggir gang becek pun terpampang papan nama yang menggunakan kata asing. Padahal, selama ini belum pernah seorang turis asing pun yang berkumpul ke tempat itu. Alasan penggunaannya mungkin sama, yakni ingin agar papan nama itu bergengsi, atau sekadar gagah-gagahan, yang belum tentu pemasangannya sendiri mengerti betul arti tulisan yang dipampangkannya.

Padahal, jika kita ingin raenggunakan bahasa Indonesia dengan baik, penggunaan kata-kata asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia tidak lagi perlu dipakai. Kata asing itu hanya digunakan jika memang betul-betul diperlukan dan belum terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya bukan 'sederhana taylor' tetap 'penjahit sederhana', bukan 'video rental' tetapi 'penyewaan video', bukan 'royal furniture' tetapi '(toko) mebel royal'.

Sejarah perkembangan bahasa Indonesia sejak awal pertumbuhannya banyak menyerap unsur bahasa lain, seperti Sansekarta, Arab, Portugis, BeJanda dan dewasa ini khususnya bahasa Inggris. Proses penyerapan pada masa lalu berlangsung secara spontan berdasarkan cita rasa orang seorang. Kini, zaman perencanaan dan pembangunan, dengan demikian pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara berencana. Penyerapan unsur bahasa asing harus selektif untuk mempeitajam daya ungap pemakai bahasa Indonesia

Bahasa Jurnalistik Indonesia

Tidaklah mudah membicarakan ragam bahasa jurnalistik Indonesia, mengingat istilah tersebut bukan hanya menyangkut "surat kabar" dan "majalah" bahkan jurnalistik elektronik seperti radio dan televisi termasuk di dalamnya.

Menurut pengamatan para ahli bahasa, perbedaan yang menonjol dalam aneka ragam penggunaan bahasa dalam tiap-tiap rubrik seperti ragam bahasa tajuk rencana, ragam reportase, ragam bahasa pojok, bukanlah pada penerapan kaidah atau bahasa, melainkan pada gaya bahasanya, pemilihan dan penataan kata serta pada struktur kalimatnya. Penulis berita, dan gaya bahasa yang dipakai selalu berubah-ubah, sesuai dengan pokok pembicaraan, perasaan, dan sasaran.

Sifat Khas

Sifat-sifat khas dalam ragam bahasa jurnalistik haruslah berdasarkan bahasa Indonesia baku: berasio, bersistem dan beretika. Rosihan Anwar pernah menyatakan bahwa bahasa dalam berita pers harus mampu melaksanakan tugas utamanya yakni menyampaikan pesan atau informasi dengan cepat, jelas, singkat, lancar dan menarik, sehingga mudah dipahami dan ditanggapi oleh pembaca dan pendengarnya.

Ciri pertama ragam bahasa pers ialah "singkat". Bahasa yang singkat dan padat tentu saja harus menghindarkan pemakaian kata-kata yang mubazir. Andai kata kosa kata dimisalkan daging dan struktur kalimat diibaratkan rangka manusia, maka kosa kata yang terlalu banyak dan struktur yang sedikit, tak ubahnya melihat orang gemuk pendek. Demikian juga sebaliknya kalau kosa kata terlalu miskin dan struktur kalimat sudah memadai maka diibaratkan orang yang kurus tinggi.

Media massa dewasa ini telah menjadi industri berita yang setiap sentimeter halamannya dan jumlah kata-katanya memiliki nilai uang tertentu. Hal ini harus disadari bahwa pers nasional sekarang ini menuju bahasa jurnalistik Indonesia yang lebih efisien. Dengan efisien, dimaksudkan lebih hemat dan jelas. Asas hemat ini penting buat setiap reporter, dan lebih penting lagi buat editor.

Alasan

Sebagai contoh dua kalimat diturunkan dari kalimat berita surat kabar.

1. Pendidikan telah berlangsung selama dua bulan yang dimulai pada tanggal 14 Juni 1991 dan akan berakhir nanti pada tanggal 14 Mei 1991 mendatang.
2. Laju inflasi bulan lalu 0,7%, sedang bulan Maret ini naik ke atas menjadi 1,5%.

Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal keterangan waktu, pastense (Inggris) seperti *is* menjadi *was* atau keterangan akan datang (*future tense*). Hal ini menimbulkan kecenderungan orang untuk menggunakan telah dan akan. Apabila hendak menghemat kata dan susunan kalimat, maka penggunaan "telah", "sedang", dan "akan" sebenarnya dapat dihapuskan, kalau keterangan waktunya jelas. Pemakaian kata "mendatang", pada kalimat (1), tidak perlu dipakai karena berita ini dimuat pada tanggal 18 Juni, maka tanggal 14 Juli itu pasti "mendatang". Pemakaian kata pada kalimat (2) "naik ke atas" termasuk bentuk pleonastis (gejala kata berlebihan), karena kalau naik pasti ke atas.

Demi mempertahankan sifat "singkat" dan "padat" tersebut sering pula dijumpai penghilangan kata-kata tugas yang kadang-kadang kurang dapat dipertanggungjawabkan secara tata bahasa. Kalimat judul berita "dipukul besi" dan "Hakim dilempar sepatu" tidak

mencerminkan kalimat yang berasio. Dapatkah besi memukul dan sepatu melempar hakim? Yang benar dipukul dengan besi oleh AY, dan dilempar dengan sepatu oleh Sipolan.

Ketegerasaan dalam menulis berita karena diburu waktu serta keterbatasan ruang karena sempitnya kolom tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar aturan tata bahasa.

Contoh Lain

Bentuk-bentuk kalimat seperti berikut ini bukanlah mencerminkan ciri ragam bahasa yang berasio dan bersistem:

1. Medali emas berhak diberikan kepada Henky Gun. (Medali tidak memiliki hak, yang berhak itu adalah Henky Gun).
2. Polisi berhasil menangkap Rp. 10.000 uang kertas palsu (bukan menangkap tetapi menyita).
3. Seluruh Jalan Kota Medan rawan banjir (judul berita). Benarkah pemakaian kata "seluruh"? Berapa buahkah jalan di kota Medan? Kalau hanya sebuah maka judul itu benar. Oleh karena menurut kenyataan jalan di kota Medan bukan hanya sebuah, melainkan beberapa buah, maka judul itu salah!

Seluruh tidak sama dengan semua. Perhatikanlah kalimat ini:

1. Seluruh dunia gempar oleh kematian Benazir Butto (benar)
2. Semua dunia gempar oleh kematian Benazir Butto Gandhi (tidak benar)

Kata **seluruh** hanya dipakai bila bendanya satu. Seluruh dipandang sebagai satu kesatuan. Kata **semua** dipakai bila dimaksudkan mencakup beberapa benda atau orang. Seperti contoh di bawah ini:

1. Semua anaknya sudah berumah tangga
2. Semua wartawan harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar.

Masa Depan

Pakar bahasa Amran Halim pernah mengatakan bahwa media massa membina masyarakat masa kini, sedangkan guru dan dosen membina masyarakat masa depan. Sumbangan media massa dalam perkembangan bahasa Indonesia tidak dapat dinafikan. Jika guru berdiri pada posisi konsumen bahasa, maka wartawan dan pengarang

berdiri sebagai produsen bahasa dan sekaligus konsumen bahasa yang setiap hari memungut kata-kata dan mempublikasikannya ke hadapan publik pembaca.

Pemakaian kata-kata yang populer yang dipetik dari dialek atau bahasa daerah merupakan asam ragam berita yang disajikan wartawan kepada pembaca. Sering dijumpai penggunaan kata-kata: buronan itu keburu ditangkap tekab, ketabrak mobil, diringkus, dijebloskan, dibalbal penduduk, pemimpin abal-abal dan lain-lain. Selama kecenderungan pemakaian kata-kata populer itu tidak melupakan nilai-nilai kesopanan agaknya tak perlu dicemaskan.

Bahasa Indonesia dalam perilaku sosial selalu diwarnai "bahasa daerah". Pewarnaan bahasa daerah ini jangan terlalu tebal seperti gincu di bibir seorang gadis. Andaikata warna bahasa daerah terlalu kental tak ubahnya warna gincu yang tebal, di bibir gadis sehingga kelihatannya seperti pemain lenong yang mau naik pentas.

Prof. Dr. Anton Moeliono pernah menyatakan, "Penutur bahasa harus menjadi sadar bahwa masalah di dalam pemodernan bahasa bukanlah soal keaslian atau kemurnian dan keasingan, melainkan soal ketatabahasaan di dalam sistem". Sistem bahasa yang tertib, berasio, dan memelihara nilai-nilai santun bahasa di dalam ragam jurnalistik Indonesia merupakan sumbangan yang amat berharga dalam pembinaan bahasa Indonesia.*

Tawar Menawar Dalam Kosa Kata

Dewasa ini dalam kosa kata modern masalah pemakaian istilah dan kata-kata baru tetap ramai dibicarakan orang. Sebagai bahasa yang terus berkembang dalam kehidupan modern, penggunaan kata baru terus muncul dalam khazanah bahasa Indonesia.

Hal itu dapat diyakini oleh karena Indonesia yang terletak di antara berbagai bangsa di dunia selalu menjadi tempat pertemuan berbagai bahasa. Bahasa kita sejak dulu sudah diperkaya dengan bahasa-bahasa pinjaman terutama bahasa asing seperti Arab, Cina, Belanda, dan Portugis.

Masalah besar yang dihadapi bahasa Indonesia adalah pengalihan konsep-konsep asing ke dalam bahasa Indonesia. Pemakaian istilah baru hanya diberi prioritas apabila:

- a) Istilah asing yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia
- b) Istilah itu sudah ada dalam berbagai sinonim.

Sebagai rincian dapat dijabarkan kedudukan istilah dalam bahasa Indonesia.

- 1) Istilah asing kita Indonesiakan dengan kata-kata Indonesia yang hidup.
- 2) Kata-kata Indonesia yang sudah lazim digunakan. Kata bahasa daerah yang lazim.
- 3) Kata daerah yang tidak lazim

- 4) Kata asing yang sudah disesuaikan (adaptasi) baik dari segi ejaan maupun lafal.
- 5) Kata asing yang dipakai secara utuh.

Persoalan yang sering muncul dalam kosa kata modern Indonesia adalah kelompok (4). Misalnya kata **pantau, mangkus, laku lajak, sangkil** dan lain-lain. Ini selalu menjadi perkara bahasa yang melibatkan sejumlah ahli bahasa dan pemakai bahasa.

Guru bahasa Indonesia sering 'tersudut' bila ditanyakan murid atau mahasiswa. Kata 'pantau' berarti 'monitor' (dalam bahasa Inggris). Sedangkan mangkus berarti 'efisien' atau berdayaguna, 'laku lajak' artinya '*over acting*', suatu tingkah yang berlebihan dan 'sangkil' berarti efektif.

Guru harus mewaspadaikan pemakaian yang belum "memasyarakat" ini. Barangkali terasa janggal kedengarannya kalau guru mengatakan. "Marilah Saudara-saudara, kita gunakan bahasa Indonesia secara sangkil supaya hasilnya mangkus".

Lukman Ali seorang pakar bahasa pernah menegaskan bahwa istilah atau kata-kata baru itu seperti halnya dunia dagang. Kalau kata-kata itu tidak laku dalam pemakaian di masyarakat lebih baik disimpan dulu dalam laci. Pedagang harus melihat situasi yang cocok meskipun barangnya sudah bagus.

Ambillah contoh 'menjual rinso di pinggir kali'. Meskipun rinso itu cukup efisien, tetapi karena dijual di pinggir kali maka hasilnya sama membuang rinso ke dalam kali. Oleh karena situasi tidak cocok bagi masyarakat yang mandi dan mencucinya setiap hari di pinggir kali. Lain halnya bagi masyarakat kota yang sibuk sehingga fungsi rinso bisa membantu dengan mencuci sendiri.

Peranan penerbit juga amat berpengaruh dalam membantu atau merusak tingkat keterbacaan murid dalam pemakaian dan pemahaman kosa kata. Penerbit yang kurang selektif dalam memilih judul buku untuk murid dapat mengakibatkan buku yang seyogianya diperuntukkan buat murid SD tetapi menggunakan kata yang hanya layak dipakai untuk tingkat SMA. Para pengarang buku harus cukup jeli untuk memilih kata-kata dan istilah yang seharusnya tidak dipakai secara manasuka. Istilah 'ekosistem', 'wacana' selalu ditemukan pada bacaan murid SD yang seharusnya dipakai di tingkat sekolah lanjutan.

Belum lagi pemakaian bahasa di media massa yang sering terbaca misalnya, "Perlu konglomerat bekerjasama dan masalah itu sudah go public dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi". Aspek komunikatif dalam kalimat tersebut tidak tercapai.

Masih banyak lagi perkara bahasa yang belum tuntas untuk diterbitkan. Konon, ada seorang anggota MPR yang mengusulkan kata "daripada" supaya dibakukan saja. Lukman Ali menjawab bahwa hal itu tidak mungkin. Yang penting menurut mantan Atase Kebudayaan RI di Kuala Lumpur itu, adalah menggunakan kata 'daripada' sesuai konteks pemakaian yang tepat. Kalimat yang berbunyi "Maksud daripada penataran ini menghasilkan daripada sejumlah pembahasan daripada sikap para petatar sehingga daripadanya ditemukan hasil daripada tujuan tersebut". Pada kalimat ini penggunaan 'daripada' sebaiknya dihilangkan semua.

Berhati-hatilah para pembicara dalam situasi resmi terutama guru dalam berbahasa di depan muridnya. Sikap guru harus konsisten dalam mengajak murid berbahasa secara baik dan benar. Andaikata apa yang dipegang guru secara konsisten dan kemungkinan besar berbeda dengan pemakaian bahasa di masyarakat dan media massa, maka hanya ada dua pilihan yakni rela ditertawakan untuk yang benar atau ingir dipuji untuk yang salah.*

Bahasa dan Cinta Segitiga

Pengertian denotasi, dan konotasi belum memiliki keseragaman arti dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ada yang beranggapan konotasi sama dengan ungkapan atau kiasan. Agar lebih jelas berikut ini disajikan perbedaan denotasi dengan konotasi.

Denotasi disebut juga makna umum, arti yang lazim, yang diterima masyarakat (khalayak). Denotasi dapat juga diartikan hubungan antara kata dengan barang, orang, tempat, sifat, proses, dan kegiatan di luar sistem bahasa. Jadi, "wanita yang cantik" memiliki denotasi yang tepat pada maujud yang ditunjuknya. Perkataan 'buku' tidak cocok dengan 'mobil' ditinjau dari segi denotasinya. Dalam denotasi terdapat ketepatan penerapan kata yang mempunyai nilai rasa netral.

Konotasi ialah jumlah semua tautan pikiran yang menerbitkan nilai rasa. Konotasi itu dapat bersifat pribadi dan bergantung kepada sifat, peristiwa, pengalaman orang seorang dengan kata atau barang yang dirujuk oleh kata itu.

Di dalam kosa kata modern istilah 'tinja' boleh dipakai di hadapan sidang resmi, di hadapan menteri, pada acara kuliah subuh atau dalam rapat Dharma Wanita. Perkataan 'tinja' mengandung nilai rasa netral. Di samping tinja orang mengenal juga *speaces* atau tahi. Meskipun ketiga kata itu memiliki bau yang sama, bentuknya juga sama, akan tetapi nilai rasanya dalam pemakaiannya berbeda. Misalnya ketika anda berjalan di pusat perbelanjaan, tiba-tiba kaki anda dipijak orang. Sudah barang tentu anda tidak mengatakan "tinja

Lu!", tetapi "tahi Lu!". Ini membuktikan pemakaian kata yang terakhir memiliki nilai rasa sesuai dengan situasi dan tempat yang tepat.

Konotasi memiliki tautan pikiran dan tidak berlaku secara mutlak. Ia tergantung dengan lingkungan, kelompok masyarakat dan pengalaman. Sebuah kata yang netral dapat memiliki nilai rasa yang tertentu bagi sekelompok masyarakat. Ambil misalnya perkataan 'warung remang-remang', 'Ayah si Badu sering ke Bandar Baru'. Bagi orang Jakarta yang datang ke Medan kata 'Bandar Baru' itu termasuk netral. Tetapi orang Medan akan berpikiran lain, sehingga seorang kakak pramuka tatkala mohon izin untuk membawa anak didiknya ke Bandar Baru, ia lebih spontan memilih kata 'mohon izin berkemah ke Sibolangit' (padahal Sibolangit termasuk kawasan Bandar Baru).

Dalam dunia politik konotasi memegang peranan penting. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 1965 timbul tragedi berdarah di Indonesia yaitu pemberontakan G30S/PKI. Serentak bagi bangsa Indonesia populer sebutan 'kiri', suatu konotasi di dunia politik yang harus dihindari. Lalu timbul pula istilah yang berkonotasi negatif yakni 'ekstrem kanan' dan 'ekstrem kiri'.

Konotasi tidak terbatas kepada yang buruk atau dalam dunia sastra, tetapi mencakup semua bidang kehidupan manusia. Pada tahun 1960-an, murid berkenalan di bangku SMP dengan bidang studi ilmu Ukur. Sang guru dengan asyiknya bermain-main dengan segitiga sambil coret sana coret sini di papan tulis. Guru bermain segitiga di papan tulis, termasuk denotasi. Akan tetapi "guru terlibat cinta segitiga" sudah termasuk konotasi.

Konotasi dapat melekat pada satuan kata yang berbeda-beda, sesuai dengan pengalaman pribadi seseorang. Misalkan satu saat anda jatuh hati kepada seorang wanita. Anda mungkin menyurati, memacarai, tetapi surat anda tidak dibalas dan 'tiba-tiba anda menerima' kertas "merah jambu" yang isinya 'Persetan Lu!'. Setelah kejadian itu anda mungkin terlalu sentimen dengan warna "merah jambu", karena ia mengingatkan anda kepada rasa pahit masa lalu (trauma) yang menjengkelkan itu.

Sebagai kesimpulan ada tiga golongan yang sarat dengan konotasi. Pertama, golongan kata yang berkaitan dengan pencernaan. Kata 'tinja' sebutlah sebagai misal, diambil dari kata 'istinja' (membersihkan) setelah qada hajat (buang air besar) lama kelamaan berubah menjadi 'tinja'. Dalam kalangan masyarakat Melayu sering dipakai ungkapan penyamar misalnya 'Saya mau ke belakang

sebentar'. Padahal WC di depan. Penduduk Melayu biasanya menjauhkan WC-nya di sungai.

Kedua, golongan kata yang berkenaan dengan pembiakan/persetubuhan / persenggamaan sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban.

Ketiga, golongan kata yang berhubungan dengan sembah manusia. Misalnya, orang Indonesia dalam berkomunikasi dengan Allah YMK. Pada umumnya dilafalkan salat (sesuatu yang relegius) 'pengganti perkataan sembahyang. Manusia yang taat hukum dan taat bayar pajak.

Demikianlah sedikit pembicaraan tentang denotasi dan konotasi yang barangkali ada manfaatnya bagi mahasiswa dan peminat Bahasa,*

Bahasa Lalulintas dan Bahasa Pers

Wartawan empat zaman Rosihan Anwar (alm) adalah tokoh yang mampu menjembatani sikap berbahasa kaum wartawan dengan kaum guru di sekolah. Apabila media massa membina masyarakat masa kini, maka guru diharapkan membina masyarakat massa depan.

Buku karangan Pak Rosihan *Bahasa Jurnalistik dan Komposisi* (1979) cukup berjasa memberi pembelajaran bagi para peminata dan pecinta bahasa Indonesia. Rosihan berpesan, bahasa Jurnalistik harus mengindahkan kaidah tata bahasa Indonesia. Ia harus tahu pokok aturan bahasa Indonesia.

Pokok aturan terutama ialah yang penting atau yang dipentingkan ditaruh di depan, yang kurang penting atau keterangan di belakang. Yang dimaksud dengan yang penting atau yang dipentingkan ialah yang menjadi pokok pikiran. Dengan demikian kita menulis: Buku ini bagus (bukan ini buku bagus). Malam nanti kita menonton (bukan nanti malam kita menonton).

Sudah tentu akibat pengaruh rumpun bahasa lain seperti bahasa Sansekerta pokok aturan tadi malah terbalik yaitu yang dipentingkan di belakang dan yang dijadikan keterangan di depan. Misalnya: Perdana menteri, bumi putera dan mahaguru (Sansekerta). Dalam konteks ini sebagai contoh yang terkenal di masa lalu ialah perkataan Mobrig yaitu kependekan atau akronim Mobiele Brigade. Bertahun-

tahun lamanya dibiarkan salah satu kaprah sehingga akhirnya dibetulkan menjadi Brimob yaitu Brigade Mobil.

Semua Golongan

Rosihan tidak lupa mengkritik bahasa surat kabar yang cenderung melakukan kesalahan ejaan. Dia mempertanyakan mengapa aturan ejaan itu tidak diterapkan secara baik dan konsekuen. Penulis cerpen “Radio Masyarakat” ini berkata, bahwa kita memiliki tanggung jawab bukan hanya terhadap satu golongan masyarakat, tetapi terhadap semua golongan termasuk anak-anak kita murid-murid sekolah. “Kita mempercayakan anak-anak kita kepada guru-guru mendidiknya, tetapi kita tidak mau membantu pekerjaan guru-guru itu.” Yang dijumpai murid-murid itu di luar sekolah, dalam hal ini surat kabar berbeda daripada yang diajarkan gurunya di sekolah (1978).

Sebagai contoh sebuah judul berita “Jambret Dihajar Massa”. Mana yang benar “jambret” atau “Penjambret”. Kata pertama tergolong kata kerja (jambret) dan tidak sama dengan penjambret (pelaku). Siapakah yang sebenarnya dihajar oleh massa itu? Bisakah pekerjaannya yang dihajar. Kalimat itu sebaiknya diperbaiki yakni Penjambret Dihajar Massa.

Ciri-ciri bahasa pers antara lain singkat, dan tepat. Namun, tidak sesuatu yang singkat itu tepat. Adanya kebolehan untuk menghilangkan imbuhan awalan dalam judul berita *tidak dapat dibenarkan* untuk menghilangkan imbuhan yang fungsional itu dalam mendukung makna kalimat.

Ada contoh lain pada papan nama imbauan tentang menjauhi pemakaian narkoba. Papan nama itu bertahun-tahun terpacak di pinggir jalan raya. “Narkoba Perusak Bangsa”. Dapatkah narkoba (benda mati) itu merusak bangsa? Sebenarnya maksud penulisan itu adalah pemakaiannya atau pelaku pengguna itu yang dapat merusak bangsa. Kalimat itu sebaiknya diperbaiki menjadi narkoba merusak bangsa atau *Pemakai Narkoba Perusak Bangsa*.

Penulis teringat tokoh lain yang peduli terhadap penggunaan bahasa yang benar. YS Badudu (pakar bahasa) menambah pengetahuan kita tentang salah kaprah dalam berbahasa Indonesia. Rambu-rambu lalulintas setiap hari dibaca dan dilewati oleh para pemakai jalan umum. Ungkapan yang digunakan untuk menanyakan bahwa kendaraan yang akan belok ke kiri tak usah menunggu sampai

lampu hijau. Ada bermacam-macam tulisan yang terpampang. Misalnya (1) Belok kiri jalan terus, (2) Belok kiri boleh langsung, (3) Belok kiri boleh terus (4) Belok kiri langsung.

Dalam hal di atas Pak Badudu mengusulkan agar dipilih ungkapan (4). Mengapa? Alasannya karena kata terus mengandung arti: Pertama, terus ke depan yang berarti lurus, jadi tidak membelok; sedangkan yang kedua, berarti tak usah berhenti. Jadi, dalam pengertian kata itu sebagai dialek, terus juga sama artinya dengan “lempang”. Oleh karena itu, untuk menghindari pengertian pertama, sebaiknya digunakan kata langsung saja yang berarti “tak usah berhenti”.

Penumpang Umum

Tulisan papan nama Penumpang Umum sering tertulis (1) di bawah setrip putih dalam bulatan merah (tanda larangan), atau (2) khusus di bawah tanda larangan itu. Jadi tidak ada dalam rambu-rambu tersebut, tetapi khusus terpisah. Yang perlu dibicarakan ialah penggunaan kata penumpang. Mengapa ditulis penumpang umum dan bukan kendaraan umum? Mengapa penumpang yang dilarang dan bukan kendaraan. Apa salahnya ditulis kendaraan umum saja, yang berarti bukan kendaraan pribadi?

Andaikata ditulis sudako, bus, roda dua orang masih mengerti bahwa itu jenis kendaraan. Tidak ada kendaraan penumpang umum. Yang ada, kendaraan umum sebagai lawan kendaraan pribadi.

Bahasa lalu lintas yang lain yang tak kalah hebohnya adalah Parkir Khusus Kendaraan Antar Jemput Anak Sekolah. Timbul pertanyaan, bahwa yang baru diparkir di tempat parkir khusus itu apa? Pekerjaan antar jemput anak sekolah? Tidakkah cukup ditulis pada rambu-rambu itu Parkir Khusus Kendaraan Antar Jemput, karena bukanlah situasinya (dekat sekolah atau di depan sekolah) membantu pemahaman bahwa yang diantar dan dijemput ialah anak-anak atau murid-murid sekolah itu.

Sumbangan Wartawan

Dari masa ke masa Belanda Indonesia bukan saja mengalami perubahan ejaan resmi oleh pemerintah, tetapi juga mengalami pelbagai perlakuan oleh masyarakat pemakaiannya, *banyak sumbangan kaum wartawan* terhadap perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh ketika kabmet Wilopo jatuh tanggal 6 Juni

1953 dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo akibat gara-gara peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara yakni pendudukan tanah bekas perkebunan oleh para petani dan buruh yang didalangi oleh PKI. Peristiwa ini menimbulkan kegemparan dan heboh. Kata “heboh” (Bahasa Melayu-gaduh, ribut, huru-huru). Anak Medan sudah biasa memakai kata itu dulu, bahasa percakapan sehari-hari (kolegial) tidak berapa lama kemudian kata ‘heboh’ terkenal secara nasional. Sejak peristiwa sengketa tanah di Tanjung Morawa itu kata heboh menjadi umum diterima khalayak dan dipakai secara luas (*Briptu Norman Kamaru sedang menjadi heboh masyarakat. Kasus Sambo menjadi viral/ menghebohkan masyarakat milineal*).

Kata yang lain ‘gengsi’ dipungut dari perbendaharaan bahasa remaja di Minangkabau dan lebih populer dibandingkan ‘prestige’, ‘perbawa’, wibawa atau martabat (Rosihan, 1979). Sudah tentu banyak lagi kata yang dipopulerkan melalui surat kabar. Misalnya kata *ganyang, santai, ceria, sadis*. Sejak awal abad ke-20 ada dua arus utama yang bersaing dalam jagat bahasa kita, yakni antara bahasa Melayu Tinggi dan Rendah. Sejak itu bahasa Indonesia terlihat dalam persaingan sampai abad ke 21 saat ini.

Sudah barang tentu yang bersaing bukan lagi bahasa Melayu Rendah dan Tinggi, melainkan bahasa baku dan bahasa pergaulan serta proses itu melibatkan juga pengambilan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam ilmu jurnalis dikatakan, bahwa bahasa pers mengkomunikasikan cipta dan informasi. Cipta dan informasi haruslah mencapai sasaran.

Sasaran terbagi dua, yakni sasaran antara dan sasaran utama. Dikatakan, apabila pembaca *mau* membaca apa yang tertulis dalam surat kabar, sasaran antara tercapai. Bila pembaca *mengerti* akan apa yang dibacanya, maka sasaran utama tercapai. Untuk mencapai hal itu bahasa pers haruslah sederhana, mudah dipahami, teratur dan efektif.*

Bahasa Dalam Konteks Sosial

Tema Kongres Bahasa Indonesia V ialah menjunjung Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam konteks pembangunan nasional. Sub tema yang dijabarkan dalam kongres tersebut yaitu, peningkatan mutu dan peran bahasa Indonesia memperlancar usaha pencerdasan bangsa. Kemudian, bahasa Indonesia merupakan sarana pemantapan pembangunan dan ketahanan nasional dan kemampuan bahasa Indonesia merupakan jembatan menuju kesejahteraan yang adil dan merata.

Dasar yang menjadi landasan kongres adalah UUD 1945, bab XV, pasal 36 kemudian diperkuat dengan GBHN yang dituangkan dalam TAP MPR No. II/MPR71988. Sejarah Kongres bahasa Indonesia telah dicerminkan dalam pelaksanaan kongres yang pertama tahun 1938 di Solo, kedua, tahun 1954 di Medan, ketiga, tahun 1978 di Jakarta, keempat di Jakarta tahun 1983.

Tujuan Kongres Bahasa Indonesia V (28 Oktober - 3 November 1988) adalah memantapkan bahasa Indonesia sehubungan dengan peranannya untuk memperlancar usaha pencerdasan bangsa, sarana pemantapan pembangunan dan ketahanan nasional, serta sebagai jembatan tercapainya kesejahteraan sosial yang adil dan merata.

Bahasa dan Media Massa

Di bidang komunikasi massa dewasa ini, seorang penulis atau wartawan terlebih dahulu harus menguasai perbendaharaan bahasa yang memadai. Hal ini dikatakan oleh Menpen Harmoko. Bidang pekerjaan penulis atau kewartawanan mempunyai kriteria tersendiri. Pengetahuan berbahasa bagi seorang wartawan harus pula menyesuaikan diri dengan persyaratan bidang kegiatannya seperti apa yang kita kenal dengan adanya "bahasa Pers". Dalam bidang kewartawanan, seorang wartawan diharuskan berbahasa yang memenuhi beberapa ketentuan antara lain, tepat dan langsung kepada persoalan, cepat dimengerti, cepat dalam hal waktu (aktualitas), hemat dan singkat, dan menarik dalam penyajian.

Penyimpangan berbahasa bisa saja terjadi dalam melaksanakan kegiatan kewartawanan ini. Tetapi hal itu tidak lebih dari penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh tuntunan teknis kewartawanan. Beberapa ahli jurnalistik mengajarkan bahwa seorang wartawan harus dapat berbahasa yang mudah dimengerti, mulai dari kalangan tinggi (negarawan, pejabat tinggi) hingga kalangan masyarakat awam. Inilah sebenarnya tujuan penggunaan bahasa pers. Jika ditinjau dari segi komunikasi massa, berbagai golongan masyarakat kita dewasa ini, memiliki daya tangkap yang berbeda. Mereka yang berpendidikan akan lebih cepat dan dengan mudah mencerminkan hal-hal yang mengandung pemikiran dan istilah khusus, sebaiknya golongan yang kurang berpendidikan, tidak terlalu menjadi perhatiannya, mereka lebih cenderung memperhatikan hal-hal yang bersifat lebih ringan.

Menpen Harmoko (era Orde Baru) pernah menjelaskan juga peranan jurnalistik elektronik yang bersifat siaran yakni media televisi. Dalam media televisi sangat mementingkan ketepatan antara komentar (audio) dan gambar (visual) yang biasa disebut dengan rumus sinkronisasi. Sebagai contoh ketidaktepatan antara komentar dengan gambar menyebabkan Harmoko mendapat telepon dari teman sejawatnya yang juga menteri. Dalam peristiwa itu diberitakan secara audio kegiatan sang menteri tetapi gambar yang terlihat peristiwa seorang tahanan yang digiring ke ruang pengadilan.

Di dalam jurnalistik televisi, dikenal ketentuan perhitungan untuk setiap suku kata yang dijadikan kalimat berita, misalnya saja, di dalam penyusunan berita bahasa Inggris, pada prinsipnya berlaku dua suku kata untuk bisa diucapkan dalam satu detik. Ketentuan ini dalam

berita berbahasa Indonesia sering terbentur pada penyusunan kalimat yang menggunakan akronim.

Harmoko menjelaskan keampuhan media elektronik telah dibuktikan dengan ikut sertanya radio Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya mengumandangkan pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 demikian juga penerbitan berbahasa daerah secara nyata mampu memberikan semangat perlawanan dalam menentang penjajahan. Dengan memiliki kekuatan serupa itulah daya tembus penerbitan pers bahasa daerah di samping bahasa Indonesia tidak dapat diabaikan dan bahkan perlu dibimbing ke arah pembinaan kehidupan politik, ekonomi dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Bahasa dalam Komunikasi Sosial

Bahasa merupakan suatu gejala sosial dengan karakter cukup 'pagi' dalam sejarah manusia dan dilaksanakan sebagian saja secara 'tidak sadar' tanpa memperhatikan hukum-hukum bahasa. Hal ini disampaikan Astrid S. Susanto dalam makalah yang berjudul "Peranan Bahasa yang Mengungkapkan Konsep-konsep Pembangunan."

Bahasa yang disampaikan secara formal, menurut Astrid, biasanya tidak mengandung unsur-unsur perasaan; tetapi lebih mengajarkan segi-segi formal rasionalnya. Makin tinggi budaya suatu bangsa, makin kaya bahasa masyarakatnya, makin besar jarak antarbahasa formal dan bahasa informal. Dari segi keterlibatan perasaan dan materi yang dibahas, makin formal suatu bahasa makin dangkal perasaan yang terungkap, makin jauh jarak keakraban antara pembicara yang terlibat. Sebaliknya makin spontan bahasa yang dipakai seseorang, makin akrab pihak-pihak yang terlibat, makin besar kemungkinan bahasa menyalahi peraturan berbahasa. Inilah dilema yang setiap saat dihadapi dalam komunikasi sehari-hari terutama dalam media sosial.

Menurut Astrid sang pakar ilmu sosial itu, di Indonesia tingkat keakraban diatasi dengan penggunaan bahasa daerah atau bahasa Indonesia justru dipergunakan untuk mengatasi masalah perbedaan status sosial. Karena itu bahasa-bahasa daerah berkembang semakin sejajar dengan perkembangan bahasa Indonesia.

Bahasa formal dalam beberapa bahasa daerah lebih cepat menunjukkan (perbedaan) status sosial melalui hierarki bahasa yang dipergunakan antara pembicara dan pihak yang diajak berbicara.

Dalam bahasa Indonesia dahulu dikenal kata-kata yang hanya dipakai untuk subyek yang lebih tinggi status sosialnya, seperti 'murka' untuk marah, 'santap' untuk makan, 'wafat' untuk mati, dan lain-lain. Dalam proses demokratisasi di Indonesia, kata-kata ini sekarang digunakan secara lebih umum dan sebagai bentuk halus dalam pembicaraan dalam bahasa Indonesia sehingga memberi kesan bahasa campuran. Penggunaan istilah dari bahasa daerah oleh bahasa Indonesia, dalam banyak hal 'melepaskan' diri dari struktur sosial dan hierarki sosial/feodal di daerah asalnya. Hal ini terjadi sebagai akibat proses komunikasi lintas budaya (*cross cultural communication*).

Bahasa sebagai alat komunikasi juga dibentuk oleh budaya dan sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya, sehingga usaha mencapai pemahaman bersama tadi, sebenarnya baru bersifat pemberian arti yang sama terhadap lambang secara denotatif. Makin tersusun suatu bahasa, makin sukar pemahaman bersama dicapai. Sebaliknya, perubahan-perubahan dalam penggunaan kata-kata di luar peraturan menjelaskan bagaimana peraturan-peraturan budaya mulai melonggar. Astrid mengambil contoh kata 'dahar' bagi orang berbahasa Sunda dan Jawa terdapat status sosial yang bertentangan. Kata 'dahar' dalam bahasa Sunda kasar sekali, tetapi dalam bahasa Jawa bersifat halus. Secara ilmiah gejala ini cukup menarik untuk diteliti. Secara politis hal ini merupakan suatu kemajuan, dari segi bahasa perusakan.

Contoh ini menjelaskan pula bahwa bahasa ikut berubah, bila keadaan berubah dalam arti politik dan sosial. Dengan perkataan lain, bahasa sebagai unsur kebudayaan ikut berubah dengan berubahnya budaya suatu masyarakat.

Mengingat kebutuhan pemerintah akan pengertian masyarakat terhadap langkah-langkah dan konsep pembangunan pemerintah maka peranan bahasa amat diperhitungkan. Astrid melihat siaran dan pembahasan pikiran pembangunan disebarluaskan. Timbullah masalah baru, yaitu adanya perbedaan persepsi karena perbedaan tingkat pendidikan, luas pengalaman pribadi, lingkungan sosial pribadi dan kelompok, dan tata nilai sosial dan budaya. Hal ini membuktikan bahwa bahasa hidup dan berkembang dalam konteks sosial bermasyarakat dan berbangsa.

Bahasa dan Sindrom Budaya

Banyak orang yang tinggal di luar negeri atau orang asing yang datang ke negeri kita mengalami kejutan kebudayaan, kebingungan atau frustrasi, disadari atau tidak. Hal tersebut biasanya terjadi pada orang yang baru pertama kali hidup diluar negeri dan yang mentalnya tidak siap. Penyebab utama dari sindrom itu adalah adanya perbedaan fisik, lingkungan, dan kebudayaan antara tanah airnya sendiri dan negeri baru yang dialaminya. Perbedaan tersebut akan menimbulkan reaksi. Reaksinya bisa bermacam-macam. E. Sudiono dalam bukunya *Setan dan Bahasa* (2003) secara jitu memaparkan hal tersebut sebagai berikut.

Pertama ia bisa menjadi kepompong (mengisolasikan diri). Kedua, menjadi kosmopolitan. Ia mempunyai rasa optimisme dan mau mengerti orang lain (pribumi) dan pandai menempatkan dirinya sebagai orang pribumi dalam melihat masalah-masalah yang dihadapinya. Ketiga, menjadi pseudo pribumi yang maksudnya mudah menyesuaikan diri dengan kebudayaan lokal dan tidak jarang di antara mereka akhirnya kawin dengan orang pribumi.

Perbedaan fisik dapat menimbulkan gangguan atau kebingungan. Misalnya, kamar mandi atau kakus yang berbeda, iklim yang berbeda, makanan yang berlainan, air yang rasanya lain. Banyak orang kita maupun orang asing memiliki pengalaman dalam hal fisiknya terutama gangguan perut, dalam sistem badannya belum dapat menyesuaikan dengan negara tempatan.

Menggunakan kakus /toilet, sebutlah sebagai misal, yakni masih banyak orang Indonesia yang gagap menggunakannya. Kakus untuk model duduk, dan kebiasaan orang kita adalah kakus model jongkok. Pemakaian kertas tisu yang hanya disediakan di WC tanpa penyediaan air dan gayung. Hal ini menimbulkan “kejengkelan” bagi orang Indonesia yang selalu menggunakan air baik untuk berwuduk (bersuci) maupun membersihkan tinja setelah buang air besar.

Perbedaan lingkungan yang bisa membingungkan misalnya sistem lalu lintas yang berbeda, keadaan pasar, toko dan cara membeli yang berbeda (tawar-menarwar). Lalu lintas kita memang rumit dan kacau. Lampu tanda merah (berhenti) justru dilanggar, dan penumpang asing terkadang bingung melihat supir kita agak pelan menghentikan kendaraan ketika tanda lampu hijau hidup.

“Mengapa begitu?”, tanya sang penumpang. Secara enteng supir kita menjawab, “Oh, kita tunggu dulu, *Lae* saya lewat dari sana”. Itu pengalaman orang asing di negara kita, bagaimana pula di negara asing?

Terberat

Untuk bertahan lama di negara asing diperlukan penyesuaian macam-macam. Pengalaman pertama di negara asing merupakan yang terberat, karena perbedaan tersebut di atas. Yang paling sulit adalah penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan yang bersifat kultural, antara lain penguasaan bahasa asing yang canggih, pengetahuan tentang komunikasi nonverbal.

Di samping sulit, kedua hal tersebut memerlukan waktu yang lama untuk bisa dikuasai secara baik. Pernah suatu kejadian ketika penulis membawa rombongan kesenian ke Jepang tahun 1995. Pada suatu acara sarapan pagi di sebuah restoran, pemandu wisata kami lebih dahulu masuk dan menunggu di dalam restoran. Kami yang agak terlambat masuk tergesa-gesa membuntuti dari belakang.

Di depan pintu masuk yang terbuat dari kaca transparan kami melihat sang pemandu memberi isyarat mengusir. Di sini bahasa tubuh digunakan dengan cara lambaian tangan keluar yang biasanya diartikan mengusir alias tidak diperbolehkan masuk. Kami bingung dan tercenung di luar. Peristiwa itu tidak lama berlangsung.

Akhirnya sang pemandu mendatangi kami di luar dan menyuruh masuk. Ternyata perbedaan lambaian tangan yang mengarah keluar bermakan mengajak masuk, padahal sebaliknya di

Indonesia isyarat itu mengusir. Kemudian lambaian tangan yang mengarah ke dalam di Indonesia berarti mengajak, sedangkan di Jepang itu bermakna mengusir.

Saya teringat ucapan seorang guru yang pernah menyampaikan ilmu “filsafat tiga jari”. Apabila induk jari tangan ditemukan dengan telunjuk lalu digosok-gosokan itu bermakna harta. Kemudian telunjuk diluruskan dan induk jari ke atas berarti mengancam (kuasa), dan yang terakhir induk jari dijepit oleh telunjuk yang dibelitkan maka artinya seks (wanita).

Filsafat ini memang berbau joke, tapi saya pikir ada benarnya juga. Pengetahuan komunikasi non verbal ini ada pada setiap budaya lokal kita dan perlu menjadi perhatian dan pengkajian ahli bahasa dan peminat budaya untuk menelitinya.

Saya juga pernah membaca kisah-kisah Nasaruddin Hoja dalam Humor Sufi yang menceritakan pertarungan bahasa isyarat antara Nasaruddin dengan pendatang asing. Kedua petarung bahasa itu dinyatakan sama-sama memahami bahasa isyarat yang paling disampaikan meskipun pada akhirnya makna isyarat itu berbeda sesuai dengan tafsiran masing-masing.

Perbedaan yang bersifat kultural itu menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Reaksinya bisa positif, bisa pula negatif. Yang akan dibicarakan di sini adalah reaksi negatif. Reaksi negatif dapat berbentuk perlawanan atau pelarian dari masalah yang dihadapi. Manifestasi pelarian bisa berbentuk sikap menolak, mengurung diri, dan menyendiri. Fase pertama dari reaksi negatif adalah penolakan, kedua, adanya regresi, dan ketika retreatisme (Sadiono, 2003: 54).

Penolakan yang utama adalah penolakan terhadap lingkungan, karena lingkungan dianggap sebagai biang keladi dari segala rasa tidak enak dalam dirinya. Misalnya ia mengeluh tentang pelayanan pos, perumahan, transportasi, komunikasi, belanja, dan sebagainya. Penduduk setempat ingin menolong, tetapi mereka tidak mengetahui masalah yang dihadapi, lalu orang asing menyangka bahwa penduduk setempat tidak mau bersimpati kepadanya.

Regresi

Fase kedua adalah regresi. Regresi ini sebenarnya merupakan semacam kerinduan pada tanah air sendiri. Ia mengenang kembali keadaan di negaranya sendiri, khususnya ketika ia merasa bahagia dan mapan di sana. Ia mulai mengagung-agungkan negaranya sendiri

secara berlebihan. Lalu membanding-bandingkan negaranya sendiri dengan negara yang baru dikunjunginya dan biasanya menjelek-jelekkan negara baru itu.

Sikap ini terkadang menimbulkan perlawanan dan kejengkelan pula dari orang setempat. Ada sebuah dialog supir Indonesia dengan seorang asing yang berkunjung ke Jakarta. Ketika sang supir membawa penumpang orang asing untuk melihat-lihat kota Jakarta. Sang pendatang itu berkomentar. “Pak sopir, ini gedung Istora ya? (maksudnya Stadion Gelora Bung Karno) Sang supir menjawab: “Ya Mister!”. Orang asing kembali bertanya: “Berapa lama gedung itu selesai?” Supir: “Limabelas tahun, Mister!”. Orang asing: “Kok lama benar, kalau di negara saya gedung seperti ini hanya lima tahun sudah selesai”. Ketika melewati Hotel Indonesia orang asing bertanya lagi: “Berapa lama hotel ini dibangun?” sang supir: “Lima tahun, Mister!” orang asing: “Oh, ya kalau di negara kami cukup tiga tahun saja. Tiba-tiba sang sopir timbul rasa keindonesiaanya dan waktu itu mereka melewati kawasan Monas. Orang asing bertanya: “Kalau Monas ini berapa lama dibangun? Sopir dengan sigap menjawab: “Entah Mister, semalam belum ada kulihat”.

Retreatisme

Fase terakhir adalah retreatisme, ia akhirnya mundur teratur dan lari dari masalah-masalah yang dihadapi dengan mengisolasi dirinya sendiri. Ia menuduh bahwa kondisi negara baru itulah yang menyebabkan frustrasi, rasa khawatir, bingung, dan sakit. Ia kemudian menggabungkan dirinya dengan kebudayaan bangsanya sendiri di kotanya. Gambaran ini dapat kita temukan di kota-kota khususnya kota wisata seperti Bali, Penang kawasan khusus kota-kota besar seperti Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok dan Singapura. Kawasan Pantai Kuta di Bali termasuk kawasan ramai pengunjung asing dengan jenis pakaian, makanan, dan hiburan yang asing.

Ada terasa gambaran kehidupan Amerikanisasi (gaya pengamerikan) yang cukup ketara. Kawasan Lebu Chulia (Penang) merupakan tempat pemukiman orang-orang asing yang duduk santai setiap hari sambil mendengar musik Barat, makanan khas Pizza Italia, Amerika dan China.

Pendatang baru untuk waktu yang pendek tidak selalu mengalami masalah emosional seperti pendatang untuk waktu yang lama. Masa penyesuaian dan bagi mereka yang akan tinggal lama

mungkin akan makan waktu beberapa bulan, mungkin beberapa tahun.

Di samping itu serius tidaknya kejutan kebudayaan yang dialaminya tergantung pada pribadian, kemampuan berbahasa, emosi, dan lamanya tinggal di negara baru itu, serta tingkat perbedaan antara kebudayaanya sendiri dan kebudayaan baru tersebut. Jika ada pepatah “Di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung” masih mutakhir menjadi panduan orang-orang asing yang berkunjung ke negara tertentu atau sebaliknya orang-orang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri.*

Forum Bahasa Media Massa

Pada tanggal 9 Agustus 2005 dalam menyongsong peringatan 60 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Depdiknas dan Departemen Kebudayaan Pariwisata di Jakarta menyelenggarakan Seminar Penggunaan Bahasa dalam Film, Televisi, Media Luar Ruang (Papan Nama, Iklan, Kain Rentang, Penunjuk Lalu Lintas, dan Wisata). Begitu pentingnya secara seminar itu sehingga panitia melibatkan berbagai instansi, institusi, asosiasi, dan kelompok masyarakat. Di antara peserta yang terlibat dalam kegiatan itu adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Persatuan Wartawan Indonesia termasuk juga Forum Bahasa Media Massa.

Mengapa acara seminar begitu penting? Jawabannya sangat sederhana, karena bahasa sebagai alat komunikasi dan ia melintasi semua bidang pelajaran termasuk bidang informasi yang melibatkan khalayak ramai. Tidak jarang ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada siaran berita.

Media cetak (surat kabar) dan media elektronik (televisi dan radio) sering menjadi anutan orang ramai. Sekali timbul kesalahan dan penyimpangan, maka kesalahan itu akan menyebar ke berbagai pelosok tanah air yang dapat dibaca dan ditonton orang ramai. Hal seperti itu juga terjadi pada bahasa yang dipakai dalam surat kabar.

Menjadi Rujukan

Sudah lumrah diketahui bahwa pusat pemberitaan media cetak, radio, dan televisi menjadi rujukan dari pengguna bahasa. Itulah sebabnya, para redaktur khususnya surat kabar, kantor berita, stasiun radio, dan televisi yang "prestisius" amat memperhatikan bahasa jurnalistik mereka.

Negara pengguna bahasa Inggris di luar Amerika Serikat, mengacu pada BBC untuk bahasa Inggris yang berlaku dan mutakhir.

Di Jerman Duetsche Welle yang bekerja erat dengan lembaga pengajaran dan pengkajian bahasa. Goethe Institute menjadi acuan bagi pengguna bahasa Jerman di jaringan televisi ARD, ataupun di ZDF. Di Amerika Serikat standar bahasa jurnalistik media cetak, radio, dan televisi mengacu pada patokan yang biasa digunakan di dua kantor mereka yakni Associated Press (AP) dan United Press International (UPI).

Majalah Time dan koran New York Time amat memperhatikan kata-kata dan susunan bahasa Inggrisnya. Di Indonesia sampai saat ini belum ada standar yang baku untuk penulisan jurnalistik.

Beberapa media memang diakui menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar dan memaksa wartawannya untuk mematuhi patokan itu. Harian Kompas, Republika, dan Media Indonesia memiliki komitmen dan sudah menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan konsekuen.

Sikap ini patut dihargai oleh karena sikap moderat pakar bahasa yang sering mengajurkan secara persuasif selama ini dianggap kurang efektif untuk mengembangkan dan membina bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Hal ini membuktikan bahwa media massa adalah pembina masyarakat masa kini dan apa yang muncul untuk masa yang akan datang adalah berasal dari apa yang dikerjakan masa sekarang.

Bagaimanakah sebuah penerbitan atau siaran mampu mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi (Bahasa Indonesia Tahun 2000, 1998):

- a. Memiliki kemauan politik dari pimpinan redaksi untuk menetapkan bahwa media yang dikelolanya berketetapan dengan cara apapun mengibarkan identitas dirinya sebagai pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- b. Menjaring calon wartawan dengan menekankan kemampuan pemahaman bahasa dan sastra Indonesia, sebagai prasyarat utama.
- c. Melalui pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan istilah yang baku.
- d. Menempatkan redaktur khusus yang membina dan melatih redaktornya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Mengingat dewasa ini stasiun televisi swasta bermunculan mengejar tiras siaran dan pasar, maka sebaiknya para pengelola televisi tersebut memperhatikan pemakaian bahasanya untuk bertatap muka secara tidak langsung dengan para pemirsanya.

Dalam pers, bisnis juga penting. Wartawan perlu membuat isi sesuai dengan pasar. Untuk itu diperlukan juga adanya riset pasar. Jangan sampai muncul iklan-iklan yang menyinggung yang bisa mengakibatkan kehilangan keuntungan.

Bahasa Wartawan

Bahasa yang dipakai oleh wartawan memiliki fungsi pokok sebagai alat komunikasi. Bahasa mempunyai tugas untuk menyampaikan pesan dari wartawan kepada khalayaknya. Kalau boleh diumpamakan, muatan bus adalah pesan, bus yang mengangkut pesan itu adalah bahasa.

Bagaimana pesan tersebut dapat dibawa oleh bahasa untuk mencapai tujuan dengan efisien adalah bergantung pada teknik sajian.

Wartawan setiap hari bergelut dengan berbagai karya tulis. Bahasa tidak dapat dilepaskannya. Penguasaan terhadap kemahiran berbahasa sangatlah penting bagi mereka. Jika kemahiran berbahasa tidak diperoleh dan dikuasai, pesan bagaimanapun besarnya tidak akan sampai sesuai dengan maksudnya.

Beberapa surat kabar telah berinisiatif untuk meletakkan editor bahasa yang bertugas untuk menata dan merapikan pemakaian bahasa (ejaan, pilihan kata, dan komposisi kalimat). Peran editor ini pun dianggap belum efektif, karena posisinya dianggap berada di bawah wartawan.

Pada umumnya kesalahan bahasa dapat dihindarkan apabila para redaktur menguasai dengan baik tata bahasa. Di sinilah letak permasalahannya. Permasalahan yang mendasar adalah lemahnya penguasaan tata bahasa Indonesia pada sebagian redaktur surat kabar

maupun redaktur televisi. Kalau kita acak ke belakang tentu berpulang pada tingkat pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah.

Sudah umum diketahui bahwa pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi menurun kadarnya. Dua puluh lima tahun yang lalu para siswa SLTP dan SLTA diwajibkan membaca buku-buku sastra, mengarang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada waktu itu siswa masih akrab dengan buku-buku sastra karya Sutan Takdir Alisyahbana, Suman Hs, Marah Rusli", Hamka, dan Sanusi Pane.

Sekarang ini tampaknya kewajiban membaca karya sastra itu sudah tidak ada lagi. Akibatnya pemahaman bahasa Indonesia di kalangan para siswa SLTA dan mahasiswa termasuk reporter dan redaktur berita menurun. Memang kenyataannya para wartawan bergulat setiap hari dengan bahasa dibandingkan dengan pakar bahasa yang hanya memikirkan sistem bahasanya.

Di satu sisi wartawan lebih baik merangkaikan kata dan kalimat yang segar, lugas dan menarik. Namun, penguasaan disiplin berbahasa juga penting. Oleh karena ia menyangkut disiplin berpikir. Bahasa yang kacau mencerminkan pikiran pemakainya yang kacau. Sebaliknya kerancuan berpikir tercermin dalam kerancuan bahasa.

Pada era global, sekarang "transnasional media" tennasuk televisi dan surat kabar dengan amat mudah merambah wilayah Indonesia. Untuk itu sudah tiba waktunya untuk memacu lagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan diharapkan televisi Indonesia tennasuk surat kabarnya dapat mengungguli pengaruh bahasa-bahasa lain yang datang dengan amat leluasa seperti sekarang ini

Jurnalistik Kultural

Berita adalah bagian dari komunikasi yang membuat pembaca terus memperoleh informasi tentang pergantian peristiwa, isu-isu aktual dan tokoh di dunia luar. Sejarawan pernah mengatakan para penguasa juga menggunakan berita untuk menjaga kebersamaan komunitas mereka. Berita menyediakan rasa kebersamaan dan tujuan bersama, bahkan membantu penguasa mengontrol rakyat mereka dengan mengaitkannya terhadap ancaman bersama. Sejarah mengungkapkan, makin demokratis sebuah masyarakat, makin banyak berita dan informasi yang didapat.

Jurnalisme sangat berdekatan dengan konsep penciptaan komunitas. Pada tahun 1970-an sampai akhir 1980-an sekelompok penulis dan pengasuh ruang budaya berkumpul di pojok toko Bata Kesawan. Mereka membuat arisan sastra dari rumah ke rumah, mereka berdiskusi dan saling membicarakan tulisan yang dimuat di koran Medan. Boleh dikatakan ketika itu semarak bersastra cukup bergairah dan mampu membangun komunitas masyarakat sastra yang heterogen, dan tidak pernah mempersoalkan paspor sastra dan kubu bersastra seperti yang pernah terjadi dalam polemik budaya antara kaum Lekra dengan kaum Menifes Kebudayaan.

Sebagaimana berita adalah bagian komunikasi yang menyampaikan informasi kepada pembaca, maka para pengasuh (redaktur budaya) koran Medan cukup piawai cerdas menyajikan khasanah sastra, seni dan budaya tadi. Ada ruang penulisan puisi,

kritik sastra, artikel yang menampilkan isu-isu aktual yang bertalenta dengan semarak sastra di Jakarta, dan juga rubrik humor seniman.

Barangkali agak terlewat tentang rubrik budaya (khusus: sastra) bagi pemangku kebijakan surat kabar di Medan. Beberapa tokoh sastrawan terkemuka/di kancah nasional dan internasional tumbuh dan berkembang melalui media surat kabar sebagai media pengucapan diri dan cara berekspresi yang unik, menarik dan selalu muncul dengan ikon kesusastraan

Penyair Sitor Situmorang yang lama berkecimpung di redaksi Harian Waspada telah muncul sebagai tokoh penyair yang diperhitungkan di tanah air. Kritikus HB Yassin telah menjulangkan nama Sitor sebagai penyair besar Indonesia. Pastilah salah satu ketokohan Sitor, oleh karena beliau banyak menempa diri dengan lagak-lenggok bahasa Indonesia dialek Medan yang merupakan pergulatan kreativitas dengan bahasa Melayu Medan.

Tokoh yang muncul lainnya ialah Hamsad Rangkuti yang mulai berekspresi dalam penulisan cerita pendek yang dimuat di Harian Waspada Tahun 1960-an.

Hamsad Rangkuti kini dijuluki penulis cerpen papan atas di Indonesia. Hasil dari kesetiaan dan ketekunan beliau mengulas peristiwa dalam cerpen-cerpennya telah mengangkat Hamsad untuk berkeliling di Nusantara, bahkan berkesempatan ke London atas fasilitas Harian Kompas untuk mengunjungi negeri Shakespeare itu.

Kemudian beberapa nama yang bertugas sebagai wartawan seperti Herman KS dan B.Y. Tand, Arsoel Temenggung, A.A Bunga, Aoh Karta Hadimaja dan Zakaria M. Passe sangat berjasa mengangkat martabat sastra Sumatera Utara yang selama ini terlanjur dijuluki "sastra picisan roman Medan" oleh para pemerhati sastra Indonesia. Penyair B.Y. Tand mantan juru warta Waspada dari kota Inderapura pernah memenangi Anugerah Puisi Malaysia bersama penyair Sapardi Djoko Dannono. Beliau mampu menyisihkan para penyair Asia Tenggara yang ikut berkompetisi dalam penulisan puisi.

Karya-karya By Tand telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, sama halnya Hamsad Rangkuti, Sitor Situmorang. Karya-karya mereka mulai ditulis di surat kabar Medan. Ibarat akar ia terus menjalari tanah dan ladang kreativitas dan berkelopak harum dalam taman Sastra Indonesia. Pusat dokumentasi sastra HB Yassin banyak menyimpan kliping sastra Koran Waspada sampai akhir tahun 1980-an.

Siapa bisa menduga sejumlah tulisan bercorak keilmuan telah menjadi koleksi dan dokumentasi siswa di ruang belajar dan perguruan tinggi. Tulisan yang dimuat di surat kabar Medan (termasuk Waspada) telah berjasa membuka horison pemikiran dan menambah khazanah ilmu bagi masing-masing pembaca. Tulisan tentang Omar Khayam sastrawan Persia (pernah dimuat secara bersambung oleh Mohd. Said) dan pemikiran fasafah besar yang ditulis Yosoef Soui'b telah meninggalkan keharuan yang abadi bagi penulis pemula tahun 70-an di Sumatera Utara. Benarlah apa yang dikatakan Bill Kowach, bahwa jurnalisme sangat berdekatan dengan konsep penciptaan komunitas.

Jurnalistik Digital

Pada awal abad ke-21 ini, informasi begitu bebas. Persoalannya, peranan jurnalisme sebagai penjaga gawang informasi tidak lagi dengan legas mendefenisikan peranannya. Sebagai misal, jika suatu media komunikasi tidak lagi menerbitkan sesuatu (kebijakan informasi), paling tidak salah satu situs internet akan melakukannya.

Ketika Newsweek menunda memberitakan skandal Monica Lewinsky, Matt Drudge maju mendahuluinya. Ketika skandal telepon genggam melibatkan politisi di Jakarta, media koran masih menahan diri (dengan pertimbangan kebijakan berita), tapi ramai-ramai media elektronik (intertainment) menayangkannya secara terus terang.

Peran komunikasi kabel dan munculnya internet menyebabkan wartawan tidak lagi memutuskan apa yang seharusnya diketahui publik. Dia membantu audiens mengerti secara runtut apa yang seharusnya mereka ketahui. Lebih tepat, jika disebut tugas pertama wartawan era baru adalah menelusuri apakah informasinya dapat dipercaya, lantas memutuskannya, sehingga pembaca bisa memahaminya secara efisien.

Hal ini mengakibatkan posisi wartawan menuju jurnalisme dua arah. Wartawan menjadi pemimpin diskusi. Audiens tidak hanya menjadi konsumen, melainkan "prosumen", sebuah persilangan antara konsumen dan produsen (S.Brown, 2006).

Pakar komunikasi Walter Lipmann (2006) menyatakan, orang kebanyakan tahu dunia secara tidak langsung melalui gambaran yang mereka buat di kepala mereka. Mereka menerima gambaran mental itu umumnya dari media. "Problemnya", demikian kata Lipmann, gambaran yang ada dibenak orang ini sangat menyimpang (distorsi)

dan tak lengkap". Gambaran ini dirusak oleh kelemahan pers yang tak dapat diubah kemampuan publik untuk memahami kebenaran yang sering terkalahkan oleh bias, stereotipe, kelalaian, dan ketidakpedulian manusia.

Pendapat tentang ketidakacuhan publik kepada media sebenarnya hanya mitos. Kenyataannya, orang-orang berinteraksi dengan berita. Dave Burgin menyebutnya sebagai teori keterkaitan publik.

Secara menarik teori Burgin menjelaskan ada tiga jenjang keterkaitan publik dalam setiap persoalan. Ada publik yang terlibat, dengan taruhan pribadi dalam sebuah persoalan. Ada publik yang berminat yang tak memilih peranan langsung dalam persoalan itu, tapi terpengaruh olehnya dan menanggapi dengan pengalaman tangan pertama.

Kemudian ada publik yang tak berminat yang menaruh perhatian kecil saja dan akan bergabung, jika ia memutuskannya. Teori keterkaitan publik bergantung pada isu yang dilaporkan suatu media.

Keterkaitan publik (sastra) dapat mengambil contoh apa yang dinyatakan Dave Burgin. Publik yang terlibat dan menaruh minat terhadap rubrik budaya/sastra. Minat dan antusiasme pembaca kuat apabila penjaga gawang sekaligus pengasuh memiliki keterlibatan yang total untuk mengemas isi dan menyajikannya. Dia harus mampu membaca isu-isu aktual dan muncul dengan cara baru sekaligus cara menyajikan secara kultural dan kontekstual

Pengasuh rubrik budaya tetap konsisten mempertahankan independensinya dan tidak tergoda pada pesan sponsor untuk melibatkan diri pada wilayah politik praktis untuk menjatuhkan seseorang atau kelompok seniman. Bila ini muncul maka rubrik budaya tersebut akan ditinggalkan khalayaknya oleh karena kithah berkesenian itu telah dilanggar dan keluar dari wilayah proporsional berkesenian.

Pengaruh ruang budaya yang mengutamakan jurnalistik kultural telah berjasa menghiasi media surat kabar di Sumatera Utara. Misalnya Rusli A. Malem (Mimbar Umum), A.A. Bunga (Wahana, SIB), Herman KS (Sastra dan Seni Budaya), AH Soekardi (Rebana, Analisa), Asry's (Bina Bahasa dan Sastra, Sinar Pembangunan). Kemudian diteruskan oleh pengasuh wartawan generasi muda seperti Adi Mujabir dan Rudhy Faliskan, Sugeng Satya Dharma (Budaya,

Waspada), Suyadi San (Harian Mimbar Umum) dan lain-lain. Kiprah dan sikap budaya mereka telah menyuburkan ladang penulisan fiksi dan nonfiksi di Sumatera Utara.

Terkadang untuk menyediakan ruang budaya sebagai barang komoditi pada setiap baris, surat kabar hampir menghilangkan ruang budaya akibat didasari oleh iklan alat kecantikan atau iklan berita duka cita. Bayangkan berita duka cita lebih diberi prioritas untuk dimuat dibandingkan rubrik bahasa, puisi dan esei sastra (karena ada duitnya) dibandingkan sebuah sastra yang harus mengeluarkan honor penulis.

Pertumbuhan untuk membuka ruang budaya yang merupakan sosok kultural dalam pembinaan minat penulis dalam budaya baca adalah wajar dalam proses membangun bangsa sebagaimana ditulis Ayib Bakar (1983), seniman bertolak dan citra manusia yang utuh, dan wartawan bertolak dari fakta.*

Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Resmi

A. Landasan Hukum dan Undang-undang Kebahasaan:

- (1) UUD 1945, Bab IV, Pasal 36 tentang bahasa negara
- (2) TAP MPR No.II, Tahun 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
- (3) Instruksi Mendagri Nomor: 20 Tahun 1991
- (4) Instruksi Menteri P dan K Nomor 1 Tahun 1992
- (5) UU Bahasa No,24 Tahun 2009

B. UU Bahasa (No.24/2009) tentang Ketentuan Penggunaan bahasa Indonesia resmi;

Pasal 29 : Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional.

Pasal 30 : Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi resmi.

Pasal 33 : (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja Pemerintah dan swasta

C. Komunikasi Administrasi

Ada dua komponen utama yang dibahas dalam buku ini ini.

Pertama, Administrasi.

Kedua, komunikasi

Pengertian administrasi dapat dibedakan pada arti sempit yakni ketatausahaan, dan arti yang luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bersama.

Pengertian Komunikasi: suatu proses penyampaian pesan dari suatu sumber kepada suatu penerima melalui suatu saluran untuk mencapai tujuan (Harold D Lasswell)

Sumber ialah: Yang memprakarsai komunikasi dapat berupa individu atau kelompok

Penerima ialah: pihak yang menerima pesan. Sebaiknya komunikasi itu berpedoman kepada sipenerima.

Saluran ialah: alat untuk menghubungkan sumber dengan penerima. Sipenerima memiliki panca indra dan dapat menggunakan alat elektronik (ponsel, computer, televisi, radio, video), media tulis (surat, buku, maklumat, slogan, plakat) media cetak (surat kabar, majalah, buku), media tradisional (meriam, kentong, tabuh, gendang, canang, dsb)

Pengaruh/hasil: perubahan tingkat laku pada sipenerima. Misalnya pengetahuan bertambah. Sikap (berbalas) dan perbuatan (berubah)

Pesan ialah: reaksi yang dari dan oleh suatu sumber kepada sipenerima. Pesan dapat berupa kata-kata (verbal) dan bukan kata-kata (nonverbal) dan dapat berupa bahasa tubuh (*bodi language*). Jenis bahasa itu bermacam-macam (bahasa isyarat, suara, simbol warna/lampu lalu lintas, bunyi, aroma dan bau. (masuknya kupu-kupu kerumah ada juga maknanya).

Ada empat jenis sumpan balik (Feedback) dalam surat-menyurat

1. Umpan balik kosong (zero feed Back)
2. Umpan balik netral (neutral feed back)
3. Umpan balik negatif (negative feed back)
4. Umpan balik Positif (positive feed back)

D. Materi Bahasa Surat Sebagai Komunikasi Resmi

Defenisi bahasa surat	Surat selembat lebih yang berisi pesan yang disampaikan kepada pihak kedua/orang lain	Jenis surat: Surat dinas Surat resmi Surat niaga Surat biasa	Buat contoh dan ciri-ciri pembeda surat tsb.
Fungsi surat	Sebagai bukti sejarah Sumber pedoman kerja Sebagai duta/gambaran mentalitas seseorang	Surat-surat sultan/raja Surat keputusan Surat pribadi/kelompok	Surat sultan Serdang kepada sultan Deli Surat raja Aceh kepada sultan Deli, dsb
Format surat	Format lurus penuh Format lurus Format setengah lurus Format lekuk	Gambar/sket bentuk surat	Surat-surat Biro Fakultas di lingkungan UISU
Bagian-bagian surat	Surat berkepala	Sepuluh bagian surat	Contoh/ambil surat resmi UISU
Isi surat	Paragraf pembuka Paragraf isi Paragraf penutup	Buat contoh surat	Surat-surat UISU
Ragam Penampilan	Ragam mendatar Ragam menurun Ragam mendaki Ragam melayang	Diksi bahasa surat	Contoh: Memohon Meminta Memanjatkan doa /menyampaikan doa
Paragraf pembuka	Diksi dan komposisi	Dikhabarkan Disampaikan Diberitahukan	Pemilihan kata sesuai dengan

			posisi/kedudukan sipenerima surat
Paragraf isi	Diksi dan komposisi	Jelas maksud Tepat pemakaian kata Ringka suraiannya Santun /beretika	Contoh surat-surat fakultas di lingkungan UISU
Paragraf penutup	Diksi dan komposisi	Atas perhatiannya Atas perhatian Sdr. Sebelum dan sesudahnya Harap menjadi maklum	Diucapkan ribuan terimakasih Disampaikan jutaan terimakasih Semoga menjadi periksa
Bahasa yang baik dan benar	Baik: bersistem, teratur Benar: berasio, logis, dan Bernalar, dan beretika	Pada hari yang baikini yang mana, kita sampaikan di mana kita sudah melaksanakan ujian...	Seharusnya” Pada hari ini kita sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan ujian..
Penggunaan kata baku dalam surat-menyurat	Februari- Pebruari Senin-senen Mengubah- merubah Pikir-fikir; jaman-zaman	Wasalam-wassalam Waktu dan tempat kami persilakan!	Sesuai dengan surat rektor (b) Sesuai surat rektor (TB)

Jenis-jenis surat	Contohnya	Pemakaian yang baku/ benar
1. Surat dinas biasa	Pemberitahuan, penjelasan, permintaan Pernyataan	Pakailah standar/baku!
2. Nota Dinas	Antar pejabat, antar unit: permintaan, penjelasan, atau keputusan	Pakailah bahasa yang baku!
3. Memo	Memo: alat komunikasi yang 'informal' tetapi isinya menyangkut kedinasan	Bahasa baku
4. Surat Pengantar	Surat dinas biasa yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat	Pakailah bahasa baku/baik dan benar!
5. Surat Edaran	Surat Edaran berisi petunjuk, penjelasan, juklak/ perintah yang sudah ada	Pakailah bahasa yang baik dan benar!
6. Surat Undangan	Permintaan bahwasani penerima datang pada waktu, tempat, dan acara yang telah ditentukan (jam, dan pukul)	Pakailah bahasa yang baik dan benar!
7. Surat Tugas	Suatu perintah yang harus dikerjakan dan dilaksanakan	Bahasa ringkas, jelas dan tepat (diksi dan ejaan)

Karakteristik Bahasa Indonesia Hukum

A. Kejelasan Makna

Dalam kenyataannya Bahasa Hukum tidak terlalu memperlihatkan sifat dan ciri Bahasa Indonesia dalam strukturnya. Keadaan yang demikian ini timbul karena hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya didasarkan atau diilhami oleh hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan tertulis dalam bahasa Belanda pula. Bahasa Hukum adalah bahasa hasil terjemahan bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia yang kadang-kadang terlihat sifatnya terlalu harafiah. Selain itu Bahasa Hukum menggunakan kalimat yang terlalu panjang, sebuah kalimat sering terdiri dari beberapa baris padahal sebenarnya kalimat tersebut dapat dipecah menjadi beberapa kalimat yang pendek, tanpa mengurangi makna yang diungkapkan dalam kalimat tersebut. Akibatnya timbul anggapan bahwa Bahasa Hukum itu mengungkapkan keaslian Bahasa Indonesia seolah-olah Bahasa Hukum itu bahasa yang roempunyai corak tersendiri yang tidak sejalan dengan bahasa umum yang digunakan dalam masyarakat. Konsekuensinya Bahasa Hukum menjadi bahasa yang sukar dipahami. Contoh: Ada kalimat yang terlalu panjang di dalam Bahasa Hukum dan sangat sukar dipahami oleh kalangan awam dapat kita lihat dari Pasal 282 KUHP yang berbunyi:

1. *Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar*

perasaan kesopanan, maupun membuat membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu swat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

2. *Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.*

Dari contoh diatas dapat dilihat penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan sukar dimengerti sehingga tidak mencerminkan bahasa yang bersifat keilmuan, karena tidak mengandung ciri-ciri bahasa ilmiah. Menurut Moeliono (1974) bahasa ilmiah mempunyai ciri dan sifat-sifat sebagai berikut:

1. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan kesamaan.
2. Objektif dan menekan prasangka pribadi.
3. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpang-siuran.
4. Tidak beremosi dan menjauhi taksiran yang bersensasi.
5. Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya dan juga paparannya berdasarkan konvensi.
6. Gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatik.
7. Gaya bahasa keilmuan bercorak hemat hanya kata yang dipakai.
8. Bentuk makna dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang dimiliki kata bahasa.

Faktor lain yang menyebabkan lemahnya Bahasa Indonesia Hukum adalah karena Kamus Bahasa Indonesia sendiri kurang tajam menafsirkan berbagai istilah-istilah hukum. Apabila kita lihat Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan Poerwadarminta tentang apa yang disebut hukum, akan ditemukan keterangan sebagai berikut:

1. Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.
2. Segala Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatuf pergaulan hidup di masyarakat (Poerwadarminta, 1976:363).

Ketidaktajaman penafsiran istilah disini jadilah dengan adanya kata-kata semua "peraturan" yang termasuk ke dalam pengertian hukum, padahal harus diketahui bahwa peraturan tidak semuanya merupakan hukum mengandung norma. Jadi kekaburan pengertian ini kurang memenuhi persyaratan bahasa ilmiah sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeliono di atas.

Untuk menghindari kesalahpahaman, pengertian Bahasa Hukum memerlukan kejelasan makna. Dalam kejelasan makna ini terkandung pengertian bahwa gagasan dan ungkapan yang disampaikan menuntut ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan dalam penalaran serta pemilihan kata maupun kalimat. Jadi, jelas bahwa penyusunan suatu kalimat tentang Bahasa Hukum harus dapat dimengerti dan dipahami oleh penerima. Disamping itu kalimat harus disusun secara cermat seksama sehingga dapat dinalar atau dipahami dengan baik. Misalnya, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi:

"Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

1. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.
2. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar".

Dari contoh pasal di atas dapat dilihat bahwa kalimat tersebut mengandung kejelasan makna, di dalamnya termuat unsur-unsur seperti ketelitian dalam penyusunan kalimat, kecermatan, dan keseksamaan sehingga dengan membaca pasal tersebut orang akan memahami bahwa yang dimaksud dengan kondisi lingkungan adalah potensi kawasan baik berupa ekosistem, kekhususan jenis tumbuhan dan satwa maupun peninggalan budaya yang ada dalam kawasan

tersebut. Kejelasan makna dalam Bahasa Hukum berkaitan erat atau menyangkut dengan praktik hukum yang dibedakan dari 2 (dua) aspek utama yaitu:

1. Pembentukan hukum
2. Penerapan hukum

Dalam pembentukan hukum, bahasa menjadi primadona atau hal yang utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebab lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum bermula dari lemahnya penggunaan Bahasa Hukum yang benar dalam perancangan sarana hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia.

Perlu dipahami bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, undang-undang berfungsi sebagai komponen dasar untuk menata dan menertibkan masyarakat, memberikan kepastian, memberikan jaminan akan hak dan kewajiban. Pemahaman semacam ini mempunyai "justifikasi" atau pembenaran manakala peraturan perundang-undangan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Untuk itu undang-undang sebagai komponen dasar dalam kehidupan manusia harus dijemakan dalam wujud keserasian antara nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat. Dalam hal ini yang menyangkut dengan pembentukan hukum secara benar merupakan suatu hal yang perlu dipikirkan tentang pemakaian bahasanya. Di sini timbul pertanyaan "Bagaimana pembentuk undang-undang dapat menguasai bahasa dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut hendaknya jangan diartikan secara sempit penguasaan bahasa di sini dimaksudkan baik sebagai penguasaan ilmiah maupun sebagai penguasaan seni yang menyangkut dengan penguasaan retorika. Penguasaan bahasa sebagai ilmiah, berarti bahwa pembentuk undang-undang menguasai ilmu pengetahuan mengenai perancangan undang-undang dengan memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penguasaan sebagai seni pembentuk undang-undang memahami dan menguasai teknik penguasaan bahasa Indonesia yang tersusun baik yakni bahasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pengetahuan bahasa dan penguasaannya sangat penting bagi perancangan undang-undang, sebab dalam merancang undang-undang sebagai sarana hukum, penekanannya tidak semata-mata

mengenai pengetahuan teknik tentang rancangan undang-undang tersebut, melainkan yang lebih penting adalah pengetahuan bahasa.

Apabila hasil rancangan undang-undang tersebut dikehendaki berlaku secara efektif di dalam masyarakat, undang-undang harus mampu dijadikan sebagai sarana komunikasi yang berisi pesan yang dapat dimengerti oleh semua orang. Untuk mencapai tujuan dimaksud, rumusan undang-undang tersebut harus disusun dalam bahasa yang mudah dimengerti, dengan perkataan lain undang-undang sebagai sarana hukum baik sebagai alat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat maupun sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di tengah masyarakat melibatkan bahasa sebagai pangkal tolaknya. Persoalannya di sini adalah bahasa yang bagaimana bisa digunakan untuk menyusun undang-undang agar dapat bekerja secara efektif. Jawabannya adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang mempunyai makna yang jelas. Mengacu kepada hal tersebut di atas kejelasan makna dalam Bahasa Hukum memegang peranan yang sangat penting dengan adanya kejelasan makna tersebut masyarakat dapat memahami dengan baik maksud dari undang-undang yang dikeluarkan. Pemahaman ini pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Dalam hal inilah peran mahasiswa hukum sangat dituntut sebab seorang sarjana hukum baik ia sebagai ilmuwan hukum maupun sebagai praktisi hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum.

B. Kepaduan Pikiran

Hukum sebagai bahasa ilmiah mengandung kepaduan pikiran dalam perumusan kalimat-kalimatnya. Perumusan kalimat merupakan kebulatan dari unsur-unsur yang menunjukkan peraturan yang jelas, kelugasan dalam gaya yang dinyatakan dengan corak yang deskriptif dan analitis. Perumusannya bersifat pemberian norma yang mengikat dan mengandung perintah atau larangan, izin dan dispensasi. Mengingat bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ditulis di dalam peraturan perundang-undangan, adakalanya merupakan terjemahan dari konsep dan kalimat yang terdapat di dalam bahasa asing banyak mengandung pengertian yang berbeda. Contohnya, pengertian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Allot dalam bukunya *The Limit of Law* membedakan antara:

Law : The general idea or concept of legal institutions abstracted from any particular occurrence of them.

Di sini berarti bahwa hukum merupakan konsep umum dari lembaga hukum yang diabstraksikan dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa khusus atau merupakan asas-asas yang sifatnya abstrak.

Law : a coherent total particular legal system prevailing in a given community /country.

Di sini hukum diartikan sebagai suatu sistem undang-undang secara menyeluruh yaitu yang berkaitan dengan hukum positif.

Law : a particular normative provision of law a rule or norm of a given legal system,

Di sini hukum merupakan suatu fenomena dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan bahasa terjemahan secara harafiah yang bersumber dari bahasa asing yang tidak memenuhi kaidah hukum bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bahasa Indonesia Hukum, di samping tersusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan juga dimuat dalam bentuk perjanjian kontrak, akta, dan putusan pengadilan. Bahasa perundang-undangan ataupun bahasa putusan pengadilan kalimatnya disusun panjang-panjang dan bertele-tele sulit untuk dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Apabila kita telah lebih lanjut memahami berbagai istilah Bahasa Hukum yang ada dalam putusan pengadilan, banyak sekali putusan-putusan pengadilan tersebut yang menggunakan bahasa Latin atau bahasa Belanda. Bahasa asing tersebut, sebagian di antaranya sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, namun bahasa yang diterjemahkan itu masih banyak yang belum terpola sehingga tidak mencerminkan kepaduan pikiran. Contohnya, Bahasa Hukum yang berbunyi putusan "in absentia". Kata tersebut berasal dari bahasa Latin diterjemahkan dalam beberapa pengertian yaitu ada yang menerjemahkan "putusan tanpa hadirnya terdakwa", ada yang menerjemahkan "putusan di luar hadirnya terdakwa". Demikian juga halnya dalam bahasa perundang-undangan seperti kata "diktum", kata ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "amar" tetapi masyarakat masih perlu untuk mengetahui yang dimaksud dengan pengertian "amar" itu sendiri. Di sini jelas terlihat bahwa belum

adanya suatu kepaduan pikiran karena kata-kata "amar", masih bisa, diterjemahkan sebagai isi suatu keputusan atau sebagai perintah. Contoh lain dapat dikemukakan, seperti kata "eksepsi", kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu, "*exceptio*" apabila diterjemahkan dalam Bahasa Hukum mempunyai pengertian, sebagai berikut:

1. Eksepsi berarti "sanggahan" terhadap suatu dakwaan.
2. Eksepsi berarti "menyangkal" atau "sangkal" terhadap suatu dakwaan.
3. Eksepsi berarti "tangkisan".

Dari contoh di atas terlihat bahwa tidak adanya kepaduan pemikiran dalam penggunaannya. Seorang terdakwa yang dituntut di pengadilan atau seorang pengacara yang memberi bantuan hukum terhadap kliennya masih harus berfikir apakah ia akan menggunakan kata sanggahan, tangkisan atau sangkal. Bahkan lebih rumit lagi Bahasa Hukum yang dipakai dalam putusan-putusan pengadilan ada istilah-istilah asing seperti "*inkracht gewijsde*" atau sering disingkat "*inkrachf*" saja. Pengertian in kracht di sini dapat berarti "putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap". Akan tetapi, ada yang menerjemahkannya dengan "keputusan yang mempunyai kepastian hukum".

Sampai saat ini masih banyak Bahasa Hukum yang dipergunakan dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan yang kalimatnya disusun panjang-panjang dan diulang-ulang sehingga apabila dibaca sekali saja pembaca tidak akan mengerti apa yang dimaksud kalimat tersebut. Kalimat seperti itu sering di temui dalam berbagai peraturan perundang-undangan apakah itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan terjemahan bahasa Belanda. Demikian juga halnya dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan setelah Indonesia merdeka banyak pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang kurang dimengerti maksudnya. Bahkan, walaupun telah dibaca penjelasan pasal tersebut kita belum juga memahami apa yang dimaksudnya.

Bahasa Hukum sebagai bahasa ilmiah harus disusun secara cermat dan tepat, mudah dipahami dan mempunyai kesatuan makna yang jelas. Apakah bahasa perundang-undangan atau bahasa putusan pengadilan disusun secara jelas dengan kalimat yang tidak terlalu

panjang, serta menghindari pemuatan berbagai istilah-istilah asing yang terjemahannya mempunyai arti ganda, orang akan mudah mengerti dan memahami apa yang dimaksud oleh peraturan atau putusan pengadilan tersebut, tidak menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan masyarakat.

C. Kelugasan

Bahasa Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bahasa resmi Bahasa Hukum digunakan untuk menulis atau mengomunikasikan fungsi-fungsinya yang terdapat dalam hukum, baik fungsi hukum sebagai pengatur pergaulan hidup bermasyarakat, penjaga ketertiban maupun untuk menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat. Orang memang layak menaruh kepercayaan kepada hukum dan karena itu memakainya untuk mencapai berbagai tujuan sosial. Secara khusus hal itu berlaku bagi bangsa Indonesia yang secara konstitusional mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata. Melalui otoritas dan kelengkapan yang ada padanya hukum menjanjikan untuk menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa hukum ada suatu ciri pembeda yang cukup legas salah satu di antaranya adalah kesatuan makna. Di dalam Bahasa Indonesia pada umumnya satu kata bisa mempunyai beberapa arti sedangkan di dalam Bahasa Hukum, hal tersebut sedapat mungkin dihindari. Menyadari bahwa Bahasa Hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan Bahasa Indonesia, dalam pembahasan ini dirasa perlu untuk membahas kelugasan pemakaian Bahasa Hukum. Hal ini sangat penting mengingat bahwa untuk dapat menegakkan hukum secara baik, aspek kelugasan dalam pemakaian bahasa merupakan salah satu komponen utama yang perlu mendapat perhatian. Rasionya bahasa merupakan alat yang dipergunakan untuk merumuskan komponen substansi hukum itu. Di samping itu, kelugasan bahasa berkaitan erat dengan politik pembinaan bahasa dan politik pembangunan hukum kita. Hukum sebagai aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, hendaknya disusun dengan Bahasa Hukum yang mudah dimengerti yaitu bahasa yang benar meliputi unsur-unsur ketepatan, kecermatan, dan kejelasan ungkapan Bahasa Hukum bukan bahasa lain, tetapi bahasa khusus dalam arti Bahasa Indonesia umum yang hanya

dipergunakan dalam bidang hukum. Hal ini berarti bahwa Bahasa Indonesia Hukum tidak boleh meninggalkan tata bahasa, ilmu asal-usul kata arti kata maupun ilmu tentang kalimat dari Bahasa Indonesia. Walaupun dituntut hal yang demikian tidak dimaksudkan agar sarjana hukum menjadi sarjana bahasa sekaligus. Sarjana hukum hanya dituntut untuk menggunakan semua aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa apabila ia berbicara tentang hukum.

Kelugasan pemakaian bahasa dalam menetapkan aturan-aturan hukum memerlukan berbagai pendekatan. *Pertama*, pendekatan dari sudut bahasa, yaitu harus dipahami kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar, sehingga setiap kata dan kalimat mempunyai pengertian yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. *Kedua*, pendekatan dari sudut hukum, yakni memahami dengan sesungguhnya pokok substansi hukum yang dibicarakan menyangkut berbagai fenomena masyarakat. *Ketiga*, pendekatan dari segi psikologi massa yaitu perlu diketahui dengan siapa hukum itu dibicarakan atau dengan kata lain harus dilihat dan dinilai apakah orang yang menerima komunikasi tersebut memahami apa yang dibicarakan. Jika ketiga pendekatan ini dapat digunakan pembaca tidak mengalami kesulitan untuk mengomunikasikan hukum.

Secara harafiah, kelugasan dapat diartikan dengan kesahajaan atau kesederhanaan. Sebagai contoh aturan perundang-undangan yang mengandung kelugasan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 yang menyebutkan:

1. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Dari contoh tersebut di atas dapat dilihat bahwa bahasa yang digunakan cukup sederhana dan mudah dipahami. Kelugasan bahasa seperti ini dapat dikonsumsi atau dipahami oleh setiap orang tanpa melihat tingkat pendidikannya. Kelugasan bahasa dapat mendukung terlaksananya penegakkan hukum dengan baik, karena aturan-aturan hukum tersebut mudah dikomunikasikan dan mudah dimengerti masyarakat.

D. Keresmian

Keresmian di dalam penggunaan bahasa sudah dimulai sejak lahirnya Sumpah Pemuda yang menyatakan "Berbahasa satu yaitu Bahasa Indonesia". Implikasi Sumpah Pemuda tersebut menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa kenegaraan, bahasa perundang-undangan. Mengingat fungsinya yang demikian, maka Bahasa Hukum yang digunakan seyogianya merupakan bahasa resmi yaitu yang kata-kata dan susunan kalimatnya terbentuk dari kata-kata yang sudah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Bahasa Hukum tidak bisa dilepaskan dari Bahasa Indonesia. Mengingat Bahasa Hukum merupakan bahasa yang khusus, Bahasa Hukum juga mempunyai keresmian dalam gaya bahasanya hal ini dicerminkan dalam berbagai peraturan tertulis baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Sebagai contoh dapat dikemukakan di bidang hukum perdata yang menyangkut dengan jual beli. Dalam hukum perdata lembaga jual beli merupakan suatu lembaga yang diatur dengan undang-undang yang dimuat dalam Pasal 1519 sampai dengan 1532 KUH Perdata dalam Bahasa Hukum, bahasa daerah maupun Bahasa Indonesia telah mendapat kedudukan yang resmi dalam pemakaiannya, dengan perkataan lain apabila orang berbicara mengenai jual beli, sudah jelas menyangkut dengan perjanjian untuk mengalihkan suatu benda dengan nilai tukar tertentu.

Pentingnya kedudukan Bahasa Hukum ditunjukkan dengan adanya pemakaian bahasa resmi di dalam berbagai dokumen, keputusan-keputusan maupun berbagai literatur hukum. Di dalam hukum, bahasa harus dapat menyampaikan informasi dengan sebaik-baiknya. Komunikasi itu harus disampaikan dengan jelas, maksudnya makna yang terkandung di dalamnya dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Umpamanya apabila seorang penulis mengomunikasikan suatu karya ilmiah di bidang hukum yang berisi suatu pengetahuan yang ingin dikomunikasikan dengan pihak lain, penulis bukan saja harus dapat menyampaikan pikiran-pikiran tersebut secara teratur tetapi juga harus mampu mengomunikasikan dan mengekspresikan sikap dan perasaannya. Hal inilah yang menyebabkan bahasa terus berkembang karena pengalaman dan pemikiran manusia tentang apa yang dikomunikasikannya. Bahasa diperkaya oleh seluruh lapisan

masyarakat yang mempergunakan bahasa tersebut, apakah ia ilmuwan, pendidik, ahli politik dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan Bahasa Hukum, diperkaya oleh orang-orang yang bergerak di bidang hukum, apakah ia praktisi hukum seperti hakim memperkaya bahasanya dalam putusan-putusan resmi yaitu putusan pengadilan, Jaksa memperkaya Bahasa Hukum melalui dakwaan dan tuntutananya, Pengacara memperkaya Bahasa Hukum melalui pledoinya, Legal Drafting atau Pembentuk Undang-Undang menambah perbendaharaan Bahasa Hukum yang dituangkan dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan.

E. Latihan dan Tugas Mandiri

1. Jelaskan karakteristik bahasa hukum dalam aspek.
 - a. Kejelasan
 - b. Kepaduan
 - c. Kelugasan
 - d. Keresmian
2. Apa tantangan ke depan terhadap bahasa hukum Indonesia?
3. Mengapa kamus Bahasa Indonesia belum memberikan secara tepat definisi hukum?
4. Apa kira-kira solusi yang dapat diberikan agar perkembangan bahasa hukum Indonesia lebih mudah dipahami oleh masyarakat?

Peribahasa Hukum

1. Tenggelam berdua, basah seorang = Keputusan yang takadil yang dijatuhkan pada seseorang
2. Seperti sembunyi puyuh, kepala tersuruk ekor kelihatan.= Kejahatan yang disembunyikan ketahuan juga.
3. Adat dunia balas membalas, syariat palu-memalu.= Setiap perbuatan dan Tindakan meminta pembalasan dan keputusan.
4. Akar terjumbai tempat siamang berpegang, dahan menganjur tempat tupai menegun = Perkataan orang yang bersalah dapatlah hakim mencari dan melacak kesalahannya.
5. Tangan mencencang, bahu memikul.= Yang bersalah harus menjalani hukuman.
6. Datar seperti lantai. Licin seperti cermin.= Putusan hakim yang tak dapat diganggu gugat.
7. Menebas buluh serumpun = Memberantas suatu kejahatan sampai tuntas.
8. Rumah sudah pukul dibunuh.= Hukum yang sudah diputuskan tidak dapat diganggu-gugat.
9. Pada yang besar pakailah baji, pada yang kecil pakailah pasak.=Setiap human haruslah disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukannya.
10. Nyamuk mati gatal tak hilang.= Menaruh dendam meskipun perkara sudah diselesaikan.
11. Curi maling terluang dinding, tikam bunuh pedang berdarah.= Bukti criminal yang telah jelas.
12. Betapa lurus paku, ujungnya berkelok juga.= Orang yang jahat itu biarpun kata-katanya baik, tetap maksudnya jahat.

13. Salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas.
=Kesalahan dihukumkan menurut kadarnya atau menurut sesuatu yang ditetapkan.
14. Jika salah sebatang, dicabut. Salah serumpun dibongkar. Salah separak dirambah.= Menyelesaikan masalah secara tuntas.
15. Moncong penuh berisi air, perut berisi batu.= Hakim yang tidak dapat menyatakan sikap karena sudah disuap/disogok.

Petunjuk Soal:

1. Bacalah dengan seksama peribahasa di atas tentang makna dan maksud peribahasa tersebut.
2. Buatlah sebuah narasi /kisah dalam beberapa kalimat dalam satu paragraf dengan mengambil /memilih peribahasa di atas sebagai kalimat utama!
3. Buatlah sebuah narasi dengan beberapa kalimat pendukung dalam satu paragraf dengan mengakhiri kalimat utamanya pada akhir paragraf.

Berbahasa Dengan Bernalar

Apakah sesungguhnya yang disebut nalar? Bagi guru, nalar adalah pelatihan intelektual untuk mengembangkan akal budi anak didik. Bagi advokad, nalar adalah cara membela dan menyanggah kesaksian. Bagi ekonomi, nalar adalah membagi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi, daya guna, dan keuntungan. Bagi ilmuwan, nalar adalah metode merancang percobaan untuk memeriksa hipotesis.

Dalam buku Donald. B Calne (2004) dengan mengutip Nicholas Rescher, "Bersikap rasional berarti menggunakan kecerdasan untuk menggunakan tindakan terbaik dalam suatu keadaan". Nalar sanggup menyajikan peluang terbesar untuk berhasil mencapai tujuan. Jika inteligensi mencakup seluruh kemampuan intelektual, maka nalar adalah salah satu bagiannya. Nalar lebih merupakan fasilitator daripada inisiator, kita memakai nalar untuk mendapat apa yang kita mau, bukan untuk menentukan apa kita mau. Naluri mendorong kita mendorong untuk mencari makanan ketika kita lapar, jika makanan langka, maka nalar digunakan sebagai sarana untuk menemukan makanan. Jadi, nalar adalah alat dan sebagaimana juga matematika sebagai nalar.

Nalar dan Asuransi.

Pada umumnya nalar "manjur" untuk membantu kita mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan sesuatu yang kita mau. Contoh, kita ingin tahu sampai kapan kita bertahan hidup Demikinn juga dengan perusahaan asuransi jiwa. Setelah memeriksa

kenyataan rasional kita tahu, bahwa harapan hidup dipengaruhi oleh sejumlah variabel, seperti usia, berat badan, jenis kelamin, sejarah kesehatan keluarga, pekerjaan, pola makan, merokok, dan minuman keras.

Uji darah dan sinar X dapat meningkatkan ketepatan. Perusahaan asuransi jiwa meraup banyak keuntungan berkat penggunaan nalar dan ilmu kedokteran dan ilmu statistik. Mereka tidak menyewa tukang ramal. Apa yang membedakan dokter dengan tukang ramal?

Keduanya mengaku memiliki keahlian khusus, tetapi mereka menggunakan metode yang berbeda. Tukang ramal bekerja secara irasional, artinya tidak konsisten. Sebaliknya ahli kedokteran memakai sistem teruji, dan umumnya mereka konsisten. Pokoknya mereka memakai metode rasional.

Bahasa yang Bernalar

Sering pembaca melihat tulisan yang dipampang di depan rumah atau toko yang bertuliskan "Rumah ini mau dikontrakkan". Maksud tulisan itu jelas bahwa dapat dikontrakkan oleh siapa saja yang membutuhkannya. Namun, ada kejanggalan dalam tulisan itu. Di mana letak kejanggalannya? Kata mau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna (1) sungguh-sungguh suka dan berkehendak; (2) akan; hendak (3) kehendak; maksud. Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut.

- (1) Paman, mau membeli rumah di kompleks Setia Budi.
- (2) Kecelakaan itu seharusnya dapat dihindari, jika supir mau mengindahkan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Saya mau mengambil buku di rumah si Badu.

Kata *mau* pada kalimat (1) mempunyai makna 'suka akan sesuatu', yaitu rumah di kawasan Setia Budi, sedangkan kata mau pada kalimat (2) mempunyai makna 'sungguh-sungguh suka berbuat sesuatu' yaitu mengindahkan peraturan lalu lintas. Akan halnya kata mau pada contoh (3) mengandung makna 'akan'.

Bagaimana dengan mau pada mau dikontrakkan? Kata mau pada rumah ini mau dikontrakkan, tidak tepat digunakan, karena rumah tidak memiliki kemauan atau kehendak. Subyek benda mati (rumah, sampan, gula) pada kalimat (4) rumah ini mau dijual (5) sampan itu mau karam, (6) Gula ingin saya beli, tidak bernalar.

Kalimat tersebut dapat diganti dengan "Rumah ini akan dijual", sampan itu akan karam, dan saya ingin membeli gula.

Ada dua kalimat lain yang dikacaukan penggunaannya, yakni 'dan sebagainya', dan 'dan lain-lain'. Contohnya diturunkan di bawah ini:

(7) Binatang mamalia yang makan rumput adalah sapi, kuda, kerbau dan sebagainya. (8) untuk membuat kandang ayam saya memerlukan paku, kawat, papan dan lain-lain.

Bentuk **dan sebagainya** digunakan apabila hal yang ditambahkan itu sejenis dengan perincian sebelumnya. Benda yang diwakili oleh bentuk **dan sebagainya**. (7) adalah binatang sejenis sapi, kuda, kerbau yang termasuk jenis mamalia. Keragaman tambahan pada kalimat (7) diikat oleh kesamaan jenis mamalia.

Bentuk **dan lain-lain** digunakan apabila yang ditambahkan itu tidak sejenis. Benda yang diwakili bentuk **dan lain-lain** pada kalimat (8) adalah semua benda yang diperlukan orang untuk membuat kandang selain paku, kayu, dan kawat yang telah disebutkan. Oleh karena itu, cakupan bentuk **dan lain-lain** lebih luas daripada **dan sebagainya**.

Nyaris dan Hampir

Kata *nyaris* dan *hampir* mempunyai kemiripan makna. Keduanya menyatakan hal yang dekat dengan peristiwa atau keadaan tertentu. Perbedaannya ialah bahwa kata *hampir* bersifat netral, mungkin berkaitan dengan hal yang tidak diinginkan, mungkin pula tidak. Kata *nyaris* cenderung dikaitkan dengan peristiwa yang tidak diinginkan: bahaya, kecelakaan, kemalangan dan sebagainya.

(1) Mobil kami hampir kehabisan bensin sesampai di Kisaran. (2) Dua pesawat itu nyaris bertabrakan. (3) Sony Kuncoro nyaris mengalahkan Bao Cun Lai dalam pertandingan Thomas Cup (salah). Oleh karena nyaris dipakai untuk kecelakaan dan pertandingan bulutangkis bukan bersifat kecelakaan yang membawa kemalangan.

Manakah yang Benar, Inap atau Nginap?

Pemakaian bahasa pada papan nama bangunan umum, seperti rumah sakit, terminal bus, atau pasar termasuk pemakaian bahasa secara resmi. Oleh sebab itu, kaidah bahasa resmi harus diperhatikan. Salah satu contohnya terlihat pada kalimat berikut ini. Sekarang ini korban kecelakaan masih berada di instalasi rawat nginap.

Yang dimaksud dengan rawat nginap pada kalimat di atas adalah salah satu bagian dari rumah sakit yang menampung pasien yang tengah menjalani perawatan. Yang menjadi persoalan kita di sini adalah kata nginap. Bentuk gabungan kata digunakan sebagai istilah lazimnya bentuk yang paling ringkas. Kita mengenal bentuk ruang tunggu, jam kerja, unjuk rasa, atau jalan layang. Kita tidak menggunakan ruang menunggu, jam bekerja atau jalan melayang.

Jika bentuk berimbuhan harus digunakan untuk merumuskan konsep yang tidak dapat dituangkan dengan bentuk dasar, imbuhan yang digunakan harus sesuai dengan imbuhan yang dikenal dengan bahasa Indonesia. Misalnya perseoran terbatas, deposito berjangka dan massa mengambang. Bentuk dasar yang lebih ringkas yakni, sero terba'as, deposito jangka dan massa kembang tidak digunakan karena tidak mengungkapkan gagasan yang dimaksud secara tepat."

Bentuk nginap pada frasa rawat nginap bukan bentuk dasar dan bukan pula bentuk berimbuhan yang lengkap. Bentuk dasar yang sebenarnya adalah inap, dan bentuk berimbuhan dengan *meng-* adalah *menginap*. Jadi sebaiknya yang dipakai ialah instalasi rawat inap.

Kalimat Bermakna Ganda

Kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa, tetapi masih menimbulkan tafsiran ganda tidak termasuk kalimat yang efektif. Berikut contohnya. (1) Rumah sang jutawan yang aneh itu akan segera dijual. Frasa yang aneh di atas menerangkan kata rumah atau frasa sang jutawan? Jika yang aneh menerangkan rumah, kalimat itu dapat diubah menjadi: (1a) Rumah aneh milik sang jutawan itu akan segera dijual. Jika yang aneh itu menerangkan sang jutawan, kata yang dapat dihilangkan sehingga makna kalimat di atas menjadi lebih jelas (1b) Rumah sang jutawan aneh itu akan segera dijual.

Kalimat Bernalar

Dalam sebuah harian ditemukan baits seperti yang berikut. (1) Dalam lomba itu X dari Langkat keluar sebagai juara pertama. Juara kedua diduduki Y dari Asahan. Sepintas lalu kutipan itu terasa tidak aneh. Namun, jika kita mengamati lebih lanjut, akan timbul pertanyaan seperti ini, "Siapakah juara kedua yang diduduki Y itu?"

Artinya ada sesuatu yang mengganggu nalar berbahasa kita. Dalam kalimat pertama pada kutipan di atas, ada orang yang bernama X yang menjadi juara pertama. Tentu ada orang lain yang menjadi

juara kedua. Apakah orang yang menjadi juara kedua itu merupakan tempat duduk bagi Y?

Beberapa kalimat berikut ini dapat dijadikan pilihan untuk menggantikan kalimat kedua pada kutipan di atas. (1) Juara kedua adalah Y dari Asahan (2) Gelar juara kedua diraih oleh Y dari Asahan. (3) Tempat kedua diduduki Y dari Asahan.

Kalimat Berita

Berita sebagai informasi baru, ditulis dengan segera dan kadang-kadang sampai terburu-buru. Jika tulisan semacam itu durenungkan kembali, tidak jarang terdapat kesalahan, seperti pada kutipan berikut ini. (1) Upaya mencari titik temu masalah harga ini sampai kini belum juga terpecahkan. Pertanyaan yang segera timbul jika kita membaca kalimat itu adalah apakah suatu upaya dapat dipecahkan?

Jawabannya tentu tidak karena yang dapat dipecahkan biasanya berupa masalah. Tentang suatu upaya kita dapat mengatakan, misalnya, berhasil atau belum berhasil diatasi. Jadi, kalimat (1) di atas sebenarnya kurang tepat. Ubahan kalimat itu dapat diusulkan sebagai berikut. (1a) Upaya mencari titik temu masalah harga ini sampai kini belum juga berhasil. (1b) Masalah penentuan harga ini sampai sekarang belum juga terpecahkan.

UKBI

Keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama ini sulit diukur karena tidak tersedianya instrumen yang sah. Oleh karena itu, Pusat Bahasa memutuskan untuk mengembangkan instrumen yang diperlukan yang sekarang disebut Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI). Dengan instrumen ini, setiap orang diharapkan mampu memperoleh informasi yang lebih akurat tentang profil kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia. Dengan mengetahui kemampuan berbahasa Indonesia, peserta uji akan lebih mudah meningkatkan diri dalam kemahiran berbahasa Indonesia. UKBI menentukan tujuh peringkat kemahiran berbahasa Indonesia sebagai berikut, (1) istimewa, (2) sangat unggul, (3) unggul, (4) madya, (5) semenjana, (6) marginal, dan (7) terbatas. Materi UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan di dalam berbagai bidang, seperti sejarah, kebudayaan, hukum dan ekonomi. Dengan materi itu UKBI menguji kompetensi peserta dalam

berkomunikasi lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia yang baik yang menyangkut kemampuan reseplif (pemahaman isi wacana) maupun kemampuan produktif (yang berkaitan dengan ketrampilan menggunakan bahasa Indonesia, secara tulis dan lisan. Dengan semangat hari Kebangkitan Nasional tahun ini marilah kita cintai bahasa Indonesia sebagai upaya mencerdaskan bangsa.

Dengan materi ini UKBI menguji kompetensi peserta dalam berkomunikasi lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia yang baik yang menyangkut kemampuan reseptif (pemahaman isi wacana) maupun kemampuan produktif (yang berkaitan dengan ketrampilan menggunakan bahasa Indonesia, secara tulis dan lisan). Dengan semangat hari Kebangkitan Nasional tahun ini marilah kita cintai bahasa Indonesia sebagai upaya mencerdaskan bangsa.

Sistem Ejaan

Banyak yang menganggap ejaan berhubungan dengan bahasa lisan, seperti bagaimana mengeja sebuah kata atau nama. Sebenarnya tidak demikian halnya. Ejaan berhubungan dengan bahasa tulis. Bahasa menuliskan bahasa lisan, apa aturannya, tanda apa yang digunakan, apakah dengan huruf atau angka, dan sebagainya. Dari segi bahasa, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi bahasa (kata dan kalimat) dalam bentuk tulisan (huruf dan tanda baca).

Ejaan mempunyai sistem dan merupakan kesepakatan sematamata. Di dalam bahasa Indonesia, ejaan memakai tanda yang kita sebut aksara atau huruf, di samping bentuk lain, yaitu tanda baca (pungtuasi). Namun kesepakatan yang sudah dituangkan ke dalam bentuk pedoman, dan dikuatkan dengan keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543a/U/1987 tanggal 9 September 1987, perlu mendapat perhatian untuk tercapainya penggunaan bahasa yang teratur.

Berdasarkan garis-garis besarnya, ejaan bahasa Indonesia yang telah menjadi pedoman resmi itu meliputi kaidah pemakaian huruf, yaitu dari bentuk huruf abjad sampai dengan pemenggalan kata, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, yaitu dari bentuk kata dasar sampai dengan penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan unsur serapan (dan kata asing), dan pemakaian tanda baca yaitu tanda titik (.) sampai dengan tanda penyingkat (apostrof). Tanda-tanda itu dapat memengaruhi atau memperjelas

informasi yang ditulis melalui kalimat-kalimat, misalnya, ungkapan mesin potong tangan dapat bermakna ganda. Jika dilengkapi dengan tanda baca tanda hubung (--), ungkapan itu akan memberikan informasi yang jelas, yaitu *mesin - potong* tangan berarti '*mesin potong* yang digerakkan dengan tangan (sistem manual), sedangkan mesin potong-tangan berarti 'mesin yang khusus untuk memotong/mengarnputasi tangan'.

Sehubungan dengan penerapan ejaan dalam penulisan skripsi-skripsi mahasiswa di Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya di Fakultas Hukum, dapat diasumsikan bahwa mahasiswa belum dapat menguasai sepenuhnya ejaan bahasa Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan kesalahan penggunaan ejaan itu. baik karena kekurangpahaman maupun karena kebiasaan oengguna pribadi atau kebiasaan umum.

Perhatikanlah penulisan nama orang yang diikuti gelar akademik berikut ini (yang diambil dari halaman Pengesahan Skripsi):

H. AMRIZAL PULUNGAN.SH. (Herbert Mas Intan Smambela 1998)

H. Syaiful Anwar, SH (Deny Abdi Nasution 2000)

H. M YUNUS RASYID, SH. M.Hum (M. Yunus Tazryan (2001)

Hj. LELY ASNI SIREGAR, SH (Arizal 2004)

Tidak satu pun di antara keempat mahasiswa (kini sudah sarjana) itu dapat menuliskan nama orang beserta titelnya dengan benar. Sayangnya, sang dosen pun membiarkannya dengan langsung menandatangani saja. Mungkin si dosen pun tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang ejaan bahasa Indonesia.

Nama diri atau nama gelar yang disingkat huruf demi huruf harus ditulis dengan huruf kapital yang disertai dengan tanda titik. Di antara nama diri dan nama gelar akademik dibubuhi tanda koma. Hal itu dimaksudkan untuk membedakan gelar nama keluarga atau gelar akademik di belakang nama diri. Misalnya, nama *Sugiono S.H.* adalah *Sugiono Sastro Hardoyo* yang berbeda dengan nama *Sugiono, S.H.* adalah *Sugiono Sarjana Hukum*. Dengan demikian, nama-nama yang dituliskan di atas dapat diperbaiki sehingga sesuai dengan ejaan penulisan kata.

H. Amrizal Pulungan, S.H.

H. Syaiful Anwar, S.H.

H.M. Yunus Rasyid, S.H. M. Hum.

Hj. Lely Asni Siregar, S.H.

Pada kata pengantar juga keseragaman penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan. Memang karena demikian lazimnya, penulisan itu tidak lagi memperlihatkan kesalahan, bahkan informasinya cukup dapat dimengerti. Cobalah perhatikan penulisan ungkapan (*di atau pada*) *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* (oleh Herbert. Denny Abdi, Yunus Tazryan, dan Arizal). Tidak ada batas tanda koma di antara ungkapan-ungkapan yang menerangkan ungkapan di depannya. Seharusnya penulisan ungkapan itu lebih lengkap menggunakan tanda baca koma (*di atau pada*) *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan*.

Dalam pada itu, ada juga yang menggembirakan, khususnya penulisan nama kata ganti Tuhan yang diletakkan di balakang ungkapan sifat Tuhan. Semuanya sudah menggunakan huruf kapital dan fanda hubung. Perhatikan penulisan berikut:

Rahmat dan hidayah-Nya

Kasih sayang-Nya

Rahmat dan kasih sayang-Nya

Penulisan kata yang tampaknya sederhana juga merupakan masalah yang sering ditemukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kurang biasanya membuka kamus bahasa Indonesia dapat memicu penyampaian informasi yang keliru. Kata *abstrak* dan *abstraksi*, misalnya, jika tidak cermat memahami maknanya, akan digunakan secara keliru. Abstraksi merupakan proses, sedangkan abstrak adalah hasil dan proses itu. Jadi, kata yang harus digunakan dalam skripsi adalah abstrak yang merupakan hasil dari proses membuat inti sari seluruh isi skripsi.

Kekeliruan penerapan kaidah ejaan dapat terjadi karena kesulitan membedakan unsur kata depan (preposisi) dan imbuhan awalan (prefiks). Oleh karena itu, muncul penulisan dilingkungan, dimana, didalam, dan disekitar yang tidak memisahkan preposisi di dengan kata yang mengikutinya sebagai bentuk yang berstatus kata, preposisi di harus terpisah dengan kata yang mengikutinya: di lingkungan, di mana, di dalam, dan di sekitar.

Berikut ini didaftarkan kekeliruan penulisan kata atau ketidاكلengkapan penerapan kaidah ejaan dalam skripsi para mahasiswa FH, UISU, Medan, beserta bentuk perbaikannya.

No	Bentuk Salah	Bentuk Perbaikan
1	Bentuk yang tegaskan: "Tinjauan" "Hukum" "Tindakan Penyidikan" "Oleh Polri (Herbert, 1998:1)	Bentuk yang tegaskan: <i>tinjauan</i> <i>hukum</i> <i>tindakan penyidikan</i> <i>oleh Polri</i>
2	Hipotesa Tehnik teoritis disamping DR. Suhardjo, SH (Herbet 1998:29	hipotesa tehnik teoretis di samping Dr. Suhardjo, S.H.
3	Kata penghubung antarkalimat Selanjutnya... Menurut penulis... Selanjutnya....(Herbert 1998:41) Ditanda tangani	Kata penghubung antarkalimat Selanjutnya,... Menurut penulis,... Selanjutnya,...(Herbert 1998:41) Ditandatangani
4	baik secara perorangan maupun...	baik secara perseorangan maupun...
5	disini dikategorikan sesuatu barang disinilah di Pengadilan (Herbert 1998: 59)	di sini dikategorikan suatu barang di sinilah di Pengadilan
6	yaitu kasus Curas, Curanmor, Pemerkosaan, Pemukulan, dan Penganiayaan berat (Herbert 1998: 62) karena crime totalnya (Herbert 1998: 62)	yaitu kasus curas, curanmor, pemerkosaan, pemukulan, dan penganiayaan berat karena <i>crime</i> totalnya (kriminal)
7	disini wanitapun "Berasyik-masyuk" (Deny 2000:1)	di sini wanita pun <i>berasyik-masyuk</i>
8	Jadi tidak ada alasan disamping	Jadi, tidak ada alasan... di samping

No	Bentuk Salah	Bentuk Perbaikan
	diantara sebagaimana kita ketahui.... (Deny 2000:6)	di antara sebagaimana kita ketahui....
9	“crime” “misdad” “delik” formil anggota disekitar kejurang hitam (Deny 2000:14)	<i>crime, misdad, delik</i> formal anggota disekitar ke jurang (lembah) hitam
10	kawasan titi sungai ular diantaranya para waria-waria (Deny 2000: 52)	kawasan titi (jembatan) sungai Ular di antaranya para waria
11	analisa data dipertanggung jawabkan oleh Penulis teoritis (Deny 2000: 52)	analisis data dipertanggungjawabkan oleh penulis teoretis
12	wanita tuna susila memberitahu resiko (Deny 2000:52)	wanita tunasusila memberi tahu risiko
13	Berjudul: Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Lingkungan Hidup (Yunus 2001:5)	Berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Lingkungan Hidup”
14	diklasifikasikan menjadi: 1. Pencemaran udara; 2. Pencemaran air; 3. Pencemaran tanah; dan; 4. Pengrusakan hutan. (Yunus 2001:7)	diklasifikasikan menjadi; 1. pencemaran udara, 2. pencemaran air, 3. pencemaran tanah, dan 4. pengrusakan hutan.
15	maximum Rp. 50.000.000,- Rp. 1.000.000.000,- Kerja sama	maksimum Rp. 50.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 kerja sama

No	Bentuk Salah	Bentuk Perbaikan
16	tolak ukur kali Tapak Oleh karenanya perbuatan (Yunus 2001: 65-78)	tolak ukur Kali Tapak Oleh karena itu, perbuatan...
17	dimajukan oleh penasehat hukumnya dipungkiri (Arzal 2004:2)	diajukan oleh penasehat hukumnya dimungkiri (Arzal 2004:2)
18	bagi Jaksa Penuntut Umum hipotesa dimana Analisa	bagi jaksa penuntut Umum hipotesa di mana analisis
19	menyebarkan luaskan selama tiga (3) tahun yang dimaksud dengan putusan atau vonis hakim adalah, "putusan pengadilan...." (Arizal 2004:39)	menyebarkanluaskan selama tiga tahun yang dimaksud dengan <i>putusan</i> atau <i>vonishakim</i> adalah 'putusan hakim....'
20	namun Peraturan Perundang- undangan tersebut.... Mengakomodir Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa... Pada hakekatnya (Erlangga 2004: 83)	Namun, peraturan perundang-undangan tersebut.... mengakomodasi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa... Pada hakikatnya
21	melakukan peninjauan ke luar Provinsi rancangan Peraturan Daerah tersebut... Kerjasama (Erlangga 2004: 83)	melakukan peninjauan ke luar provinsi rancangan peraturan daerah tersebut... kerjasama
22	Tidak dapat dipungkiri, ketidak mampuan anggota...(Erlangga 2004: 94)	Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakmampuan anggota...
23	Kepmendagri No. 21 tahun 2001 Tentang Penyusunan Peraturan daerah Terorganisir (Erlangga 2004:96)	Kepmendagri, no. 21 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Terorganisasi

No	Bentuk Salah	Bentuk Perbaikan
24	respon amandemen (Erlangga 2004: 96)	respons amandemen
25	terorganisir justeru non fisik diatas dibidang (Dessy 2005: 1)	terorganisasi justru nonfisik di atas di bidang
26	yaitu “res” yang artinya kepentingan kata “public” yang artinya umum (Desy 2005: 9)	yaitu <i>res</i> yang artinya 'kepentingan' kata <i>public</i> yang artinya 'umum'
27	Dengan demikian maka sektor... Untuk itu tugas Bank Indonesia... Dengan konsisten, transparan dan kontinyu... (Dessy 2005: 27)	Dengan demikian, maka sektor... Untuk itu, tugas Bank Indonesia... Dengan konsisten, transparan, dan kontinyu...
28	praktek analisa (Dessy 2005: 27)	praktik analisis
29	Efektifitas Berbagai informasi, data dan keterangan guna.... (Dessy 2005: 55)	Efektivitas Berbagai informasi, data, dan keterangan guna....
30	Didalam pasal 12 (Hendro 2005: 5)	Di dalam pasal 12
31	Senada dengan pendapat diatas, menurut Muchlis Effendy bahwa: “Ada 4 hal yang dimiliki oleh otonomi yakni: 1. mempunyai aparatur sendiri	Senada dengan pendapat di atas, menurut Muchlis Effendy, ada empat hal yang dimiliki oleh otonomi, yakni: 1. mempunyai aparatur sendiri; 2. mempunyai wewenang/urusan sendiri;

No	Bentuk Salah	Bentuk Perbaikan
	2. mempunyai wewenang/urusan tertentu 3. mempunyai wewenang mengelola sumber keuangan sendiri, dan 4. mempunyai wewenang membuat kebijaksanaan. (Hendro 2005: 8)	3. mempunyai wewenang mengelola sumber keuangan sendiri, dan 4. mempunyai wewenang membuat kebijaksanaan....
32	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 1 (satu) Paling lama 10 (sepuluh hari) (Hendro 2005: 41)	calon gubernur dan calon wakil gubernur paling lama satu jam paling lama sepuluh hari

Bentuk Kata

Kalimat terdiri atas kata atau deretan kata. Bentuknya bermacam-macam, seperti contoh berikut ini.
Anak-anak belajar membahas soal.

Kalimat di atas terdiri dari empat kata, yaitu anak-anak, belajar, membahas, dan soal.

Keempat kata tersebut terdiri atas satu kata dasar, dua kata berimbuhan, dan satu kata ulang.

<i>anak-anak</i>	(kata ulang)
<i>belajar</i>	(kata berimbuhan)
<i>membahas</i>	(kata berimbuhan)
<i>soal</i>	(kata dasar)

Kata soal disebut kata dasar karena belum mengalami perubahan bentuk, baik melalui pengimbuhan, pengulangan, maupun penggabungan. Lain halnya jika dibandingkan dengan kata belajar dan membahas. Kedua kata tersebut masing-masing dihasilkan oleh kata dasar yang mendapatkan imbuhan. Selanjutnya, kata anak-anak merupakan sebuah kata yang dihasilkan melalui proses pengulangan.

anak (ulang)	→ anak-anak
ajar + ber	→ belajar
bahas + me	→ membahas

Pengubahan bentuk, baik yang berkenaan dengan pengimbuhan maupun pengulangan, seperti yang dikemukakan di atas merupakan sebagian contoh dari pembentukan kata. Pembentukan kata yang lain dapat melalui proses penggabungan kata dan pemajemukan. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan kata merupakan suatu kegiatan yang mengubah kata dasar menjadi kata baru atau kata jadian.

1. Bentuk Dasar

Bentuk dasar adalah bentuk yang mendasari proses pembentukan kata selanjutnya. Bentuk dasar ini sering disebut dengan kata dasar. Contoh: adik, tidur, di, kursi

2. Bentuk Terikat

Satuan bahasa yang tidak pernah dipakai secara tersendiri, tetapi selalu berdampingan dengan bentuk lain disebut bentuk terikat. Termasuk ke dalam kelompok ini, yaitu imbuhan (afiks) dan bentuk klitika.

Contoh:

Imbuhan: *awalan*: meng-, di-, ber-, ke-, ter-, pe-, per-, se-

sisipan: -er-, -el-, -em-

akhiran: -an, -kan, -i

gabungan: ke—an, ber—an, peng—an

kombinasi: meng--kan, meng-i, memper-kan, memper-i, ber-kan,

ter—kan, pe—an, per—an, se—nya.

Klitika: -lah, -kah, -pun, ku-, -mu, -nya

3. Pengimbuhan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan imbuhan pada bentuk dasar disebut pengimbuhan.

Contoh: meng- + apung → mengapung

ber- + karya → berkarya

ter- + hormat → terhormat

di- + pangkas → dipangkas

makan + -an → makanan

buang + -kan → buangkan

ke—an + mulia → kemuliaan

4. Bentuk Majemuk

Bentuk majemuk terbentuk lewat proses penggabungan kata. Dalam bentuk majemuk, deret dua kata atau lebih menghasilkan makna yang masih dapat dirunut dari makna komponennya yang

tergabung. Ciri lain bentuk majemuk ialah urutannya yang tetap dan unsurnya tidak dapat dipertukarkan tempatnya.

Contoh: *temu wicara* tidak dapat menjadi *wicara temu*
siap tempur tidak dapat menjadi *tempur siap*
busting lapar tidak dapat menjadi *lapar busung*
mahakuasa tidak dapat menjadi *kuasamaha*

5. Perulangan

Perulangan dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan kejamakan, kemiripan, dan penonjolan.

Contoh: buku → buku-buku
wanita → kewanita-wanitaan
kami → kami-kami
bersalaman → bersalam-salaman

Lampiran Daftar Kesalahan Penggunaan Bentuk Kata

Nama : Toplah

NIM/NIRM : 936815/9311016000062

Tahun Skripsi : 1999

No.	Hlm./Almea/Brs.	Tertulis	Seharusnya
1.	1/2/1	kesalah pahaman	kesalahpahaman
2.	1/2/3; 3/1/1	Diatas	di atas
3.	3/2/4	Masmedia	media massa
4.	4/1/3	di evaluasi	dievaluasi
5.	4/2/1	Didalam	di dalam
6.	5/2/8	Kelapangan	ke lapangan
7.	6/3/2	sub bab	subbab
8.	11/2/3	dari pada	daripada
9.	14/2/1	Disini	di sini
10.	17/2/4	kekurang waspadaan	kekurangwaspadaan
11.	19/3/2	Kedalam	ke dalam
12.	20/2/4	Dikawasan	di kawasan
13.	22/2/1	Berbangsa	berkebangsaan
14.	22/2/3	ketidak sadaran	ketidaksadaran
15.	22/2/6	sal ing pengaruh mempengaruhi	pengaruh- mempengaruhi
16.	29/3/3	kegoncangan- kegoncangan	goncangan- goncangan
17.	30/1/2	and pati	antipati
18.	30/3/3	Kemasa	ke masa
19.	30/3/3	Perobahan	perubahan
20.	34/1/3	di anggap	dianggap
21.	38/baris 7	tergantung dari	bergantung pada
22.	39/1/11	pra kesadaran	prakesadaran
23.	40/baris 12	di penuh	dipenuhi
24.	45/2/2	Memperoleh	diperoleh
25.	45/3/2; 54/1/8	di lihat	dilihat
26.	58/3/2	di ajukan	diajukan
27.	58/3/4	di izinkan	diizinkan
28.	59/1/4	meng insapi	menginsafi
29.	60/2/1	uraian-uraian	uraian

Nama : Deny Abdi Nasution
 NIM/NIRM : 957462/9511016000194
 Tahun Skripsi : 2000

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
1	1/2/1	Disini	di sini
2	1/2/4	Wanita pun	wanita pun
3	6/2/3	Disamping	di samping
4	6/2/3	Diantara	di antara
5	6/barus 9 & 10	Sipelaku	si pelaku
6	8/2/7	dari pada	daripada
7	9/1/5	Dimuka	di muka
8	11/1/1	menterjemahkan	menerjemahkan
9	13/3/3	Dirumah	di rumah
10	14/2/9	Kejurang	ke jurang
11	15/1/1	Dipihak	di pihak
12	15/2/6	Difikiran	di pikiran
13	15/2/6	foya-foya	berfoya-foya
14	16/baris 1	Menyiakan	Menyia-yiakan
15	18/baris 2	dibuta dan ditulikan	dibutakan dan ditulikan
16	19/2/3	menghubungkan	berhubungan
17	19/2/8	Teratur	diatur
18	19/2/9	Dilokalisir	dilokalisasi
19	23/2/5	menumbuh suburkan	menumbuhs suburkan
20	23/2/5	Orangpun	orang pun
21	24/1/7	Jadi	menjadi
22	24/1/7	hura- hura	berhura- hura
23	30/1/1	di kenal	dikenal
24	32/2/1	Ditengah	di tengah
25	32/3/4	Sianak	si anak
26	33/4/2	Bekerjasama	bekerja sama
27	35/3/4	Dibayarpun	dibayar pun
28	36/3/5	pelacur beneran	benar-benar pelacur
29	45/3/2	para wanita-wanita pelacur	wanita-wanita pelacur

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
30	45/3/3	para waria-waria	para waria; waria-waria
31	46/1/2	dipersimpangan	di persimpangan
32	52/2/2	Memberitahu	memberi tahu
33	54/5/5	Cari	mencari
34	55/4/2	ke tiga	ketiga
35	64/baris/4	para unjuk rasa	para pengunjuk rasa

Nama : M. Yunus Tazryan
 NIM/NIRM : 967687/9611016000147
 Tahun Skripsi : 2001

No	Hlm/ Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
1	3/2/3; 21/1/5	dipertanggung jawabkan	dipertanggungjawabkan
2	5/3/3; 6/1/3	pertanggung jawaban	pertanggungjawaban
3	12/2/2	loka karya	lokakarya
4	14/2/3	Kerjasama	kerja sama
5	14/2/4	dari pada	daripada
6	15/1/17	multi nasional	multinasional
7	23/1/4	mempertanggung jawabkan	mempertanggungjawabkan
8	25/2/4	sub cultural	subkultural
9	26 /baris 6	mengkaitkannya	mengaitkannya
10	41/2/11	bagian sub	subbagian
11	44/1/8; 49 baris 4	satu-persatu	satu per satu
12	44/1/9	Dibawah	di bawah
13	45/baris 2	sebesar-besarnya kemakmuran	sebesar-besar kemakmuran
14	58/1/4	mengenyampingkan	mengensampingkan
15	67/1/10	Disekitar	di sekitar
16	71/1/2; 71/2/6	pasca industri	pascaindustri

Nama : Imelda Syafriani Situmeang
 NIM/NIRM : 988238/9871000631084
 Tahun Skripsi : 2002

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
1	1/1/2	Kadangkala	kadang kala
2	2/1/3	mengonsumsi	mengonsumsi
3	7/2/4	di tiadakan	ditiadakan
4	8/2/3	dipertanggung jawabkan	dipertanggungjawabkan
5	10/2/4	melatar belakang	melatarbelakangi
6	11/2/6	sosio cultural	sosiodultural
7	17/3/6	Akhir	terakhir
8	20/1/3	Menyolok	mencolok
9	20/1/4	Disamping	di samping
10	20/2/4	Diatas	di atas
11	21/1/2	Pelajari	mempelajari
12	21/2/2	dimana-mana	di mana-mana
13	21/2/6	multi media	multimedia
14	25/baris 2	ketidak mampuan	ketidakmampuan
15	29/4/1	non komersil	nonkomersil
16	34/1/2	kemana-mana	ke mana-mana
17	36/5/1	sub-sub	subbab
18	38/3/6	di sajikan	disajikan
19	41/1/6	di ambil	diambil
20	49/3/3	Obatpun	obat pun
21	49/3/3	Didunia	di dunia
22	50/baris 3	Ditangan	di tangan
23	50/1/5	tergolong bahaya	tergolong berbahaya
24	51/1/7	Bertukar	Bertukar
25	51/2/1	ketidak amanan	ketidakamanan
26	51/2/3	mei instant	mi instan
27	51/2/9	Memerintah	memerintah
28	53/1/1	Ditahun	di tahun

Nama : Abdul Rahman Hutasuhut

NIM/NIRM : 9101011495

Tahun Skripsi : 2003

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
1	1/1/3	siapapun juga	siapa pun
2	1/1/4	lanjut usia	usia lanjut
3	3/1/3	Mendasarkannya pada	berdasar pada
4	5/3/1	melatar belakang	melatarbelakangi
5	6/baris 9 & 10	Sipelaku	si pelaku
6	7/1/5	Dimana	di mana
7	8/3/8	ketidak sesuaian	ketidaksesuaian
8	9/1/2	ketidak mampuan	ketidakmampuan
9	9/1/2	a-sosial sifanya	bersifat sosial
10	12/1/2	mati orang	orang mati
11	13/1/1	lain-lain orang	orang lain
12	13/1/2; 14/2/2	dipertanggung jawabkan	dipertanggungjawabkan
13	15/1/3	Dimaksud	dimaksudkan
14	15/1/3	Diniati	diniatkan
15	21/2/1; 22/4/2	Diantara	di antara
16	24/3/5	pra kejahatan	prakejahatan
17	24/3/6	pasca kejahatan	pascakejahatan
18	24/4/1	Ilmu pengetahuan- ilmu pengetahuan	Ilmu -ilmu pengetahuan
19	30/5/2	sub bab	subbab
20	34/4/3; 35/1/3	Kearah	ke arah
21	38/2/3	Ditempat	di tempat
22	38/2/4	kedaerah daerah	ke daerah daerah
23	45/1/4	Kedalam	ke dalam
24	47 baris 3	mengenyampingkan	mengesampingkan
25	48/baris 1	diperjual belikan	diperjualbelikan
26	53/1/8	Berpergian	bepergian

Pilihan Kata (Diksi)

Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting, baik dalam bidang karang-mengarang maupun dalam percakapan sehari-hari. Kekurangtepatan dalam pilihan kata akan mengakibatkan karangan atau pembicaraan kurang berbobot dan kurang bernilai.

Jadi, pilihan kata adalah mutu dan kelengkapan kata yang dikuasai seseorang sehingga ia mampu menggunakan secara tepat dan cermat berbagai perbedaan dan persamaan makna kata sesuai dengan tujuan dan gagasan yang akan disampaikan, serta mampu untuk memperoleh bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki pembaca dan pendengar.

Syarat Pemilihan Kata

Syarat pilihan kata adalah ketepatan, kebenaran, dan kelaziman.

Ketepatan adalah bahwa kata itu dapat mengungkapkan gagasan secara cermat. kut ini contoh pilihan kata yang tidak tepat dalam kalimat.

1. Adik membuat ban mobil-mobilan dari mantan selop.
2. Berkali-kali diperingatkan oleh ibunya agar tidak nakal, tetapi Parto mengacuhkan saja peringatan itu.
3. Terima kasih,"*kilah* Roni, ketika ia dibelikan baju dan sepatu oleh abangnya.

Kebenaran adalah bentuk kata sesuai dengan kaidah kebahasaan. Berikut ini contoh pilihan kata yang tidak benar dalam kalimat.

1. Panitia telah merubah jadwal pertandingan besok.
2. Andi bertugas sebagai penterjemah dalam seminar internasional itu.
3. Siapakah ilmiawan yang terbesar abad ini?

Kelaziman adalah kata yang sudah dibiasakan dan bukan merupakan bentuk yang dibuat-buat. Berikut ini contoh pilihan kata yang tidak lazim dalam kalimat.

1. Kucing peliharaannya meninggal mendadak.
2. Nenek telah lama mati.
3. Nelva sedang menyiram puspa di halaman depan.

Kata-kata yang lazim dipakai dalam bahasa tutur atau bahasa-bahasa daerah perlu dihindari.

Contoh: bikin	→ buat
bilang	→ katakan
kasih	→ beri
menghaturkan	→ menyampaikan

Aspek Makna

a. Sinonim

Contoh: mati, meninggal, wafat, tewas, mangkat, mampus, kembali ke rahmatullah.

Contoh: **bisa** 1. Racun; 2. dapat

b. Makna denotasi dan makna konotasi

c. Makna umum dan makna khusus

Aspek Bentuk

Contoh bentuk yang salah dan bentuk yang benar

Salah	Benar
ketemu	bertemu/ditemukan
ketawa	tertawa
rubah/roba	ubah
merubah/merobah	mengubah

Bentuk Analogi dari bahasa asing

investasi
organisasi
standardisasi

Muncul bentuk yang dipaksanakan

lelenisasi
pompanisasi
kuningisasi

bentuk Analogi

Dari bentuk kata *peninjau* dan *petinju* muncul bentuk;
Penatar dan *petatar*
Penyuluh dan *pesuluh*
Penguji dan *peuji*

Bentuk yang bersaing

mengapa - kenapa
imbau - himbau
andal - handal
utang - hutang

Lampiran Daftar Kesalahan Pilihan Kata (Diksi)

Nama : Topiah
 NIM/NIRM : 936815/9311016000062
 Tahun Skripsi : 1999

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
1	1/1/3	Kriminil	kriminal
2	2/3/1	adalah merupakan	adalah; merupakan
3	4/1/7	Menganalisa	menganalisis
4	4/3/1	Hipotesa	hipotesis
5	5/baris 2 & 3	Interen	intern
6	5/baris 3 & 4	Eksteren	ekstern
7	5/baris 8	Prefentif	preventif
8	5/1/3	Study	studi
9	6/2/5	Analisa	analisis
10	6/4/5	Psikoanalisa	psikoanalisis
11	8/2/2	Hutang	utang
12	19/3/4	antara lain	yaitu
13	23/2/2	Eksperimentil	eksperimental
14	23/3/3	Hakekatnya	hakikatnya
15	25/baris 5 & 8	Nampak	tampak
16	26/1/4	Tiori	teori
17	28/3/4	dari sejak	dari; sejak
18	29/3/2	di masa	pada masa
19	30/1/1	Aktifitas	aktivitas
20	33/3/1	Perujudan	perwujudan
21	33/4/6	Kecendrungan	kecenderungan
22	35/baris 2	Emosionil	emosional
23	35/3/1	Type	tipe
24	38/baris 1	Code	kode
25	43/4/1	Personality	personalitas
26	44/1/6	Frustasi	frustrasi
27	45/3/2	Dari	pada
28	52/baris 1	tempat dimana	tempat
29	59/1/4	Ketrampilannya	keterampilannya

Nama : Deny Abdi Nasution
 NIM/NIRM : 957462/9511016000194
 Tahun Skripsi : 2000

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
1	1/1/4; 1/3/1	Tak	tidak
2	2/2/1	di saat	pada saat
3	3/1/1	ada tersedia	ada; tersedia
4	3/1/3	Tapi	tetapi
5	3/2/9; 17/2/1	Praktek	praktik
6	6/2/3	dengan mana	yang
7	7/baris 3	Naschat	nasihat
8	8/1/5	Anggauta	anggota
9	9/1/2	seperti antara lain	seperti; antara lain
10	9/1/7	Zinah	zina
11	11/2/1	Formil	formal
12	13/2/2	so pasti	pasti
13	15/2/3	Refreshing	penyegaran
14	15/2/4; 22/4/4	Sekedar	sekadar
15	18/1/14	Langganannya	pelanggannya
16	20/baris 3	Seksuil	seksual
17	21/2/2	Service	pelayanan
18	22/1/4	sejauh mana	seberapajauh
19	22/4/2	Mall	mal
20	22/4/2	Café	kafe
21	23/2/4	Ecstasy	ekstasi
22	23/3/1	Diplomats	dilematis
23	24/1/4	Nebeng	menumpang
24	24/1/6	Bukan	tidak
25	24/2/2	Nyolong	mencuri
26	25/1/6	Kepingin	ingin
27	25/1/8	Disco	disko
28	29/1/5	Kreatifitas	kreativitas
29	30/2/8	Frustasi	frustrasi
30	32/1/5	Ijin	izin
31	33/3/4	Ketimbang	dibanding

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
32	35/1/4	Duitnya	uangnya
33	38/baris 6	Fatner	pasangan
34	46/2/4	Cabut	pergi
35	56/baris 1	Kenapa	mengapa

Nama : M. Yunus Tazryan
 NIM/NIRM : 967678/9611016000147
 Tahun Skripsi : 2001

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
1	3/2/1	sejauhmana	seberapajauh
2	3/3/6	banyak perusahaan-perusahaan	banyak perusahaan
3	4/1/5	propinsi	provinsi
4	5/2/4	praktek	praktik
5	13/baris 2	fbrmil	formal
6	13/baris 3	materil	material
7	14/baris3	riil	real
8	14/baris 14	maximum	maksimum
9	15/1/1	dari pada	dari
10	17/baris 3	provit	profit
11	19/1/2 & 5	sekedar	sekadar
12	20/1/11	ikhwal	ihwal
13	22/1/2	juridis	yuridis
14	25/2/2	persfektif	perspektif
15	26/1/2	essensial	esensial
16	30/1/1; 51/1/7	industrialisasi	industrialisasi
17	30/1/9	illegal	ilegal
18	31/1/10	international	internasional
19	35/1/4	hakekatnya	hakikatnya
20	41/1/4	dianalisa	dianalisis
21	46/1/2; 47/1/2	mahluk	mahluk
22	52/2/1	subsidaair	subsider
23	60/1/2	negeri	negara
24	62/baris 7	ketentraman	ketenteraman
25	64/1/5	berfikir	berpikir
26	72/1/6	defenisi	defmisi
27	74/1/5	katagori	kategori

Nama : Imelda Syafriani Situmeang
 NIM/NIRM : 988238/9871000631084
 Tahun Skripsi : 2002

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
1	2/baris 3; 30/2/3	obyek	objek
2	3/2/1	coba	akan
3	7/1/3	harafiah	harfiah
4	14/5/2	materil	material
5	19/3/1	sekedar	sekadar
6	21/2/5	tak	tidak
7	23/2/2	beresiko	berisiko
8	23/5/2	resiko	risiko
9	24/2/4	type	tipe
10	26/2/4	externalities	eksternalitas
11	30/2/3	image	imaji
12	32/baris 2	advertising	advertensi
13	34/baris 1	kemodrenan	kemodernan
14	34/baris 7	bule	bulai
15	35/1/2	adalah merupakan	adalah; merupakan
16	39/1/5	bathin	batin
17	39/1/7	maag	mag
18	40/baris 4	praktek	praktik
19	48/2/6	berprilaku	berperilaku
20	49/baris 2	partner bisnis	rekan bisnis
21	52/2/7	prilaku	perilaku
22	53/2/3	mentri	menteri
23	54/baris 3	subsidaair	subsider

Nama : Abdul Rahman Hutasuhut
 NIM/NIRM : 7101011495
 Tahun Skripsi : 2003

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
1	1/1/2; 26/2/1	kriminil	kriminal
2	1/3/1	dipungkiri	dimungkiri
3	2/4/3	frustasi	frustrasi
4	2/4/4	bathin	batin
5	7/1/1; 9/5/2	adalah merupakan	adalah; merupakan
6	8/3/2	materil	material
7	9/2/2	immoril	imoral
8	14/1/8	kepergok	tepergok
9	18/1/1	praktek	praktik
10	21/1/3	oleh	pada
11	21/2/2	defenisi	definisi
12	24/3/2	obyek	objek
13	26/4/1; 27/1/1	phisikologi	psikologi
14	26/4/7	phisikhis	psikis
15	30/4/1	kwalitatif	kualitatif
16	32/1/3	seperti misalnya	misalnya
17	33/1/2; 33/3/1	negatip	negatif
18	33/2/4	positip	positif
19	33/2/4	misalnya seperti	seperti
20	35/3/2; 36/1/6	berfikir	berpikir
21	37/4/1	sangat besar sekali	sangat besar; besar sekali
22	39/2/4	resiko	risiko
23	41/3/4	jam 22.00	pukul 22.00
24	45/1/6	psykologi	psikologi
25	46/4/2	menganalisa	menganalisis
26	46/4/3	prilaku	perilaku
27	48/baris 2	illegal	ilegal
28	50/4/2	sholat	salat

No	Hlm/Almea /Brs	Tertulis	Seharusnya
29	50/4/3	berjamaah	berjamaah
30	50/5/1	nainpak	tampak
31	51/1/3	latihan dan pendidikan	pelatihan dan pendidikan.
32	51/1/5	mengecet	mengecat

Kalimat

Kalimat adalah satu bagian rentetan kata yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Dalam bahasa tulis, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.), tanda seru, atau tanda baca serta di dalamnya terdapat pokok pikiran yang utuh. Persyaratan lain adalah bahwa kalimat harus memiliki unsur subjek atau pokok kalimat dan predikat atau sebutan. Gabungan beberapa kata, yang jika dituliskan sudah cukup panjang, tetapi tidak memperlihatkan adanya unsur sebagai subjek atau predikat, bukanlah sebuah kalimat.

Pengertian kalimat di atas tidak serta-merta dapat dimanfaatkan pengguna bahasa membentuk kalimat yang gramatikal. Yang penting adalah bahwa perlu diperhatikan apakah kalimat yang dihasilkan sudah benar. Selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat-kalimat yang gramatikal yang dihasilkan orang lain. Dengan mengenali dan menghasilkan kalimat yang gramatikal, pengguna bahasa selanjutnya dapat membuat kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang dapat menimbulkan efek (pengaruh) kepada pendengar atau kepada pembacanya. Kalimat efektif mempersyaratkan penggunaan kata yang cermat (menghindari pemborosan penggunaan kata), pemunculan unsur-unsur yang harus ada, dan penyampaian informasi yang tidak bertentangan dengan penalaran yang logis.

Kalimat-kalimat para mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya di Fakultas Hukum, ternyata masih belum mengembirakan. Selain banyak yang hanya merupakan penggalan

kalimat, banyak pula yang tidak memenuhi persyaratan gramatikal (kaidah tata bahasa). Marilah kita perhatikan kalimat berikut.

(1). Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. (Hendro 1999: 1).

Kalimat itu tidak memenuhi syarat gramatikal karena tidak ada unsur yang berfungsi sebagai subjek. Dengan membaca kalimat sebelumnya, memang kita dapat mengetahui subjek kalimat itu. Namun, subjek kalimat harus eksplisit hadir, tidak dapat dilesapkan dan atau diwakili subjek kalimat sebelumnya. Secara lebih nyata untuk mengetahui sebuah kalimat yang tidak bersubjek, dapat diajukan sebuah pertanyaan: siapa yang harus tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945? Jawaban pertanyaan itulah yang berpotensi menjadi unsur subjek. Ternyata tidak ada jawaban atas pertanyaan dalam kalimat tersebut. Jadi, kalimat itu adalah kalimat yang tidak bersubjek dan merupakan kalimat yang tidak benar. Marilah kita perhatikan dahulu kalimat sebelumnya itu.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4, secara tegas ditentukan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar (Hendro 1999:1).

Di dalam kalimat itu terdapat unsur subjek, yaitu Presiden Republik Indonesia. Ternyata berdasarkan informasi itu, dapat ditentukan bahwa kalimat berikutnya juga bersubjek yang sama sehingga kalimat yang salah (tidak gramatikal) pertama diperbaiki menjadi seperti berikut.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden harus tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sekarang mari kita perhatikan bentuk kalimat lain yang tidak menghasilkan unsur predikat. Informasi yang disampaikan memang dapat dipahami, tetapi kalimat itu tidak mencerminkan pikiran yang jernih, sekaligus tidak memenuhi syarat tata bahasa.

Hal itu juga sebagai akibat akan tidak terpantaunya keadaan tersebut (Samsul 2004: 51). Tidak satu pun unsur kata yang berpotensi sebagai predikat kalimat. Hal itu disebabkan kehadiran preposisi sebagai menjadi pemarkah keterangan. Dapat juga

ketiadaan predikal kalimat disebabkan pelepasan unsur akibat sudah dianggap tahu melalui kalimat sebelumnya. Struktur seperti itu tidak dapat diterima dalam penulisan kalimat formal. Perhatikanlah kalimat sebelumnya itu. Peningkaran keterangan tersebut telah mengakibatkan tidak jelasnya keterangan ataupun pendataan tentang keberadaan pengangguran di kelurahan tersebut.

Hal itu berhubungan dengan ungkapan peningkaran keterangan tersebut; dan itulah yang menjadi unsur subjek. Unsur predikat harus dimunculkan dengan cara menambahkan unsur dari luar bagian kalimat tersebut atau dengan cara mengubah bentuk kata yang berpotensi menjadi predikat. Berikut ini bentukannya.

- (a) *Hal itu terjadi sehingga keadaan tersebut tidak akan terpantau.*
- (b) *Hal itu mengakibatkan tidak akan terpantaunya keadaan tersebut.*
- (c) *Sebagai akibat peningkaran keterangan tersebut, tidak akan terpantau keadaan pengangguran di keurahan tersebut.*

Ketiga bentuk kalimat itu dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan kalimat yang salah di atas. Jika dibandingkan, kalimat perbaikan akan lebih memperlihatkan kejelasan, kelugasan, dan kejernihan pikiran daripada kalimat yang tidak berpredikat sebelumnya. Predikat pada kalimat (a) adalah terjadi, pada kalimat (b) adalah mengakibatkan, dan pada kalimat (c) adalah tidak akan terpantau.

Berikut ini akan diketengahkan bentuk-bentuk kalimat yang salah dan bentuk perbaikannya (berdasarkan ata dari skripsi mahasiswa FH, UISU, Medah).

Salah
Pembangunan manusia seutuhnya yang telah ditetapkan sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan yang bersifat luas maknanya. (Samsul 2004:3) (kalimat terbelah)
Benar
Pembangunan manusia seutuhnya yang telah ditetapkan sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan yang maknanya bersifat luas

Salah
Lurah dapat diterima kepengimpinannya oleh anggota masyarakat karena pemimpin tersebut dapat memberikan respon terhadap kebutuhan para anggota masyarakat dan dapat memenuhi keinginan-keinginan serta membantu dalam kondisi kerja yang diinginkan oleh anggota masyarakatnya. (Samsul 2004: 20) (kalimat terbelah) (kata mubazir)
Benar
Kepemimpinan lurah dapat diterima anggota masyarakat jika dapat dianggap memberi respon terhadap kebutuhan para anggota masyarakat dan dapat memenuhi keinginan-keinginan serta membantu dalam kondisi kerja yang diinginkan oleh anggota masyarakatnya.

Salah
Dalam spesifikasi penelitian ini penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian yang dilakukan dari sifatnya, apakah penelitian eksploratoris, deskriptis dan eksplanatoris. (Samsul 2004: 24) (kalimat transitif tidak berobjek) (kata mubazir)
Benar
Dalam spesifikasi penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa jenis penelitian berdasarkan sifatnya, yaitu penelitian eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris.

Salah
Namun demikian yang membedakan tugas yang telah diamanatkan perundang-undangan dengan dilekatkan masyarakat kepadanya secara sosiologis, terdapat perbedaan dalam hal pertanggungjawaban dan wewenang yang dipikul ataupun yang dimilikinya (Samsul 2004: 31) (kalimat rancu)
Benar
Namun, perbedaan antara tugas yang diamanatkan perundang-undangan dengan tugas yang dilekatkan masyarakat kepadanya secara sosiologis adalah ihwal pertanggungjawaban dan wewenang.

Salah
Pada bagian ini penulis akan menguraikan gambaran tentang pelaksanaan tugas Lurah di Kelurahan Kampung Baru. (Samsul 2004:42) (kalimat transitif)
Benar
Pada bagian ini penulis akan menguraikan gambaran pelaksanaan tugas Lurah di Kelurahan Kampung Baru. (Samsul 2004:42) (kalimat transitif)

Salah
Sejalan dengan itu pula, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan maka suatu pengawasan pembangunan dalam kondisi ini sangat diperlukan sekali. (Henro: 1999:1) (kalimat mubazir)
Benar
Sejalan dengan itu, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan target, pengawasan pembangunan dalam kondisi sangat diperlukan.

Salah
Mengenai pengawasan yang berfungsi ikut menunjang dalam keberhasilan pembangunan, Soewarno Hadiningrat mengatakan bahwa fungsi pengawasan, adalah: (Hendro 1999:7) (kalimat terbelah)
Benar
Soewarno Hadiningrat mengatakan bahwa fungsi pengawasan adalah

Salah
Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan....." (Topiah, 1999:1) (kalimat boros kata-kata)
Benar
Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan....

Salah
Sedangkan Kotamadya Medan adalah lokasi atau tempat dilaksanakannya penelitian dan penulisan skripsi ini. (Toplah 1999:2) (kalimat terpenggal)
Benar
Kotamadya Medan adalah lokasi atau tempat dilaksanakannya penelitian dan penulisan skripsi ini.

Salah
Dengan demikian jelaslah bagi kita pengertian kejahatan penipuan, baik secara luas yang berkembang dalam masyarakat umumnya maupun secara diatur dalam KUHP. (Toplah:1999:9 -10) (kalimat tak bersubjek)
Benar
Dengan demikian, jelaslah bagi kita pengertian kejahatan penipuan, baik secara luas yang berkembang dalam masyarakat umumnya, maupun yang diatur dalam KUHP.

Salah
Aliran ini lebih banyak menyelidiki ketidak sadaran pada jiwa seseorang yang mempunyai kekuatan yang membuatnya dinamis yang selalu mengalami pergeseran, gerakan-gerakan akibat saling pengaruh antara faktor-faktor dalam alam ketidak sadaran tersebut. (Toplah: 1999:22) (kalimat transitif, tidak bersubjek, dan rancu).
Benar
Aliran ini lebih banyak menyelidiki ketidaksadaran pada jiwa seseorang yang mempunyai kekuatan yang membuatnya dinamis

Salah
Psikoanalisa merupakan bagian dari psikiatri, yaitu suatu ilmu yang diciptakan oleh Sigmund Freud. Yang mengutamakan penelitian terhadap das Unbewusste (alam tak sadar) dalam kejiwaan manusia, dengan menelaah unsur-unsur intern yang hidup pada

jiwa manusia yang dinamaka struktur personality (Toplah 1999:39) (kalimat rancu, terpenggal)
Benar
Psikoanalisis merupakan bagian dari psikiatri, yaitu suatu ilmu yang diciptakan oleh Sigmund Freud. Ilmu ini mengutamakan penelitian terhadap <i>das unbewusste</i> (alam tak sadar) dalam kejiwaan manusia. Dengan meneiaah unsur-unsur intern yang hidup pada jiwa manusia (struktur personalitas) (Toplah 1999:39) (kalimat rancu, terpenggal)

Kesalahan kalimat yang dibuat oleh Imelda sangat sulit diperbaiki. Oleh karena itu, dalam bentuk perbaikan, selalu digunakan tanda elipsis (...)

Salah
Di dalam perpustakaan juga sering menjumpai perkataan-perakataan lain untuk menyebut apa yang dimaksud dengan "Strafbaar Feit" (Imelda 2002:9) (Kalimat tidak bersubjek, tidak logis)
Benar
Di dalam perpustakaan, juga sering ditemukan ungkapan-ungkapan lain untuk menyebut <i>strafbaar feit</i>

Salah
Dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian demi kepentingannya. Karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/jasa juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. (Imelda 2002:19) (Kalimat induk dan anak terpisah)
Benar
Dari sisi... demi kepentingan karena pada....

Salah
Untuk memudahkan dan mendasarkan diri pada pemahaman umum masyarakat tentang kepentingan mereka sebagai konsumen maka bahasan tentang kepentingan konsumen ini dilakukan dengan

menggunakan pengelompokan bantuk lain, yaitu: (Imelda 2002:42) (kalimat rancu, induk kalimat diawali penghubung)

Benar

Untuk memudahkan dan mendasarkan diri pada pemahaman.....

Salah

Karena sesungguhnya seluruh rakyat itu adalah konsumen (Pengguna atau pemakai barang dan/jasa kebutuhan hidup), maka tidak perlu diragukar bahwa kesemua hak dan kepentingan rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum positif, terutama yang berkaitan dengan penggunaan barang atau jasa konsumen, adalah hak dan kepentingan konsumen. (Imelda 2002:42) (Kalimat rancu)

Benar

Karena seluruh rakyat adalah konsumen, tidak perlu diragukan lagi....

Salah

Dilihat dari pola pengelompokan konsumen (klasifikasi) jenis sanksi menurut konsep di atas, ada kesamaan dengan KUHP (WPS). (Imelda 2002:57) (kalimat rancu, tidak bersubjek)

Benar

Jika dilihat dari pola penglompokan konsumen (klasifikasi) jenis sanksi menurut konsep di atas, ada kesamaan dengan KUHP (WPS).

Salah

Untuk memberikan pengertian tentang pengawasan secara lengkap sangat sulit, karena pengawasan memilki aspek sangat luas. Hendro 1999:23) (kalimat tidak bersubjek, tidak berinduk)

Benar

Pengertian pengawasan secara lengkap sangat sulit diuraikan karena pengawasan itu mempunyai aspek yang sangat luas

Salah
Untuk memberikan pengertian tentang pengawasan secara lengkap sangat sulit, karena pengawasan memiliki aspek sangat luas. (Hendro 1999:23) (kalimat tidak bersubjek, tidak berinduk)
Benar
Pengertian pengawasan secara lengkap sangat sulit diuraikan karena pengawasan itu mempunyai aspek yang sangat luas

Salah
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 ditempat yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja harus dibentuk suatu kepaniatan daerah.... (MaudY 2000:11) (kalimat rancu)
Benar
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, ditempat kejadian perkara ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, harus....

Salah
Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang pesat terutama dalam sektor ekonomi terlebih-lebih dengan masuknya investasi modal asing berupa modal yang berasal dari negara asing maupun dalam negeri telah mengakibatkan timbulnya masalah baru di bidang ketenagakerjaan pada umumnya dan masalah perburuhan pada khususnya. (Maudy 2000: 16) (kalimat tak bersujuk/rancu)
Benar
Perkembangan pembangunan yang pesat terutama dalam sektor ekonomi, terlebih-lebih dengan masuknya investasi modal asing berupa modal yang berasal dari negara asing maupun dalam negeri, telah mengakibatkan timbulnya masalah baru di bidang ketenagakerjaan pada umumnya dan masalah perburuhan pada khususnya.

Salah
Walaupun perjanjian perburuhan itu merupakan hasil perundingan antara pihak buruh dengan pengusaha sehingga isinya mendekati keinginan mereka masing-masing namun berdasarkan perkembangan yang terjadi sebagai akibat berbeturannya kepentingan di antara mereka, maka timbul perselisihan antara pihak buruh dengan pengusaha/majikan tidak dapat dihindari. (Maudy 2000:28) (kalimat rancu/tidak berinduk)
Benar
Walaupun perjanjian perburuhan itu merupakan hasil perundingan antara pihak buruh dengan pengusaha, yang isinya mendekati keinginan masing-masing, perselisihan mereka tetap tidak dapat dihindari akibat berkembangnya atau berbenturannya kepentingan pihak itu.

Salah
Dengan maksud untuk mendidik dan membina pegawai negeri sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan, dikenakan sanksi, berupa hukuman disiplin. (Zulham 2001) (kalimat rancu)
Benar
Dengan maksud untuk mendidik dan membina pegawai negeri sipil, orang yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. (Zulham 2001: 29) (kalimat rancu)

Salah
Metode pengumpulan data ini landasan utama dalam penyusunan skripsi terlebih-lebih apabila skripsi tersebut di dasarkan atas mutu peneletian. (Zulham 2001: 42) (kalimat tak logis)
Benar
Metode pengumpulan data diperlukan dalam penyusunan skripsi ini karena skripsi ini didasarlkan pada mutu penelitian ilmiah.

Salah
Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutannya karena tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut menangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. (Usman 1996: 5) (kalimat rancu tak bersubjek)
Benar
Dalam hal memutuskan penghentian penuntutan...dan ditutup demi hukum, penuntut umum....

Daftar Pustaka

- Adjat Sukri, 1988, *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia*, Bandung: Pen.ITB
- Alwi Hasan, 2011, *Bahasa Indonesia Pemakai dan Pemakaiannya*, Jakarta: Badan Bahasa
- Alwi Hasan, Dendy Sugono, 2000, *Politik Bahasa*, Jakarta: Penerbit Depdiknas
- Ansari Khairil. *Berbahasa Indonesia (Ranah Hukum dan Umum)*, Medan. Penerbit Mitra
- Bujono Bambang, L.S. Chudori, 2008, *Bahasa*, Jakarta: Tempo.
- Badudu J.S., 1984, *Bahasa Indonesia yang Benar*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- _____, 1986, *Bahasa Indonesia yang Benar II*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- _____, 1982, *Pelik-pelik Bahasa Indonesia*, Bandung: PT Pustaka Prima.
- Chalne Donald D, 2004, *Batas Nalar, Rasionalitas dan Perilaku Manusia*. Jakarta: KPG, Gramedia
- Daryono Iqbal Aji, 2019, *Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira*, Penerbit Diva Press.
- Hadi Umry Shafwan, 2011, *Bahasa Pers, Iklan, dan Bahasawan*, Medan: Penerbit USU Press.
- _____, 2016, *Sikap Kita Berbahasa*, Medan Penerbit: Mitra
- _____, 2016, *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, Medan: Penerbit Mitra.
- Johan Nasution Bahder, Sri Warjiati, 1998. *Bahasa Indonesia Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeliono Anton, 1984, *Santun Bahasa*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

- _____, 1989, *Kembara Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia
- Mustakim, 1996, *Tanya Jawab Ejaan Bahasa Indonesia Untuk Umum*, Jakarta: PT Gramedia
- Sugono Dendy, 2011, *Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Pusat Bahasa
- Simatupang Salomo, 2006, *111 Kolom Bahasa Kompas*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Profil Penulis



Dr. Shafwan Hadi Umry, M.Hum, lahir 27 Januari 1951 di Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Menamatkan pendidikan di SD Negeri Perbaungan, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam (S-1) IKIP Negeri Medan, dan S-2 (2008) serta S-3 (2014) pada Sekolah Pascasarjana Prodi Linguistik Fakultas Ilmu Budaya USU Medan. Beliau pernah menjadi guru SMP Negeri (1976-1982). Guru SMA Negeri 1 Medan (1982-1993). Beberapa buku yang ditulisnya antara lain, Bahasa Pers, Iklan dan Bahasawan (USU Press, 2011), Mitos Sastra Melayu (USU Press, 2010), Manusia Bandar dalam Pergulatan Budaya (USU Press, 2012), Serumpun Sajak Melayu (PMS, 2014), Sastra Relegius (Mitra, 2012). Tulisannya dalam bentuk artikel dan jurnal serta makalah telah beredar di berbagai surat kabar dan majalah baik di dalam negeri maupun luar negeri.



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A., Lahir di Bandung, 08 Maret 1962. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Sastra Indonesia di Universitas Sumatera Utara (1987). Pendidikan Magister pada Linguistik Universiti Sains Malaysia, Penang Malaysia (2001) dan Pendidikan Doktor Linguistik, Universitas Sumatera Utara (2014). Juga mengikuti *Sandwich-Like Program-S3* Luar Negeri di NANYANG TECHNOLOGICA UNIVERSITY (NTU) Singapura (2012). Beliau adalah Dosen Lembaga Layanan Dikti Wilayah Sumatera Utara dpk Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Haran Medan. Saat ini aktif mengajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Filsafat Bahasa, Character Building, Etika dan Pengembangan Diri.